

**PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP BELANJA
MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH TERTINGGAL DI
INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH

FERI PRASTYO SETIAWAN

NIM : 15520009

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP BELANJA
MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH TERTINGGAL DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



OLEH

FERI PRASTYO SETIAWAN

NIM : 15520009

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP BELANJA
MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH TERTINGGAL DI
INDONESIA**

SKRIPSI


Oleh

FERI PRASTYO SETIAWAN

NIM : 15520009

Telah disetujui pada tanggal 1 Desember 2019

Dosen Pembimbing,


Sr. Andriani, S.E., M.Si.
NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan,


Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak.,CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN




PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP BELANJA
MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH TERTINGGAL DI
INDONESIA

Oleh
FERI PRASTYO SETIAWAN
NIM: 15520009

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
pada tanggal 17 Desember 2019

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua
YonaOctiani L., SE., M.SA., AP., CSRS., CSRA., CfrA : ()
NIP. 19771025 200901 2 006
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Sri Andriani, S.E., M.Si. : ()
NIP. 19750313 200912 2 001
3. Penguji Utama
Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak. : ()
NIP. 19761019 200801 2 011

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., MSI., Ak., CA
NIP : 19720322 200801 2 005

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feri Prastyo Setiawan

NIM : 15520009

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang,

Hormat saya,



Feri Prastyo Setiawan

NIM: 15520009

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

Ibuku tercinta dan Bapakku tersayang,

Sukraiya dan Sudahrmanto

yang senantiasa memberikan doa dan limpahan kasih sayang

yang tak ternilai harganya

Kakakku, Desi Anggraini tersayang

Yang selalu memberikan dukungan dan motivasi

Keluarga besar Bapak Jumari

Yang selalu memberikan dorongan dalam bentuk apapun

Almamaterku UIN Malang

Serta semua pihak yang turut memberikan semangat dan do'a

MOTTO

**“URIP IKU
URUP”**

**“HIDUP ITU
NYALA”**



KATA PENGANTAR

Bismillahirragmanirahim, Alhamdulillah. Segala puji dan syukur terpanjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhna Pencapita segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan seluruh isi alam semesta yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, baik itu secara jasmani maupun rohani. Berkat rahmad dan hidayah-Nya pula, peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tertinggal di Indonesia” dengan baik. Sholawa serta salam tercurah kepada pimpinan Islam yang telah membawa sinar kecemerlangan Islam Baginda Rosul Nabu Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang telah membimbing umat ke arah jalan yang benar.

Tentunya peneliti ini tidak terlepas dari dukungan dan sumbangan pemikiran dari segenap pihak yang peneliti rasakan selama ini atas jasa-jasanya yang diberikan secara tulus ikhlas, baik materi maupun spiritual dalam usaha mencari kesempurnaan dan manfaat dari penelitian skripsi ini, tak lupa peneliti menyampaikan rasa hormat, ungkapan rasa terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, selaku dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak, Ca, selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Ibu Sri Andriani, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran membimbing serta memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat tersusun.
5. Para dosen dan staf Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk bisa meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
6. Ayah, Ibu dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa, demi kelancaran hingga nanti tercapai cita-cita peneliti.
7. Untuk para sahabat yang selalu memberi dukungan dan semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca khususnya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab).....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Batasan Masalah	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis.....	16
2.2.1 Akuntansi Sektor Publik	16
2.2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	16
2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	18
2.2.3 Kinerja Keuangan Daerah.....	20
2.2.4 Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	22
2.2.5 Rasio Keuangan Daerah	23
2.6 Belanja Modal	29
2.7 Perspektif Islam.....	31
2.8 Kerangka Konseptual	34

2.9 Hipotesis Penelitian	35
2.9.1 Rasio Efektivitas	35
2.9.2 Rasio Efisiensi	35
2.9.3 Rasio Kemandirian	35
2.9.4 Rasio Pertumbuhan.....	36
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	37
3.3 Teknik Pengambilan Sampel	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	39
3.5.1 Rasio Efektivitas	39
3.5.2 Rasio Efisiensi.....	39
3.5.3 Rasio Kemandirian	39
3.5.4 Rasio Pertumbuhan.....	40
3.6 Metode Analisis Data	40
3.6.1. Teknik Analisis Regresi Linear Berganda.....	40
3.6.2 Pengujian Hipotesis.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	45
4.1.2 Deskripsi Variabel.....	46
4.1.3 Rasio Efektivitas	46
4.1.4 Rasio Efisiensi.....	63
4.1.5 Rasio Kemandirian	71
4.1.6 Rasio Pertumbuhan.....	78
4.1.7 Uji Asumsi Klasik	85
4.1.8 Uji Regresi Linier Berganda	89
4.1.9 Pengujian Hipotesis.....	91
4.2 Pembahasan.....	95
4.2.1 Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Belanja Modal	95
4.2.2 Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Belanja Modal.....	96
4.2.3 Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Belanja Modal	97

4.2.4 Pengaruh Rasio Pertumbuhan terhadap Belanja Modal	99
4.2.5 Pengaruh Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan terhadap Belanja Modal	100
BAB V PENUTUP	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2.3 Kriteria Efektivitas.....	25
Tabel 2.4 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah.....	27
Tabel 4.1 Rasio Efektivitas.....	47
Tabel 4.2 Rasio Efisiensi.....	63
Tabel 4.3 Rasio Kemandirian.....	70
Tabel 4.4 Rasio Pertumbuhan.....	75
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas.....	81
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi.....	82
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi.....	84
Tabel 4.8 Hasil Uji T.....	85
Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan.....	88
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	34
Gambar 4.1 Diagram Efektivitas Daerah Tertinggal.....	55
Gambar 4.2 Diagram Efisiensi Daerah Tertinggal.....	71
Gambar 4.3 Diagram Kemandirian Daerah Tertinggal.....	79
Gambar 4.4 Diagram Pertumbuhan Daerah Tertinggal.....	85
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas P-Plot.....	89
Gambar 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	92



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Tertinggal
- Lampiran 2 Data Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Tertinggal
- Lampiran 3 Data Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Tertinggal
- Lampiran 4 Data Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Tertinggal
- Lampiran 5 Data Belanja Modal
- Lampiran 6 Data Hasil Uji SPSS
- Lampiran 7 Bukti Konsultasi
- Lampiran 8 Biodata Peneliti
- Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



ABSTRAK

Setiawan, Feri Prastyo. 2019. SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Tertinggal di Indonesia”

Pembimbing : Sri Andriani, S.E., M.Si.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan

Penelitian ini berujuan untuk menguji apakah rasio keuangan pemerintah daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Tertinggal di Indonesia. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan dan variabel dependen-nya adalah belanja modal.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif, dengan jumlah sampel 122 setiap tahunnya pada daerah tertinggal di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada periode 2015-2017. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan pokok bahasan yang dikutip dari buku, perpustakaan, artikel, dan sumber-sumber lain yang menambah kecuratan data. Metode yang digunakan adalah metode statistik dengan perangkat SPSS (*Statistical Package for the Social*) 25.00.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal, tingkat efisiensi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, tingkat kemandirian berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal, dan pada tingkat rasio pertumbuhan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap belanja modal. Hasil dalam penelitian ini tetap memerlukan konfirmasi lebih lanjut melalui penelitian selanjutnya. Hal ini diperlukan karena keterbatasan yang ada dalam penelitian ini.

Kata kunci : Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Perumbuhan, Belanja Modal

ABSTRACT

Setiawan, Feri Prastyo. 2019. THESIS. Title: “Effect of financial ratios on capital expenditure on disadvantaged local governments in Indonesia”

Advisor : Sri Andriani, S.E., M.Si.

Keywords : Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Self-reliance Ratio, Growth Rate, Capital Expenditure

The research was threaded to test whether the financial ratios of local governments have a significant influence on local government capital expenditure on disadvantaged local governments in Indonesia. The independent variables used in this study are the effectiveness ratio, the efficiency ratio, the self-reliance ratio, the growth ratio and the dependent variable is capital expenditure.

The research method in this thesis is to use quantitative method, with 122 samples annually in lagging areas in Indonesia. The study was conducted in the period 2015-2017. The type of data used is secondary data. Data obtained from the official website of the Directorate General of Financial Balance. In collecting data using documentation techniques collect materials and data related to the subjects quoted from books, libraries, articles, and other sources that add that data. The method used is a statistical method with the SPSS (Statistical Package for the Social) device 25.00.

The results of the analysis showed that the effectiveness rate of significant positive effect on capital expenditure, the level of efficiency significantly affects the capital expenditure, the self-reliance rate of significant negative on capital expenditure, and Rate of growth affects significantly and positively towards capital expenditure. The results in this study still require further confirmation through subsequent studies. This is necessary because of the limitations that exist in this study.

Keywords: Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Self-reliance Ratio, Growth Rate, Capital Expenditure

مستخلص البحث

ستيوان، فري براستيو. ٢٠١٩، اطروحه. عنوان: " تحليل النسبة المالية لتقييم الأداء المالي للحكومات المحلية المحرومة في اندونيسيا"

المشرف : سري اندرياني

الكلمات الرئيسية : نسبة الفعالية ، نسبة الكفاءة ، نسبة الاعتماد علي الذات ، معدل النمو ، النفقات الراسماليه

وكانت البحوث مترابطة لاختبار ما إذا كانت النسب المالية للحكومات المحلية لها تأثير كبير علي الانفاق الراسمالي للحكومات المحلية علي الحكومات المحلية المحرومة في اندونيسيا. والمتغيرات المستقلة المستخدمة في هذه الدراسة هي نسبة الفعالية ، ونسبه الكفاءة ، ونسبه الاعتماد علي الذات ، ونسبه النمو ، والمتغير التابع هو النفقات الراسماليه.

سلوب البحث في هذه الاطروحه هو استخدام الطريقة الكمية ، مع ١٢٢ عينات سنويا في المناطق المتخلفة في اندونيسيا. وقد أجريت الدراسة في الفترة ٢٠١٥-٢٠١٧. نوع البيانات المستخدمة هو بيانات ثانويه. البيانات التي تم الحصول عليها من الموقع الرسمي للمديرية العامة للتوازن المالي. في جمع البيانات باستخدام تقنيات التوثيق جمع المواد والبيانات المتعلقة بالمواضيع المقتبسة من الكتب والمكتبات والمقالات وغيرها من المصادر التي تضيف تلك البيانات. الأسلوب المستخدم هو أسلوب إحصائي مع الجهاز SPSS (الحزمة الاحصائية للجهاز الاجتماعي) ٢٥,٠٠.

وأظهرت نتائج التحليل ان معدل فعالية الأثر الإيجابي الكبير علي النفقات الراسماليه ، ومستوي الكفاءة يؤثر تأثيرا كبيرا علي النفقات الراسماليه ، ومعدل الاعتماد علي الذات السلبي الكبير علي النفقات الراسماليه ، ويؤثر معدل النمو تأثيرا كبيرا وإيجابيا علي النفقات الراسماليه. ولا تزال نتائج هذه الدراسة تتطلب مزيدا من التأكيد من خلال الدراسات اللاحقة. وهذا أمر ضروري بسبب القيود الموجودة في هذه الدراسة.

الكلمات الرئيسية: نسبة الفعالية ، نسبة الكفاءة ، نسبة الاعتماد علي الذات ، معدل النمو ، النفقات الراسماليه

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini di Indonesia, rakyat berharap pada pemerintah agar dapat terselenggaranya *good governance*. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam pelaksanaan penyediaan pelayanan publik disebut *governance*, sedangkan prakteknya terbaiknya disebut *good governance*. Agar *good governance* menjadi kenyataan dan berhasil, dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang ada, pemerintah, dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi dan integritas yang baik, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi. Perkembangan teknologi dan ekonomi merupakan acuan dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga terciptanya pemerintahan yang bersifat *good governance*.

Good governance menghendaki pemerintah dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipasi, dan bertanggung jawab, serta sumber daya pemerintah daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat dan negara (Nazsir : 2003).

Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, mengingat karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang memadai untuk memberikan pelayanan dalam pembangunan dan keuangan, inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan

daerah dalam mengatur dan mengurus daerah kekuasaannya sendiri. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah.

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang berbentuk unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Halim : 2012).

Pada era sekarang ini akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Menurut Bastian (2010) Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, sudah tertulis bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia : 2014). Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah ini bertujuan untuk menentukan seberapa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai

dengan kebutuhan dan potensi di daerah yang bersangkutan (Zuhri, 2016). Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Maksud dan tujuan diberlakukannya otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan. Untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan adanya manajemen keuangan daerah yang mampu mengendalikan kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan control terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena APBD merupakan pedoman dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah.

Pada perkembangan sektor publik yang pesat seiring diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia ini masih terdapat daerah yang termasuk memiliki

kemampuan keuangan yang rendah atau bisa disebut daerah tertinggal. Daerah tertinggal merupakan daerah yang wilayahnya serta masyarakatnya masih kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Menurut Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Daerah Tertinggal tercatat 122 Daerah di Indonesia yang menyandang kategori daerah tertinggal. Daerah tersebut dikatakan tertinggal karena perekonomian masyarakatnya, sumber daya manusianya (SDM), sarana dan prasarananya, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerahnya masih sangat kurang dan perkembangannya yang lambat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pembangunan daerah yang terencana agar daerah yang tertinggal bisa setara dengan daerah yang sudah maju lebih dahulu, agar tidak ada kesenjangan antar wilayah yang ada di Indonesia (Ditjen PDT : 2016).

Indonesia terbagi dalam 35 Provinsi kemudian dibagi lagi menjadi Kabupaten/Kota berjumlah 514, namun dari sekian banyaknya Kabupaten/Kota yang tersebar masih terdapat 122 Daerah Kabupaten/Kota yang tertinggal. Lebih dari 23% Kabupaten/Kota di Indonesia dinyatakan sebagai daerah tertinggal, jumlah yang cukup banyak untuk sebuah negara yang kaya akan sumber dayanya ini. Daerah tertinggal ini didominasi oleh Indonesia Bagian Timur, di mana daerah tertinggal mencapai 103 Kabupaten atau 84,42% dari total 122 Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori tertinggal, sedangkan 19 kabupaten lainnya berada di Indonesia Bagian Barat. Dalam penanggulangan daerah tertinggal pemerintah sudah memiliki program dalam membangun infrastruktur diantaranya peningkatan anggaran dan langkah percepatan. Dilansir oleh Detiknews (2018) Dalam nawacita Presiden Joko Widodo tertulis “Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran

dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, realisasinya : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan tentang pemberian Dana Desa. Dikutip dari situs Kementerian Keuangan, pada 2018 anggaran Dana Desa mencapai Rp 60 triliun untuk 74.958 desa di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Kemenkeu, sejauh ini Dana Desa telah membuahkan 199.100 kilometer jalan desa, 1.599 km jembatan, 325.599 unit sambungan air bersih, 4.656 unit embung desa, 48.271 unit posyandu, 19.794 unit pasar desa, 43.723 unit PAUD desa, 342.137 unit sumur dan MCK, serta 299.345 unit drainase dan irigasi untuk periode 2015-2017. Kemenkeu mencatat Dana Desa juga telah mengurangi ketimpangan di desa dari 0,34 pada 2014 menjadi 0,32 pada 2017.

Sejak awal 2018 juga ada Program Padat Karya Tunai untuk pedesaan. Sebagai permulaan, target program ini adalah 1.000 desa dari 100 kabupaten yang memiliki ketimpangan sosial tinggi. Anggaran program ini diambil dari Dana Desa. Untuk 2018, anggaran Padat Karya Tunai mencapai Rp 18 triliun untuk seluruh desa di Indonesia. Dari kutipan tersebut dinilai bahwa Daerah Tertinggal di Indonesia sudah cukup mendapat perhatian, dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah tertinggal di Indonesia sudah cukup merata.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2018) mengatakan Sektor publik sering kali dinilai sebagai sarang dari inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu mengalami kerugian. Citra yang terburuk masih melekat pada sebagian pelayanan publik di Indonesia, salah satunya masih kurangnya profesionalisme petugas pada organisasi dalam pelayanan kepada publik. Dari hal tersebut kinerja dari sektor publik sering sekali diragukan

kebenarannya oleh masyarakat. Untuk mempertanggung jawabkan dana yang dipercayakan kepada sektor publik pengukuran kinerja harus dilakukan. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah perlu adanya pengukuran atas kinerja keuangan dalam pemerintah daerah, dengan cara membandingkan APBD periode sekarang dengan APBD periode yang sudah berlalu, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan atas kinerja keuangan yang terjadi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan salah satu Teknik yang dapat digunakan dalam menganalisis keuangan pemerintah yaitu menggunakan Analisis Rasio Keuangan dikarenakan menurut penulis metode ini lebih relevan jika digunakan untuk menilai kinerja dibandingkan dengan metode yang lain. Pengukuran Rasio Keuangan terhadap Belanja Modal dilakukan dengan cara menghitung Rasio Keuangan diantaranya dengan menghitung Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, dan Rasio Pertumbuhan. Dari masing-masing perhitungan dilakukan evaluasi dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Untuk Rasio Efektivitas, diukur dengan cara membandingkan jumlah realisasi pendapatan daerah dengan anggaran pendapatan daerah, sehingga suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila jumlah realisasi pendapatan lebih tinggi daripada anggaran yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah di Indonesia masih banyak mendapatkan keraguan dari berbagai kalangan masyarakat dengan berfikir Pemerintah sebagai sarang dari inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu mengalami kerugian. Maka dari itu perlu adanya pengukuran kinerja keuangan

Pemerintah Daerah di Indonesia, dan diharapkan untuk selalu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Penelitian yang dilakukan Indarto (2016) menrangkan bahwa rasio efektivitas pemerintah daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Sedangkan untuk Rasio Efisiensi, diukur dengan cara membandingkan total pengeluaran daerah dengan total pendapatan daerah. Suatu daerah dikatakan efisien jika pengeluaran daerah kecil dan total pendapatannya tinggi. Penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011) bahwa Rasio Efisien berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini memunculkan pertanyaan daerah yang dikatakan efisien secara keuangan akan mempengaruhi jumlah belanja modal, padahal efisiensi tidak memerlukan jumlah pengeluaran yang besar atau dalam hal ini disebut belanja.

Berdasarkan uraian diatas dan mengingat pentingnya pengukuran kinerja pemerintah untuk membangun pemerintah yang memiliki kinerja yang baik. Maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Tertinggal Di Indonesia ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk meningkat pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal diperlukan pengetahuan mengenai komponen-komponen apa saja yang berpengaruh positif terhadap jumlah alokasi untuk belanja modal.

Dari sektor kinerja instansi, dapat berpeluang untuk mempunyai pengaruh terhadap belanja. Dari sektor pendapatan, yang dimungkinkan berpengaruh

terhadap jumlah belanja modal. Dengan demikian, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah Rasio Efektifitas dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap Belanja Modal?
2. Apakah Rasio Efisiensi dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Rasio Kemandirian dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap Belanja Modal?
4. Apakah Rasio Pertumbuhan dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap Belanja Modal?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh signifikan Rasio Efektifitas terhadap Belanja Modal
2. Untuk menguji pengaruh signifikan Rasio Efisiensi terhadap Belanja Modal
3. Untuk menguji pengaruh signifikan Rasio Kemandirian terhadap Belanja Modal
4. Untuk menguji pengaruh signifikan Rasio Perumbuhan terhadap Belanja Modal

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah untuk memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah.

Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan dalam pemerintahan serta menambah kemampuan untuk menganalisis tentang kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode yang telah ditentukan.

2. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan suatu masukan di dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melaksanakan penelitian yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis pada Pemerintah Kabupaten/Kota tertinggal menurut Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 menggunakan Rasio Keuangan dengan mengukur Rasio Efektifitas, Rasio

Efisiensi, Rasio Kemandirian, dan Rasio Pertumbuhan berdasarkan APBD tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Julius Tamawiwiy, Jullie J Sondakh, Jessy D.L Warongan (2016)	Pengaruh Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik	Regresi Linier Berganda	<p>Hasil Pengujian hipotesis 1 bahwa Pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.</p> <p>Hasil Pengujian hipotesis 2 bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal</p> <p>Hasil Pengujian hipotesis 3 membuktikan bahwa Efektivitas keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal</p> <p>Hasil Pengujian hipotesis 4 membuktikan bahwa Efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal</p>
2.	Novianto Indratno (2016)	Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota	Regresi Linier Berganda	Hasil uji t pada Rasio Kemandirian Daerah diketahui berpengaruh signifikan terhadap alokasi modal,

		di Provinsi Jawa Tengah		<p>Hasil pengujian Rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.</p> <p>Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa Rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.</p> <p>Dari uji t diketahui bahwa rasio Ketergantungan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.</p>
3.	Kadek Martini & A.A.N.B Dwirandra (2015)	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Di Propinsi Bali	Regresi Linier Berganda	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh.</p>
4.	M.Rasulli dan Alfiati Silfi (2014)	Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah (PAD,	Regresi Linier Berganda	<p>Dari uji yang dilakukan diketahui Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal</p>

		dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2012		Kemudian Pada pengujian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan diketahui bahwa PAD dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal
5.	Ardhini (2011)	Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)	Regresi Linier Berganda	<p>Variabel Kemandriain Daerah nilai sig $0,421 > \alpha (0,5)$, hal ini berarti variabel Kemandirian Daerah tidak signifikan terhadap Belanja Modal</p> <p>Variabel efektivitas keuangan daerah nilai sig sebesar $0,037 < \alpha (0,05)$, hal ini berarti Efektivitas Keuangan Daerah signifikan terhadap Belanja Modal</p> <p>Variabel efisiensi keuangan daerah nilai sig sebesar $0,001 < \alpha (0,05)$, hal ini berarti efisiensi keuangan daerah signifikan terhadap Belanja Modal</p> <p>Variabel SiLPA nilai sig $0,016 < \alpha (0,05)$, hal ini berarti SiLPA signifikan terhadap Belanja modal</p> <p>Variabel Dana Alokasi Khusus nilai sig sebesar $0,756 < \alpha (0,05)$,</p>

				hal ini berarti variabel Dana Alokasi Umum tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
--	--	--	--	---

Tabel 2.2

Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Perbedaan	Persamaan
1.	Julius Tamawiwiy, Jullie J Sondakh, Jessy D.L Warongan (2016)	<p>1.Objek penelitian pada penelitian ini adalah Seluruh Pemerintah Daerah Tertinggal di Indonesia, sedangkan dalam penelitian sebelumnya hanya pada daerah Provinsi Sulawesi Utara.</p> <p>2. Terdapat Rasio Desentralisasi Fiskal di penelitian terdahulu sedangkan peneliti tidak.</p> <p>3.Peneliti mencantumkan rasio kemandirian pada penelitian</p>	<p>1. Menggunakan metode regresi linier berganda.</p> <p>2.Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan rasio Pertumbuhan sebagai rasio independen</p> <p>3. Belanja Modal sebagai variabel dependen.</p>
2	Novianto Indratno (2016)	<p>1. Objek penelitian pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah tertinggal di Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu hanya pada provinsi Jawa Tengah.</p> <p>2. Peneliti menggunakan rasio pertumbuhan sedangkan penelitian terdahulu</p>	<p>1. Menggunakan regresi linier berganda.</p> <p>2. Rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian menjadi variabel independen.</p>

		menggunakan rasio ketergantungan daerah.	3. Belanja Modal sebagai variable dependen.
3.	Kadek Martini & A.A.N.B Dwirandra (2015)	1. Objek penelitian pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah tertinggal di Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu hanya pada provinsi Jawa Tengah.	<p>1. Menggunakan regresi linier berganda.</p> <p>2. Rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian menjadi variabel independen.</p> <p>3. Belanja Modal sebagai variable dependen.</p>
4.	M.Rasulli dan Alfiati Silfi (2014)	<p>1. Objek penelitian pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah tertinggal di Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu hanya pada provinsi Riau.</p> <p>2. Pada penelitian terdahulu menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel independen.</p> <p>3. Peneliti menggunakan Rasio Pertumbuhan pada penelitian ini.</p>	<p>1. Menggunakan regresi linier berganda.</p> <p>2. Rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian menjadi variabel independen.</p> <p>3. Belanja Modal sebagai variable dependen.</p>

5.	Ardhini (2011)	<p>1. Objek penelitian pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah tertinggal di Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu hanya pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.</p> <p>2. pada penelitian terdahulu menggunakan SiLPA dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen.</p> <p>3. Peneliti menggunakan Rasio Pertumbuhan pada penelitian ini</p>	<p>1. Menggunakan regresi linier berganda.</p> <p>2. Rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian menjadi variabel independen.</p> <p>3. Belanja Modal sebagai variabel dependen.</p>
----	-------------------	--	--

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut basstian (2010:3) mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.

Halim (2007:252) mengatakan akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan

daeri entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

2.2.1.2 Ruang Lingkup Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi domain pada publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga0lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan, komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Akan tetapi untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta (Mardiasmo, 2009).

2.2.1.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya.

2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.2.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Mahsun (2011:81) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang berisi tentang rincian penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan peraturan daerah dengan masa satu tahun, dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

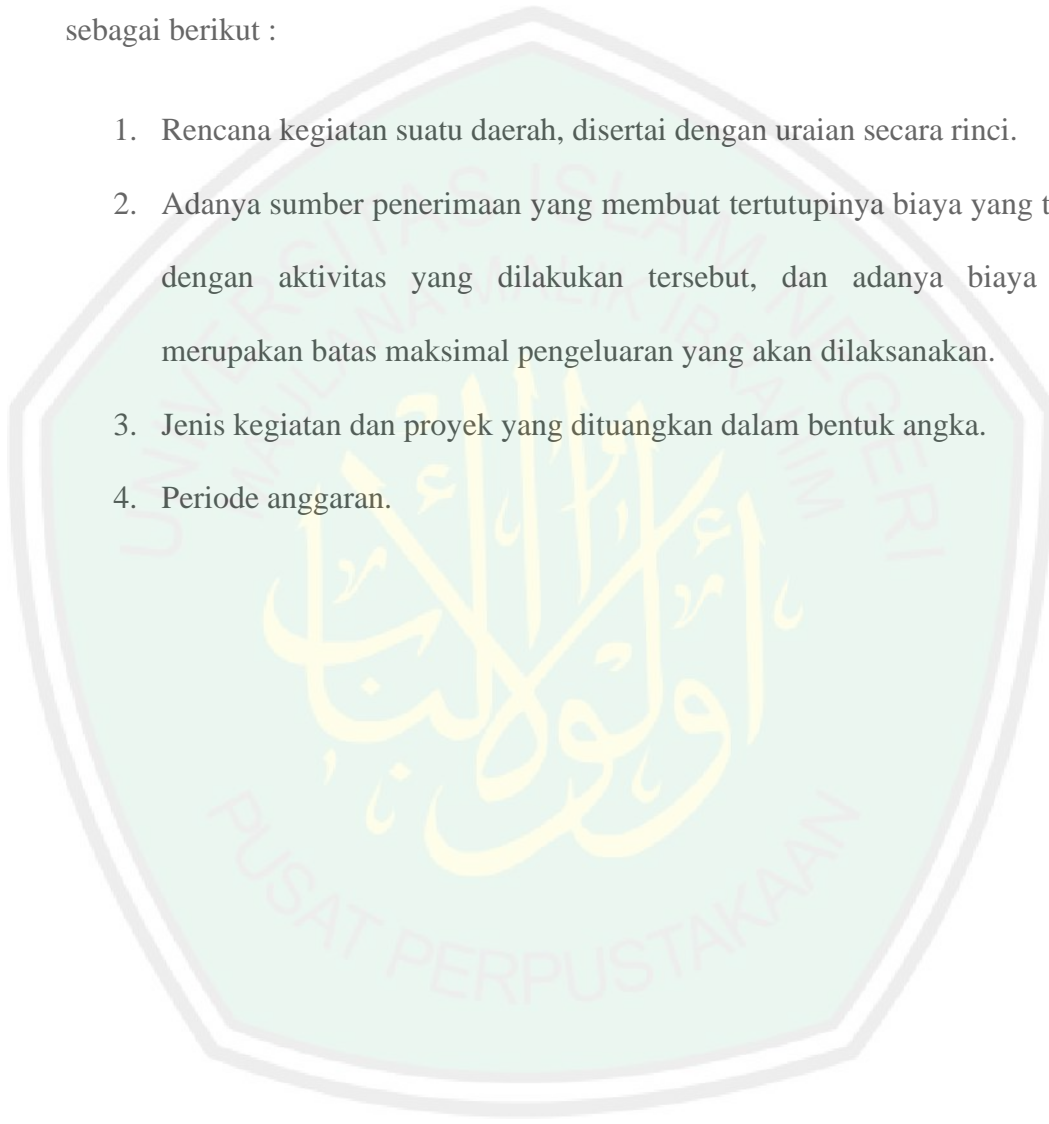
Dalam Permendagri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 1, berisi pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Halim (2012:87) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika bada legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif

(kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan dalam daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur yang ada sebagai berikut :

1. Rencana kegiatan suatu daerah, disertai dengan uraian secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang membuat tertutupnya biaya yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran.



2.2.3 Kinerja Keuangan Daerah

2.2.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahsun (2012:25) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi.

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui seberapa kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

2.2.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Tujuan dilakukannya pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Mardiasmo (2002:12) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.2.3.3 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Keuangan Daerah meliputi :

1. Indikator Masukan (Input)

Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misal :

- a) Jumlah dana yang dibutuhkan
- b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan
- c) Jumlah infrastruktur yang ada
- d) Jumlah waktu yang digunakan

2. Indikator Proses (Process)

Indikator Proses adalah perumusan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misal :

- a) Ketaatan pada peraturan perundangan
- b) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3. Indikator Keluaran (Output)

Indikator Keluaran adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misal :

- a) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
- b) Ketetapan dalam memproduksi barang atau jasa

4. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misal :

- a) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
- b) Produktivitas para karyawan atau pegawai

5. Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misal :

- a) Tingkat kepuasan masyarakat
- b) Tingkat partisipasi masyarakat

6. Indikator Dampak (Impact)

Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misal :

- a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- b) Peningkatan pendapatan masyarakat

2.2.4 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2006:22) Kinerja Anggaran adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dalam organisasi. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat, dan dampak.

Menurut Mulyadi (2007), kinerja yang merupakan keberhasilan personel, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Istilah kinerja sering digunakan

untuk menyebut tingkat keberhasilan suatu individu maupun kelompok individu tersebut dan mempunyai kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Kriteria tersebut berupa tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan, kinerja seseorang atau suatu organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengukur suatu kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Halim, 2012).

2.2.5 Rasio Keuangan Daerah

Menurut Mahsun (2011: 135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat di dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik belum ada kepastian dalam kesepakatan secara resmi mengenai kaidah tentang pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka untuk mengelola keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu tetap dilaksanakan, meskipun kaidah pada akuntansi dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim 2012:4).

Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan membandingkan hasil dari pencapaian satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kondisi atau

kecendrungan yang terjadi. Perbandingan menggunakan rasio keuangan juga bisa digunakan untuk melihat bagaimana perbedaan daerah tertentu dengan rasio keuangan dari daerah lain yang terdekat ataupun daerah yang memiliki potensi yang relatif sama dan dapat melihat bagaimana posisi rasio daerah tersebut terhadap pemerintah daerah yang lainnya.

Menurut Halim (2012: 4) adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara lain :

1. Pihak eksekutif, digunakan sebagai landasan dalam menyusun APBD periode berikutnya.
2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan untuk menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Masyarakat dan kreditor, sebagai pihak yang akan ikut andil alih dalam kepemilikan saham pemerintah daerah, bersedia untuk memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

Dalam mengukur Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan merupakan salah satu cara yang dapat untuk menjadi alat ukur. Untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah menggunakan Rasio Keuangan digunakan beberapa rasio, antara lain : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

2.2.5.1 Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2007) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan

yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

Kriteria Efektivitas PAD

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
91% - 100%	Efektif
81% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang Dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Susanto, 2019

2.2.5.2 Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Rasio Efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Mardiasmo : 2013). Rumus untuk menghitung rasio efisiensi keuangan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

Kriteria Efisiensi Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
91% - 100%	Kurang Efisien
81% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Susanto, 2019

2.2.5.3 Rasio Kemandirian

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat dan eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pada pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Demikian sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2.4

Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50 % - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Herry, 2014

Halim (2012) mengemukakan mengenai pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai berikut :

1. Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.2.5.4 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran kinerjanya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi 2010:138). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode selanjutnya. Jika terjadi

pertumbuhan yang negatif (menurun), maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.

Manfaat dari Rasio Pertumbuhan ini adalah untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja positif atau negatif. Berikut merupakan rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan :

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}$$

Keterangan :

r = Pertumbuhan

Tahun t = Tahun Tertentu

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja modal yang semakin tinggi yang diikuti oleh rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

2.6 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran dalam memperoleh aset tetap yang manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal perlu dilakukan oleh perusahaan di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Belanja

modal merupakan sejumlah pengeluaran dana yang dilakukan oleh manajemen terhadap *property, plan, equipment* (Griner dan Gordon, 1995).

Belanja modal disebut dengan istilah pembelanjaan perusahaan dan didefinisikan sebagai pengalokasian dana untuk diinvestasikan dalam berbagai aset perusahaan (Riyanto, 2001). Definisi belanja modal sebagai suatu pengeluaran dana oleh perusahaan yang diharapkan akan menghasilkan manfaat selama periode waktu lebih dari satu tahun. Definisi ini menyoroti faktor kunci, manfaat dan jangka waktu lebih dari satu tahun (Gitman, 2003). Belanja modal merupakan investasi yang dikeluarkan dengan harapan menghasilkan aliran kas masuk di masa depan.

Belanja modal termasuk jenis belanja langsung dan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Permendagri No. 33 Tahun 2019).

Peningkatan pemerintah Daerah dalam investasi modal (Belanja Modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) dalam publik terhadap pembangunan. Hal ini berarti dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang, yaitu berdampak pada produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun

anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

Belanja modal jenis Pelayanan Publik adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Belanja modal jenis ini terdiri atas belanja tanah, belanja modal, jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal instansi, belanja modal jaringan, belanja modal bangunan gedung kegiatan kemasyarakatan, belanja modal monumen, belanja modal alat-alat angkutan, alat bengkel, alat kesehatan, alat laboratorium, belanja modal untuk buku/perpustakaan, barang kesenian budaya, belanja modal hewan ternak serta tanaman, belanja modal alat keamanan. Belanja modal untuk pelayanan publik disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

2.7 Perspektif Islam

Pada masa Islam awal, keuangan publik yang dipraktikkan memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang komprehensif. Keuangan publik bukan hanya proses keuangan berdasarkan kekuasaan dan wewenang penguasa, melainkan berdasarkan pada petunjuk dari syari'ah dan bertujuan pada kemaslahatan umum. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kebijakan keuangan publik masih sederhana yang dipusatkan di Madinah dengan melakukan penghimpunan pendapatan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat.

Setelah wilayah kekuasaan Islam meluas pada masa Khulafa' al-Rasyidin, khususnya masa Umar bin Khattab, pengelolaan keuangan publik perlu diatur secara sistematis, sebab bukan hanya dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan, melainkan juga untuk kebutuhan masyarakat di wilayah taklukan. Pada periode ini pula, bayt al-mal menunjukkan peran yang signifikan bagi penyelenggaraan pemerintahan juga kemakmuran masyarakat.

Dalam bentuk pengelolaannya, melalui baitul mal keuangan publik didistribusikan untuk kelompok masyarakat lemah dan marginal sehingga tercipta keamanan masyarakat, kesejahteraan umum, dan pendistribusian harta secara adil (Q.S. al-Hashr, 59:7)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Yang artinya “Harta rampasan (fai) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Jika demikian, sebagaimana diungkapkan Abu Yusuf, negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat melalui kebijakalkebijakannya yang konstruktif. Untuk melancarkan peran negara tersebut, diperlukan departemen keuangan yang tetap dan regular (al-diwan). Departemen ini penting, seperti dinyatakan al-Mawardi, dalam bentuk pendirian kantor keuangan yang tetap ketika banyak pendapatan ditransfer ke pusat dari berbagai wilayah taklukan.

Segara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Institusi inipun wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik. Layanan publik menjadi kewajiban sosial dan harus berstandar pada kepentingan umum. Pada sisi lain, menurut al-Mawardi, jika terjadi defisit anggaran dalam memenuhi kepentingan publik, maka dapat ditetapkan pajak baru atau melakukan pinjaman kepada publik. Kebijakan ini pernah pula dilakukan Nabi untuk membiayai kepentingan perang dan kebutuhan publik lainnya.

Demikianlah keuangan publik telah dipraktekkan sejak masa awal Islam yang berkesinambungan dengan pola-pola pengelolaan, pendistribusian dan kelengkapan administrasi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Hal ini secara filosofis tertuang dalam al-Qur'an dan hadits yang memberikan rumusan tentang prinsip-prinsip dan cara kerja keuangan, seperti dalam ayat tentang zakat (Q.S. Yunus, 10:103)

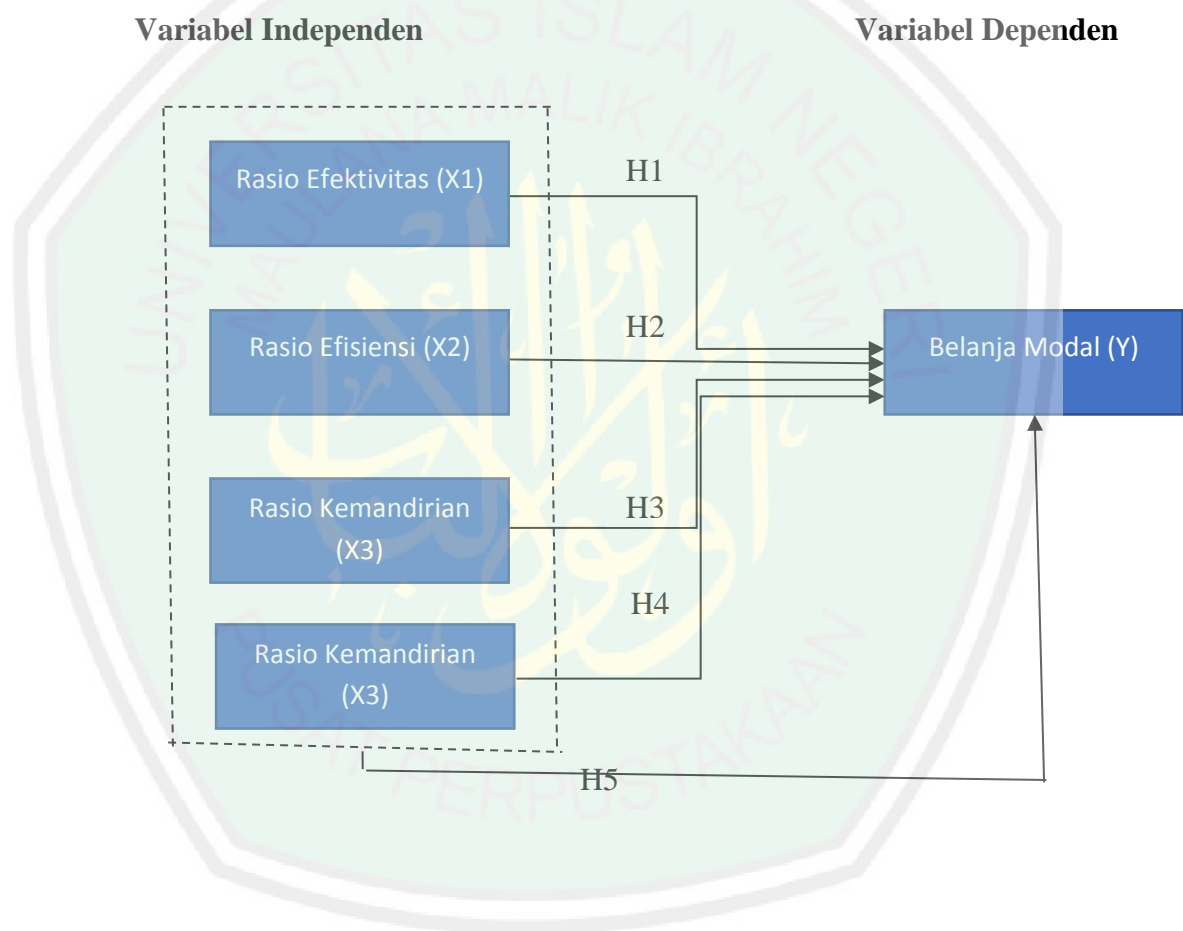
ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya “Kemudian Kami selamatkan rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman, demikianlah menjadi kewajiban Kami menyelamatkan orang yang beriman”.

Meskipun demikian, rumusan-rumusan yang dihasilkan oleh fuqaha' dalam hukum Islam dan praktik keuangan yang berkembang selama periode sejarah, khususnya pada masa al-Mawardi, memberikan kelengkapan dan karakteristik terhadap praktik keuangan publik.

2.8 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2007) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Hipotesis penelitian ini adalah :

H1 : Rasio Efektivitas diduga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

2.9.2 Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Hipotesis penelitian ini adalah:

H2 : Rasio Efisiensi diduga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

2.9.3 Rasio Kemandirian

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah

terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pada pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Hipotesis penelitian ini adalah :

H3 : Rasio Kemandirian diduga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

2.9.4 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran kinerjanya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi 2010:138). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode selanjutnya. Jika terjadi pertumbuhan yang negatif (menurun), maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H4 : Rasio Pertumbuhan diduga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

H5 : Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan diduga berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut sugiyono (2017: 13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2017: 29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan populasi dan sampel Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden No.103 Tahun

2015. Tercatat sebanyak 122 kabupaten tertinggal yang akan diambil dengan teknik purposive sampling dengan pertimbangan tertentu..

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa data Realisasi APBD dan APBD seluruh Indonesia tahun 2015-2017, Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh, yaitu teknik penyampelan bila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data :

1. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal diperoleh dari orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini sumber data sekunder didapatkan dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seluruh Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia.

3.4 Teknik Pengupulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang terdapat pada instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi (Sugiyono 2017, 240). Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari dokumen yang sudah ada, data yang digunakan adalah APBD tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang terdapat pada website resmi Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel bebas yaitu, Rasio Efektivitas (X1), Rasio Efisiensi (X2), Rasio Kemandirian (X3), Rasio Pertumbuhan (X4), dan variabel terikat yaitu adalah Belanja Modal (Y).

3.5.1 Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, Berikut merupakan formula yang digunakan untuk menganalisa Rasio Efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

3.5.2 Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, Berikut merupakan formula yang digunakan untuk menganalisa Rasio Efisiensi :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.5.3 Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat dan eksternal. Berikut merupakan formula yang digunakan untuk menganalisa Rasio Kemandirian :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3.5.4 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran kinerjanya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif, Berikut merupakan formula yang digunakan untuk menganalisa Rasio Pertumbuhan :

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}$$

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu cara pengolahan data secara teoritis dan logis, Alat analisis statistik yang dipergunakan adalah analisis regresi berganda (*Multiple Regression*) dengan program komputer SPSS (*Statistical package for the social sciences*)25.00 for windows. Software ini akan diakui sebagai alat uji asumsi klasik maupun uji hipotesis data kuantitatif. Model regresi berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh variable bebas terhadap variable terkait.

Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah dengan teknik analisis data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. terdapat dua teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu teknik analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis.

3.6.1. Teknik Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan hutang dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen perusahaan,

dimana terdapat satu variabel terikat dan empat variabel bebas. Untuk rumus regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

X1 = Rasio Efektivitas

X2 = Rasio Efisiensi

X3 = Rasio Kemandirian

X4 = Rasio Pertumbuhan

a = konstanta

b = koefisien regresi variabel bebas

e = *standart error*

Salah satu syarat dalam menggunakan model regresi linear berganda adalah terpenuhinya uji asumsi klasik yang meliputi normalitas data, multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

3.6.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut berdistribusi secara normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal (Santoso & Ashari, 2005). Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan Normal P-Plot. Pada Normal P-Plot prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

3.6.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel bebas. apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas maka dapat disimpulkan mempunyai model regresi yang baik, syarat ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari kondisi berikut ini:

1. Multikolinieritas terjadi bila *VIF*(*varian inflation factor*) lebih besar dari 10
2. Multikolinieritas terjadi bila *tolerance* lebih kecil dari 0,1

3.6.1.3 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan menguji apakah terdapat korelasi kesalahan antara periode t dengan periode $t-1$ sebelumnya, Apabila observasi yang berurutan saling berkaitan maka terjadi autokorelasi. Pengujian dapat dilakukan dengan uji Run Test.

Pengambilan keputusan autokorelasi :

H_0 : Residual random (acak)

H_a : Residual tidak random

Pengambilan keputusan statistik uji Run Test adalah (Ghozali,2011):

1. Jika nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* kurang dari 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti data residual terjadi tidak random atau sistematis
2. Jika nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* lebih dari 0.05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti data residual random atau acak

3.6.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya Ghozali(2011). heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihat pola tertentu pada grafik

scatterplot apabila titik-titik yang menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Untuk menguji benar tidaknya hipotesa nol (H_0) digunakan suatu pendekatan pengujian statistik yang disebut dengan uji signifikansi. Keputusan untuk menerima atau menolak H_0 Dibuat atas dasar nilai statistik (uji t dan uji F) yang diperoleh dari hasil hitungan. Kemudian dibandingkan dengan nilai tabel pada derajat bebas tertentu.

3.6.2.1 Uji Regresi secara parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh parsial variabel bebas yaitu kepemilikan manajerial (X_1), kebijakan hutang (X_2), ukuran perusahaan (X_3) terhadap variabel terikat (dependen) yaitu kebijakan dividen (Y). uji ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dasar pengambilan keputusan uji t dapat dilakukan jika:

- Tingkat signifikansi $\leq 5\%$ berarti H_0 ditolak H_a diterima
- Tingkat signifikansi $\geq 5\%$ berarti H_0 diterima H_a ditolak

3.6.2.2 Uji Regresi secara keseluruhan (uji F)

Uji F dimaksudkan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel variabel bebas yaitu kepemilikan manajerial (X_1), kebijakan hutang (X_2), ukuran perusahaan (X_3) terhadap variabel terikat kebijakan dividen (Y). uji ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Dasar pengambilan keputusan uji t dapat dilakukan jika:

- Tingkat signifikansi $\leq 5\%$ berarti H_0 ditolak H_a diterima
- Tingkat signifikansi $\geq 5\%$ berarti H_0 diterima H_a ditolak

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan program computer SPSS (*statistical package for social sciences*) 25.00 for windows. *Software* ini akan dipakai sebagai alat uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

3.6.2.3 Uji Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah suatu alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013:97). Nilai koefisien determinasi antara 0 dan $1 \leq (R^2) \leq 1$. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa keterbatasan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti menjelaskan kemampuan memberikan informasi hampir semua informasi dari variabel independen terhadap variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Indonesia terletak di antara Benua Australia dan Benua Asia, dan berada diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis Indonesia terletak di 6° LU (Lintang Utara) - 11° LS (Lintang Selatan) dan 95° BT (Bujur Timur) - 141° BT (Bujur Timur), oleh sebab itu Indonesia memiliki 3 pembagian waktu yaitu, Barat, Tengah, dan Timur. Indonesia memiliki 34 Provinsi dan lebih dari 500 Kabupaten/Kota, dimana 122 Kabupaten/Kota termasuk ke dalam daerah tertinggal sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayahnya serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Dalam Peraturan tersebut juga disebutkan bahwa daerah tersebut dikatakan tertinggal berdasarkan kriteria : a) Perekonomian masyarakat, b) sumber daya manusianya, c) sarana dan prasarana, d) kemampuan keuangan daerah, e) aksesibilitas da, f) karakteristik daerah.

4.1.2 Deskripsi Variabel

Deskripsi *variable* menyajikan deskripsi untuk masing-masing *variable* berdasarkan data yang diolah secara deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik empiris dari masing-masing *variable* yang merupakan interpretasi terhadap hasil analisis *variable* secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan mengambil data dari Realisasi APBD dan APBD. Dalam deskripsi data akan diuraikan masing-masing *variable* yang diteliti, yaitu *variable* bebas yang terdiri dari Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, serta *variable* terikat Belanja Modal pada objek yang diteliti.

4.1.3 Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan dampak dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kinerja Keuangan pemerintah daerah tertinggal dikatakan baik apabila persentase dari rasio yang didapatkan lebih dari 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik pula kinerja Pemerintah Daerah tertinggal. Berikut hasil dari perhitungan rasio efektivitas di daerah tertinggal :

Tabel 4.1
Rasio Efektivitas
Pemerintah Daerah Tertinggal Tahun 2015-2017

No	Provinsi	Kabupaten	Rasio Efektivitas			Rata-Rata	Kriteria
			2015	2016	2017		
1	Aceh	Aceh Singkil	122%	92%	102%	106%	Sangat Efektif
2	Sumatera Utara	Nias	123%	97%	106%	109%	Sangat Efektif
3	Sumatera Utara	Nias Selatan	104%	92%	97%	98%	Efektif
4	Sumatera Utara	Nias Utara	112%	89%	96%	99%	Efektif
5	Sumatera Utara	Nias Barat	106%	89%	104%	100%	Efektif
6	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	107%	99%	100%	102%	Sangat Efektif
7	Sumatera Barat	Solok Selatan	109%	94%	102%	102%	Sangat Efektif
8	Sumatera Barat	Pasaman Barat	103%	96%	102%	100%	Sangat Efektif
9	Sumatera Selatan	Musi Rawas	97%	96%	107%	100%	Efektif
10	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	88%	106%	101%	98%	Efektif
11	Bengkulu	Seluma	110%	91%	101%	100%	Sangat Efektif
12	Lampung	Lampung Barat	108%	97%	104%	103%	Sangat Efektif
13	Lampung	Pesisir Barat	101%	95%	101%	99%	Efektif
14	Jawa Timur	Bondowoso	114%	103%	96%	104%	Sangat Efektif
15	Jawa Timur	Situbondo	104%	99%	102%	102%	Sangat Efektif
16	Jawa Timur	Bangkalan	111%	90%	108%	103%	Sangat Efektif
17	Jawa Timur	Sampang	127%	100%	105%	111%	Sangat Efektif
18	Banten	Pandeglang	108%	94%	105%	102%	Sangat Efektif
19	Banten	Lebak	109%	103%	112%	108%	Sangat Efektif
20	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	104%	94%	106%	101%	Sangat Efektif
21	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	106%	104%	105%	105%	Sangat Efektif
22	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	100%	94%	107%	100%	Sangat Efektif
23	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	104%	100%	105%	103%	Sangat Efektif
24	Nusa Tenggara Barat	Dompu	104%	97%	106%	102%	Sangat Efektif
25	Nusa Tenggara Barat	Bima	103%	100%	103%	102%	Sangat Efektif
26	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	96%	144%	115%	118%	Sangat Efektif

Tabel 4.1
Rasio Efektivitas
Pemerintah Daerah Tertinggal Tahun 2015-2017

No	Provinsi	Kabupaten	Rasio Efektivitas			Rata-Rata	Kriteria
			2015	2016	2017		
27	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	107%	105%	111%	107%	Sangat Efektif
28	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	106%	102%	105%	104%	Sangat Efektif
29	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	105%	96%	97%	99%	Efektif
30	Nusa Tenggara Timur	Kupang	106%	93%	83%	94%	Efektif
31	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	107%	92%	106%	102%	Sangat Efektif
32	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	107%	95%	103%	102%	Sangat Efektif
33	Nusa Tenggara Timur	Belu	103%	93%	106%	101%	Sangat Efektif
34	Nusa Tenggara Timur	Alor	102%	92%	105%	100%	Efektif
35	Nusa Tenggara Timur	Lembata	101%	92%	101%	98%	Efektif
36	Nusa Tenggara Timur	Ende	107%	92%	99%	100%	Efektif
37	Nusa Tenggara Timur	Manggarai	116%	96%	99%	104%	Sangat Efektif
38	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	106%	97%	103%	102%	Sangat Efektif
39	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	107%	103%	98%	102%	Sangat Efektif
40	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	109%	96%	108%	104%	Sangat Efektif
41	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	112%	96%	100%	103%	Sangat Efektif
42	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	110%	95%	107%	104%	Sangat Efektif
43	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	109%	100%	101%	103%	Sangat Efektif
44	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	103%	95%	85%	94%	efektif
45	Nusa Tenggara Timur	Malaka	103%	87%	109%	100%	efektif
46	Kalimantan Barat	Sambas	109%	97%	105%	104%	Sangat Efektif
47	Kalimantan Barat	Bengkayang	122%	102%	103%	109%	Sangat Efektif
48	Kalimantan Barat	Landak	124%	108%	103%	112%	Sangat Efektif
49	Kalimantan Barat	Ketapang	108%	99%	99%	102%	Sangat Efektif
50	Kalimantan Barat	Sintang	118%	98%	109%	109%	Sangat Efektif
51	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	114%	103%	104%	107%	Sangat Efektif
52	Kalimantan Barat	Melawi	97%	96%	99%	97%	Efektif
53	Kalimantan Barat	Kayong Utara	102%	95%	102%	100%	Efektif
54	Kalimantan Tengah	Seruyan	103%	96%	109%	103%	Sangat Efektif
55	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	117%	96%	118%	110%	Sangat Efektif
56	Kalimantan Utara	Nunukan	120%	101%	92%	105%	Sangat Efektif
57	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	67%	78%	83%	76%	Kurang Efektif
58	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	102%	94%	105%	100%	Sangat Efektif
59	Sulawesi Tengah	Donggala	116%	102%	101%	107%	Sangat Efektif
60	Sulawesi Tengah	Toli-Toli	109%	94%	105%	103%	Sangat Efektif

Tabel 4.1
Rasio Efektivitas
Pemerintah Daerah Tertinggal Tahun 2015-2017

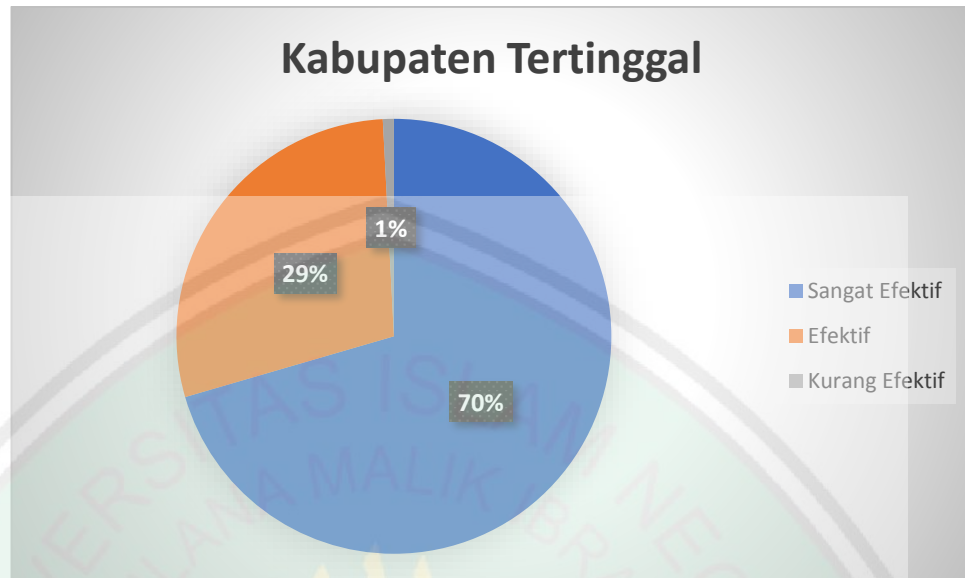
No	Provinsi	Kabupaten	Rasio Efektivitas			Rata-Rata	Kriteria
			2015	2016	2017		
61	Sulawesi Tengah	Buol	123%	92%	103%	106%	Sangat Efektif
62	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	112%	105%	106%	108%	Sangat Efektif
63	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	120%	101%	102%	108%	Sangat Efektif
64	Sulawesi Tengah	Sigi	113%	106%	103%	107%	Sangat Efektif
65	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	106%	95%	106%	102%	Sangat Efektif
66	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	103%	101%	99%	101%	Sangat Efektif
67	Sulawesi Selatan	Jeneponto	114%	100%	97%	104%	Sangat Efektif
68	Sulawesi Tenggara	Konawe	106%	92%	86%	95%	Efektif
69	Sulawesi Tenggara	Bombana	106%	98%	108%	104%	Sangat Efektif
70	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	103%	92%	104%	100%	Efektif
71	Gorontalo	Boalemo	117%	92%	107%	106%	Sangat Efektif
72	Gorontalo	Pohuwato	106%	100%	101%	103%	Sangat Efektif
73	Gorontalo	Gorontalo Utara	106%	93%	100%	100%	Efektif
74	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	106%	99%	107%	104%	Sangat Efektif
75	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	118%	103%	115%	112%	Sangat Efektif
76	Maluku	Maluku Tenggara Barat	110%	88%	99%	99%	Efektif
77	Maluku	Maluku Tengah	105%	102%	103%	103%	Sangat Efektif
78	Maluku	Buru	108%	95%	102%	102%	Sangat Efektif
79	Maluku	Kepulauan Aru	110%	94%	96%	100%	Sangat Efektif
80	Maluku	Seram Bagian Barat	106%	93%	101%	100%	Efektif
81	Maluku	Seram Bagian Timur	121%	95%	105%	107%	Sangat Efektif
82	Maluku	Maluku Barat Daya	100%	94%	95%	96%	Efektif
83	Maluku	Buru Selatan	109%	98%	92%	99%	Efektif
84	Maluku Utara	Halmahera Barat	108%	102%	93%	101%	Sangat Efektif
85	Maluku Utara	Kepulauan Sula	115%	90%	102%	102%	Sangat Efektif
86	Maluku Utara	Halmahera Selatan	116%	93%	102%	104%	Sangat Efektif
87	Maluku Utara	Halmahera Timur	101%	98%	97%	99%	Efektif
88	Maluku Utara	Pulau Morotai	93%	95%	96%	95%	Efektif
89	Maluku Utara	Pulai Taliabu	107%	91%	113%	104%	Sangat Efektif
90	Papua Barat	Teluk Wondama	103%	98%	101%	100%	Sangat Efektif
91	Papua Barat	Teluk Bintuni	133%	112%	125%	123%	Sangat Efektif
92	Papua Barat	Sorong Selatan	111%	95%	102%	103%	Sangat Efektif
93	Papua Barat	Sorong	117%	91%	122%	110%	Sangat Efektif
94	Papua Barat	Raja Ampat	115%	90%	89%	98%	Efektif

Tabel 4.1
Rasio Efektivitas
Pemerintah Daerah Tertinggal Tahun 2015-2017

No	Provinsi	Kabupaten	Rasio Efektivitas			Rata-Rata	Kriteria
			2015	2016	2017		
95	Papua Barat	Tambrau	119%	98%	111%	110%	Sangat Efektif
96	Papua Barat	Maybrat	109%	98%	105%	104%	Sangat Efektif
97	Papua	Merauke	105%	89%	93%	96%	Efektif
98	Papua	Jayawijaya	115%	103%	99%	106%	Sangat Efektif
99	Papua	Nabire	114%	99%	106%	106%	Sangat Efektif
100	Papua	Kepulauan Yapen	118%	92%	102%	104%	Sangat Efektif
101	Papua	Biak Numfor	110%	78%	87%	92%	Efektif
102	Papua	Paniai	109%	100%	108%	106%	Sangat Efektif
103	Papua	Puncak Jaya	105%	95%	92%	97%	Efektif
104	Papua	Boven Digoel	99%	101%	101%	100%	Sangat Efektif
105	Papua	Mappi	103%	97%	99%	100%	Efektif
106	Papua	Asmat	105%	98%	99%	101%	Sangat Efektif
107	Papua	Yahukimo	103%	95%	106%	102%	Sangat Efektif
108	Papua	Pegunungan Bintang	102%	101%	102%	102%	Sangat Efektif
109	Papua	Tolikara	110%	99%	103%	104%	Sangat Efektif
110	Papua	Sarmi	104%	93%	106%	101%	Sangat Efektif
111	Papua	Keerom	106%	99%	98%	101%	Sangat Efektif
112	Papua	Waropen	106%	100%	100%	102%	Sangat Efektif
113	Papua	Supiori	102%	86%	100%	96%	Efektif
114	Papua	Mamberamo Raya	107%	92%	101%	100%	Efektif
115	Papua	Nduga	103%	96%	106%	102%	Sangat Efektif
116	Papua	Lanny Jaya	120%	93%	105%	106%	Sangat Efektif
117	Papua	Memberamo Tengah	102%	98%	100%	100%	Sangat Efektif
118	Papua	Yalimo	102%	93%	100%	98%	Efektif
119	Papua	Puncak	103%	87%	104%	98%	Efektif
120	Papua	Dogiyai	98%	91%	97%	95%	Efektif
121	Papua	Intan Jaya	103%	96%	104%	101%	Sangat Efektif
122	Papua	Deiyai	100%	94%	104%	99%	Efektif
Rata-Rata			108%	97%	102%	102%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah, 2019

Gambar 4.1
Diagram Efektifitas Kabupaten Daerah Tertinggal



Sumber : Data diolah, 2019

Dalam Tabel 4.1 menunjukkan jika rata-rata perkembangan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Tertinggal di Seluruh Indonesia sudah efektif dengan jumlah rata-rata sebesar 102% selama kurun waktu anggaran tahun 2015-2017, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan lebih besar daripada anggaran penerimaan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 dan tahun 2017 efektivitas pendapatan daerah mengalami peningkatan, namun pada tahun 2016 efektivitas pendapatan Pemerintah Daerah Tertinggal mengalami penurunan, pada tahun 2015 efektivitas pendapatan mendapatkan nilai 108% lalu pada tahun 2016 turun menjadi 96%, memang masih dalam kategori Efisien namun penurunan yang terjadi cukup besar yaitu sebesar 11%, sehingga pada tahun 2016 realisasi penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.

Dilihat dari gambar 4. Dari 122 Kabupaten dengan kategori tertinggal, 70% (86 kabupaten) daerah tertinggal mendapatkan kriteria Sangat Efektif, 29% (35

kabupaten) Kabupaten dengan kriteria efektif, dan 1% (1 kabupaten) dengan kriteria kurang efektif. Kabupaten Teluk Bintuni memiliki tingkat rata-rata efektivitas tertinggi yaitu sebesar 123%, sementara Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tingkat rata-rata efektivitas terendah sebesar 75% dengan kriteria kurang efektif. Jika diurutkan berdasarkan Provinsi, yang memiliki tingkat rata-rata efektivitas tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan dengan rata-rata efektivitas sebesar 110%, dan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat rata-rata efektivitas terendah sebesar 75%.

Kabupaten yang berada di Sulawesi Barat mendapatkan rata-rata efektivitas sebesar 108,08% dengan kriteria sangat efektif. Ada 2 kabupaten tertinggal di Sulawesi Barat antara lain, Polewali Mandar dan Mamuju Tengah. Polewali Mandar memiliki rata-rata tingkat efektivitas sebesar 103% selama kurun waktu tahun 2015-2017, dimana tahun 2015 mendapatkan tingkat efektivitas sebesar 105%, kemudian pada tahun 2016 turun menjadi 98%, pada tahun 2017 tingkat efektivitas naik menjadi 107%, dimana pada tahun 2015 dan 2017 mendapatkan kriteria sangat efektif yang mana berarti realisasi pendapatan yang diterima lebih besar daripada yang dianggarkan, namun pada tahun 2016 mendapatkan kriteria efektif namun pada tahun tersebut realisasi pendapatan belum dapat memenuhi atau melebihi anggaran pendapatan yang telah ditentukan. Lalu Mamuju Tengah memiliki rata-rata tingkat efektivitas sebesar 112% selama tahun 2015-2017, yang berarti Mamuju Tengah lebih efektif dibanding dengan Polewali Mandar. Mamuju Tengah pada tahun 2015 mendapatkan angka 118% tingkat efektivitas, namun pada tahun 2016 turun menjadi 103%, lalu pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 115%. Mamuju Tengah selama tahun 2015-2017 mendapatkan kriteria sangat

efektif bisa dikatakan dari tahun ke tahun mampu mendapatkan pendapatan yang melebihi dari anggaran yang ditentukan.

Pada wilayah Papua Barat terdapat 7 kabupaten tertinggal, dimana 6 kabupaten dengan kriteria sangat efektif, dan 1 kabupaten dengan kriteria efektif. Walaupun terdapat 7 kabupaten tertinggal namun hanya 1 kabupaten yang bisa mendapatkan efektivitas lebih dari 100% yaitu Teluk Bintuni. Teluk Bintuni pada tahun 2015 mendapatkan efektivitas sebesar 133%, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan angka menjadi 111% namun angka tersebut masih dalam kriteria sangat efektif, lalu pada tahun 2017 tingkat efektivitas naik menjadi 124%. Berarti dari tahun 2015-2017 Kabupaten Teluk Bintuni mendapatkan kriteria sangat efektif sehingga realisasi pendapatan daerah lebih besar daripada jumlah yang telah dianggarkan. Berbeda dengan Sorong, Tambrau, Maybrat, Sorong Selatan, dan Teluk Wondama, daerah tersebut memang mendapatkan kriteria sangat efektif tapi hanya pada tahun 2015 dan 2017, namun pada tahun 2016 tingkat efektivitasnya belum mencapai atau melebihi 100% yang artinya pada tahun 2016 belum bisa merealisasikan anggaran yang ditentukan. Kemudian Raja Ampat mendapatkan kriteria efektif dengan rata-rata tingkat rasio sebesar 98%. Raja Ampat selalu mengalami penurunan dari tahun 2015-2017, pada tahun 2015 mendapatkan tingkat rasio sebesar 115%, 2016 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 90%, lalu pada 2017 mengalami penurunan lagi menjadi 89%, menandakan bahwa Raja Ampat hanya dapat melebihi anggaran pendapatan pada tahun 2015.

Pada wilayah Aceh terdapat 1 kabupaten tertinggal yaitu Aceh Singkil, Aceh Singkil memiliki rata-rata tingkat persentase efektivitas sebesar 106%. Aceh Singkil mendapatkan kriteria Sangat Efektif namun hanya pada tahun 2015 dan

2017, lalu pada tahun 2016 masuk dalam kriteria efektif. Pada tahun 2015 Kabupaten Aceh Singkil mendapatkan tingkat efektivitas sebesar 122%, lalu pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 92% jumlah yang besar, lalu pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 102%. Kabupaten Aceh Singkil dapat memenuhi dan melebihi anggaran hanya pada 2015 dan 2017, pada tahun 2016 realisasi lebih kecil dari anggaran yang ditentukan.

Ada sebagian Provinsi yang memiliki daerah tertinggal memiliki rata-rata tingkat efektivitas yang sama dengan tingkat efektivitasnya masuk dalam kriteria sangat efektif. Provinsi Banten, NTB, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan memiliki beberapa kabupaten yang termasuk kategori tertinggal, jika dirata-rata per-Provinsi tingkat efektivitasnya sebesar 105%. Di Banten ada 2 kabupaten dalam kategori daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Pandeglang dan Lebak, keduanya memiliki kriteria Sangat Efektif, Kabupaten Lebak mendapatkan tingkat efektivitas sebesar 109% pada tahun 2016, namun terjadi penurunan pada tahun 2016 menjadi 103% penurunan tersebut sebesar 6% namun masih dalam kriteria sangat efektif, lalu pada tahun 2017 mulai naik menjadi 112%, Kabupaten Lebak dari tahun 2015-2017 mendapatkan kriteria sangat efektif yang berarti realisasi pendapatan yang didapatkan Kabupaten Lebak lebih besar dari yang dianggarkan setiap tahunnya. Berbeda dengan Kabupaten Pandeglang hanya pada tahun 2015 dan 2017 yang mendapatkan kriteria sangat efektif, di tahun 2016 tingkat efektivitasnya menurun, yang tadinya tahun 2015 mencapai angka 108% kemudian tahun 2016 turun menjadi 94% sehingga pada tahun 2016 mendapatkan kriteria efektif, namun realisasi pendapatan masih belum bisa memenuhi anggaran pendapatan yang ditentukan. Kemudian di NTB terdapat 6

kabupaten yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal antara lain, Kabupaten Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu, Lombok Barat, dan Lombok Timur. Lima kabupaten diantaranya mendapatkan rata-rata tingkat efektivitas dengan kriteria sangat efektif dan 1 kabupaten dengan kriteria efektif selama tahun 2015-2017. Tidak semua mendapatkan kriteria sangat efektif setiap tahun, antara lain Kabupaten Dompu, Lombok Barat, dan Lombok Timur. Kabupaten Dompu dan Lombok Barat. Di Sumbawa Barat pada tahun 2015 tingkat efektivitas yang didapatkan sebesar 96% sehingga pada tahun tersebut realisasi yang didapatkan belum dapat memenuhi anggaran yang ada. Kemudian di Dompu pemerintah tidak dapat memenuhi realisasi sesuai dengan anggaran pada tahun 2016, dimana pada tahun tersebut tingkat efektivitasnya hanya 97%. Di Lombok Barat dan Lombok Timur pada tahun 2016 sama-sama memiliki tingkat efektivitas sebesar 94%, yang berarti realisasi pendapatan keduanya belum dapat terpenuhi sesuai dengan anggaran. Di Jawa Timur terdapat 4 kabupaten yang masuk ke dalam kategori tertinggal yaitu Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, dan Sampang. Rata-rata tingkat efektivitas setiap kabupaten di atas 100% dengan kriteria sangat efektif, tapi tidak setiap tahun kabupaten di Jawa Timur mendapatkan kriteria sangat efektif, hanya Kabupaten Sampang yang mendapatkan kriteria sangat efektif dari tahun ke tahun, Situbondo dan Bangkalan tidak mendapatkan kriteria sangat efektif pada tahun 2016, Situbondo mendapatkan tingkat efektivitas sebesar 99% dan Bangkalan 90% dimana Situbondo mendapatkan kriteria efektif dan Bangkalan dengan kriteria cukup efektif. Di Sulawesi Tengah ada 9 kabupaten daerah tertinggal, 8 kabupaten dengan kriteria sangat efektif dan 1 kabupaten dengan kriteria efektif. Di tahun 2015 kabupaten tertinggal di Sulawesi Tengah semua mendapatkan kriteria sangat

efektif, namun pada tahun 2016 ada 4 kabupaten tingkat efektivitasnya kurang dari 100% antara lain, Kabupaten Buol tingkat efektivitasnya 92%, Banggai Kepulauan dan Tolitoli tingkat efektivitasnya 94%, dan Banggai Laut sebesar 95% yang berarti pada tahun 2016 ke-4 Kabupaten tersebut realisasi pendapatan yang diterima belum dapat memenuhi anggaran pendapatan yang telah ditentukan, dan pada tahun 2017 masih ada 1 Kabupaten yang tingkat efektivitasnya kurang dari 100%, Morowali Utara pada tahun 2017 mendapatkan tingkat efektivitas sebesar 99%, dimana masih dengan kriteria efektif kurang sedikit lagi supaya sesuai memenuhi anggaran. Di Kalimantan Barat terdapat 8 kabupaten dengan kategori tertinggal, 6 kabupaten dengan kriteria sangat efektif dan 2 kabupaten dengan kriteria efektif. Diantara 8 kabupaten tertinggal yang ada di Kalimantan Barat, tidak semua tingkat efektivitasnya bisa mencapai atau melebihi 100%, bahkan ada yang setiap tahun tidak mencapai 100%. Kabupaten Landak, Bengkayang dan Kapuas Hulu setiap tahun mendapatkan tingkat efektivitas diatas 100% dengan kriteria sangat efektif, pada tahun 2016 ke-3 kabupaten tersebut sama-sama mengalami penurunan yang cukup besar, lalu pada tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan. Kabupaten Sintang, Sambas, Ketapang dan Kayong Utara sama-sama mengalami penurunan tingkat efektivitas dengan kriteria efektif dan persentasenya di bawah 100% oleh karena itu realisasi pendapatan yang didapatkan masih kurang dari anggaran. Kemudian Kabupaten Melawi dari tahun 2015-2017 selalu mendapatkan kriteria efektif dan tingkat efektivitasnya selalu di bawah 100%. Di Kalimantan Utara hanya ada 1 kabupaten yang mendapatkan kategori tertinggal, rata-rata tingkat efektivitas dari tahun 2015-2017 Kabupaten Nunukan mendapatkan kriteria sangat efektif, namun kriteria sangat efektif hanya didapatkan pada tahun 2015-2016 saja, pada tahun

2017 tingkat efektivitasnya 92%, yang artinya pada tahun 2017 realisasi pendapatan yang didapatkan belum bisa memenuhi anggaran yang ditentukan karena persentase yang didapatkan masih kurang dari 100%.

Sama halnya dengan di Kalimantan Utara, di Sulawesi Selatan hanya terdapat 1 kabupaten dengan kategori tertinggal yaitu pada Kabupaten Jeneponto. Pada Kabupaten Jeneponto rata-rata tingkat efektivitas yang didapatkan sebesar 104% sehingga masuk dalam kriteria sangat efektif, kriteria sangat efektif hanya didapatkan pada tahun 2015 sebesar 114%, pada tahun 2016-2017 selalu mengalami penurunan dan mendapatkan kriteria efektif, pada tahun 2016 tingkat efektivitas yang didapatkan sebesar 100% sehingga realisasi pendapatan yang didapatkan sudah tepat atau sudah memenuhi anggaran, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan lagi menjadi sebesar 97% dan pada saat itu realisasi pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang ditentukan.

Kabupaten dengan kategori tertinggal di Kalimantan Tengah dan di Gorontalo tingkat efektivitasnya sama-sama sebesar 103% jika dirata-rata per provinsi. Sama seperti di Kalimantan Utara, di Kalimantan Tengah juga hanya memiliki 1 kabupaten dengan kategori tertinggal yaitu Kabupaten Seruyan. Rata-rata tingkat efektivitas dari tahun 2015-2017 sebesar 103% masuk dalam kriteria sangat efektif. Kriteria sangat efektif hanya didapatkan pada tahun 2015 dan 2017, pada tahun 2016 tingkat efektivitasnya sebesar 96% sehingga realisasi yang didapatkan belum dapat memenuhi sesuai anggaran. Di Gorontalo terdapat 3 kabupaten dengan kategori tertinggal, 2 kabupaten dengan kriteria sangat efektif dan 1 kabupaten dengan kriteria efektif. Kabupaten Pohuwato dan Boalemo dengan kriteria sangat efektif, di Pohuwato setiap tahun realisasi pendapatannya selalu memenuhi

anggaran walaupun pada tahun 2016 terjadi penurunan. Lalu di Boalemo dan Gorontalo Utara juga mengalami penurunan pada tahun 2016 Boalemo mendapatkan tingkat efektivitas 92% dan Gorontalo Utara 93%, yang berarti Boalemo, Pohuwato dan Gorontalo Utara pada tahun 2016 sama-sama mendapatkan kriteria efektif, namun Boalemo dan Gorontalo Utara realisasi pendapatannya belum dapat memenuhi anggaran dikarenakan tingkat efektivitasnya di bawah 100%.

Kemudian ada beberapa provinsi dengan rata-rata tingkat efektivitasnya sebesar 101% antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, NTT, Maluku Utara, dan Papua. Sumatera Utara ada 4 kabupaten dengan kategori tertinggal, 1 kabupaten dengan kriteria sangat efektif, dan 3 kabupaten dengan kriteria efektif. Kabupaten Nias yang mendapatkan kriteria sangat efektif dari rata-rata tahun 2015-2017, pada tahun 2015 tingkat efektivitasnya paling tinggi sebesar 123% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 97% masuk dalam kriteria efektif, lalu pada tahun 2017 mengalami kenaikan lagi menjadi 106% dan mendapatkan kriteria sangat efektif. Nias Barat pada tahun 2015 mendapatkan tingkat efektivitas 106%, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 89% dan masuk dalam kriteria cukup efektif sehingga realisasi lebih kecil daripada anggarannya, pada tahun 2017 mengalami kenaikan lagi menjadi 104%. Di Nias Utara pada tahun 2015 mendapatkan tingkat efektivitas sebesar 112%, pada tahun 2016 tingkat efektivitasnya turun menjadi 89%, dan tahun 2017 naik 96% namun kenaikan tersebut masih lebih kecil dari anggaran. Kemudian di Nias Selatan di tahun 2015 tingkat efektivitasnya sebesar 104%, 2016 terjadi penurunan menjadi 92%, pada tahun 2017 mengalami kenaikan lagi menjadi 97%. Kabupaten

tertinggal di Sumatera Utara pada tahun 2016 tidak satupun realisasi pendapatannya yang dapat memenuhi anggaran dan pada tahun 2017 Nias Utara dan Nias Selatan realisasi pendapatannya masih dibawah anggaran karena tingkat efektivitasnya masih di bawah 100%. Di Sumatera Barat terdapat 3 kabupaten dengan kategori tertinggal, 2 dengan kriteria sangat efektif dan 1 kabupaten dengan kriteria efektif dilihat dari rata-rata tangka efektivitas pada tahun 2015-2017. Kepulauan Mentawai dan Solok Selatan mendapatkan kriteria sangat efektif karena rata-ratanya melebihi 100%, lalu Pasaman Barat mendapatkan kriteria efektif walaupun begitu realisasi pendapatannya dapat memenuhi anggaran yang ditentukan karena tingkat efektivitasnya mencapai 100%. Namun pada tahun 2016 Kabupaten Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, dan Pasaman Barat tidak satupun realisasi pendapatan yang dapat memenuhi anggaran. Di Lampung ada 2 kabupaten dengan kategori tertinggal, Lampung Barat mendapatkan rata-rata 103% dengan kriteria sangat efektif, dan Pesisir Barat tingkat efektivitasnya 99% dengan kriteria efektif. Keduanya bisa memenuhi anggaran pendapatan hanya pada tahun 2015 dan 2017, pada tahun 2016 tingkat efektivitasnya masing-masing sebesar 96% dan 95% sehingga pada tahun 2016 realisasinya masih lebih rendah daripada anggaran yang ditentukan. NTT merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak kabupaten yang tertinggal dengan jumlah 18 kabupaten, 11 kabupaten dengan kriteria sangat efektif dan 7 kabupaten dengan kriteria efektif. Pada tahun 2015 semua kabupaten daerah tertinggal di NTT mendapatkan kriteria efektif, pada tahun 2016 hanya 3 kabupaten yang memiliki tingkat efektivitas 100% ke atas, antara lain Manggarai Barat tingkat efektivitasnya 103%, Sumba Barat 102%, dan Manggarai Timur 100% yang artinya hanya 3 kabupaten tersebut yang realisasinya mampu memenuhi

sesuai anggaran pada tahun 2016, pada tahun 2017 meningkat jumlah kabupaten dengan tingkat efektivitas 100% ke-atas menjadi 11 kabupaten, dimana 7 kabupaten yang lain tingkat efektivitasnya masih belum bisa mencapai 100%. Di Maluku terdapat 8 kabupaten dengan kategori tertinggal, 4 dengan kriteria sangat efektif dan 4 kriteria efektif. Tahun 2015 semua kabupaten tertinggal di Maluku, realisasi pendapatannya dapat memenuhi anggaran. Tapi di tahun 2016 hanya 1 kabupten yang tingkat efektivitasnya di atas 100% yaitu kabupaten Maluku Tengah mendapatkan tingkat efektivitas sebesar 102% dengan kriteria sangat efektif, yang berarti Maluku Tengah pada tahun 2016 realisasi pendapatannya mampu melebihi jumlah anggaran pendapatan. Pada tahun 2017 ada 4 kabupten tingkat efektivitasnya di atas 100% yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan tingkat efektivitas 105%, Maluku Tengah sebesar 103%, Buru sebesar 102%, dan Seram Bagian Barat 102%, hanya pada ke-4 kabupaten tersebut yang realisasinya mampu untuk memenuhi anggaran. Di Maluku Utara ada 6 kabupaten dengan kategori tertinggal, 4 kabupaten dengan kriteria sangat efektif dan 2 kabupaten dengan kriteria efektif. Halmahera Selatan dan Pulau Taliabu rata-rata tingkat efektivitasnya sama-sama sebesar 104%, Kepulauan Sula sebesar 102%, Halmahera Barat sebesar 101%, Halmahera Timur Sebesar 97%, dan Pulau Morotai sebesar 95%. Pada tahun 2015 semua kabupaten tingkat efektivitasnya melebihi 100% kecuali Pulau Morotai yang tingkat efektivitasnya 93%, dan pada tahun 2016 semua kabupaten mengalami penurunan kecuali Pulau Morotai naik menjadi 95% dan walaupun turun Halmahera Barat tingkat efektivitasnya masih tetap di atas 100% yaitu sebesar 102%, kemudia pada tahun 2017 semua kabupaten mengalami kenaikan kecuali Halmahera Barat dan Halmahera Timur, masing-masing turun

menjadi 93% dan 97%. Halmahera Barat terus mengalami penurunan setiap tahun tapi rata-ratanya masih dengan kriteria sangat efektif, berbeda dengan Pulau Morotai setiap tahun mengalami kenaikan tapi tidak pernah di atas 100% karena itu rata-rata tingkat efektivitasnya masuk dalam kriteria efektif setiap tahun. Papua merupakan provinsi yang memiliki kabupaten tertinggal terbanyak dengan jumlah 26 kabupaten, 14 kabupaten dengan rata-rata tingkat efektivitasnya dengan kriteria sangat efektif dan 12 kabupaten dengan rata-rata tingkat efektivitasnya dengan kriteria efektif. Dari 26 kabupten tersebut ada 8 kabupten dengan rata-rata tingkat efektivitasnya kurang dari 100% dari tahun 2015-2017.

Ada 3 provinsi dengan rata-rata tingkat efektivitasnya mendapatkan kriteria efektif, antara lain Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Bengkulu memiliki 1 kabupten dengan rata-rata tingkat efektivitasnya sebesar 100% yaitu Kabupaten Seluma. Kabupaten Seluma mendapatkan rata-rata tingkat efektivitas di atas 100% hanya pada tahun 2015 dan 2017, pada tahun 2016 mendapatkan tingkat efektivitas sebesar 91% yang berarti hanya pada tahun 2016 Kabupaten Seluma realisasi yang didapatkan belum memenuhi anggaran yang ada. Tidak seperti Bengkulu, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Selatan sama-sama mendapatkan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 99%. Di Sulawesi Tenggara terdapat 3 kabupaten dengan kategori tertinggal, 1 kabupaten dengan kriteria sangat efektif dan 2 kabupaten dengan kriteria efektif. Kabupten Bombana mendapatkan rata-rata tingkat efektivitas terbesar di Sulawesi Tenggara, pada tahun 2015 mendapatkan tingkat efektivitas sebesar 106%, namun pada tahun 2016 turun menjadi 98% dimana pada saat itu realisasi anggaran lebih kecil dibanding dengan anggaran pendapatannya. Kemudian Kabupaten Kepulauan mendapatkan kriteria efektif,

walaupun begitu realisasi pendapatan dapat memenuhi anggaran pendapatan karena rata-rata tingkat efektivitasnya mencapai 100%, tidak seperti Bombana dan Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe tingkat efektivitasnya masih di bawah 100% dengan rata-rata tingkat efektivitasnya sebesar 95%, terlebih lagi Kabupaten Konawe dari tahun 2015-2017 selalu mengalami penurunan, hanya pada tahun 2015 Kabupaten Konawe realisasi pendapatannya mampu memenuhi anggaran pendapatan. Di Sumatera Selatan terdapat 2 kabupaten dengan kategori tertinggal yaitu Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara. Musi Rawas pada tahun 2015 tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 97%, kemudian tahun 2016 sebesar 96% pada tahun 2015-2016 tingkat efektivitasnya masih dibawah 100% yang berarti realisasi pendapatan pada 2 tahun tersebut masih lebih kecil dari anggaran, lalu pada tahun 2017 tingkat efektivitasnya naik cukup besar menjadi 107% dimana pada saat itu realisasi pendapatan baru bisa lebih unggul dibandingkan dengan anggarannya. Kemudian Musi Rawas Utara pada tahun 2015 mendapatkan kriteria cukup efektif karena tingkat efektivitasnya 88%, pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup besar menjadi 106%, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 101%, hanya pada taun 2016-2017 Kabupaten Musi Rawas Utara yang mampu mendapatkan realisasi lebih besar disbanding anggaran pendapatannya karena pada tahun tersebut tingkat efektivitasnya melebihi 100%.

Kabupaten dengan rata-rata tingkat efektivitas terendah terdapat di provinsi Kalimantan Timur, yaitu di Kabupaten Mahakam Ulu. Mahakam Ulu mendapatkan kriteria kurang efektif karena rata-rata tingkat efektivitasnya hanya 76%. Pada tahun 2015 hanya mendapatkan tingkat efektivitas sebesar 67%, kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 78%, pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 83%.

Walaupun realisasi pendapatan masih lebih kecil dibanding anggaran pendapatannya karena tingkat efektivitasnya masih di bawah 100% setiap tahunnya, tapi tingkat efektivitas setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Dari analisis yang dilakukan diketahui bahwa penurunan rata-rata tingkat efektivitas paling banyak terjadi pada tahun 2016.

4.1.4 Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Prose kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin.

Kinerja pemerintah seluruh daerah di Indonesia dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai tidak lebih dari 100%. Semakin kecil nilai rasio efisiensinya maka semakin baik kinerja pemerintah daerah tertinggal di Indonesia.

Tabel 4.2
Rasio Efisiensi
Pemerintah Daerah Tertinggal di Indonesia

No	Provinsi	Kabupaten	Rasio Efisiensi Keuangan			Rata-Rata	Kriteria
			2015	2016	2017		
1	Aceh	Aceh Singkil	99%	107%	100%	102%	Tidak Efisien
2	Sumatera Utara	Nias	97%	97%	101%	98%	Kurang Efisien
3	Sumatera Utara	Nias Selatan	105%	80%	95%	93%	Kurang Efisien
4	Sumatera Utara	Nias Utara	103%	103%	105%	103%	Tidak Efisien
5	Sumatera Utara	Nias Barat	104%	105%	98%	103%	Tidak Efisien
6	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	101%	109%	110%	107%	Tidak Efisien
7	Sumatera Barat	Solok Selatan	95%	105%	102%	101%	Tidak Efisien
8	Sumatera Barat	Pasaman Barat	94%	99%	104%	99%	Kurang Efisien
9	Sumatera Selatan	Musi Rawas	107%	94%	93%	98%	Kurang Efisien
10	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	109%	89%	97%	98%	Kurang Efisien
11	Bengkulu	Seluma	99%	105%	98%	101%	Tidak Efisien
12	Lampung	Lampung Barat	100%	98%	105%	101%	Tidak Efisien
13	Lampung	Pesisir Barat	97%	99%	100%	99%	Kurang Efisien
14	Jawa Timur	Bondowoso	99%	102%	101%	101%	Tidak Efisien
15	Jawa Timur	Situbondo	97%	105%	99%	101%	Tidak Efisien
16	Jawa Timur	Bangkalan	103%	106%	92%	100%	Tidak Efisien
17	Jawa Timur	Sampang	98%	104%	104%	102%	Tidak Efisien
18	Banten	Pandeglang	99%	100%	103%	101%	Tidak Efisien
19	Banten	Lebak	94%	98%	102%	98%	Kurang Efisien
20	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	102%	101%	98%	100%	Tidak Efisien
21	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	95%	95%	101%	97%	Kurang Efisien
22	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	106%	99%	96%	100%	Tidak Efisien
23	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	102%	97%	103%	101%	Tidak Efisien
24	Nusa Tenggara Barat	Dompu	97%	96%	104%	99%	Kurang Efisien
25	Nusa Tenggara Barat	Bima	98%	99%	99%	98%	Kurang Efisien
26	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	97%	82%	110%	97%	Kurang Efisien
27	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	101%	104%	97%	101%	Tidak Efisien
28	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	99%	104%	103%	102%	Tidak Efisien
29	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	101%	99%	102%	101%	Tidak Efisien
30	Nusa Tenggara Timur	Kupang	97%	118%	120%	112%	Tidak Efisien
31	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	99%	108%	98%	102%	Tidak Efisien
32	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	101%	103%	94%	99%	Kurang Efisien
33	Nusa Tenggara Timur	Belu	103%	102%	98%	101%	Tidak Efisien
34	Nusa Tenggara Timur	Alor	97%	105%	101%	101%	Tidak Efisien
35	Nusa Tenggara Timur	Lembata	101%	106%	101%	103%	Tidak Efisien

Tabel 4.2
Rasio Efisiensi
Pemerintah Daerah Tertinggal di Indonesia

No	Provinsi	Kabupaten	Rasio Efisiensi Keuangan			Rata-Rata	Kriteria
			2015	2016	2017		
36	Nusa Tenggara Timur	Ende	100%	99%	108%	102%	Tidak Efisien
37	Nusa Tenggara Timur	Manggarai	100%	104%	95%	100%	Kurang Efisien
38	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	101%	101%	97%	100%	Kurang Efisien
39	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	98%	102%	104%	101%	Tidak Efisien
40	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	102%	105%	103%	103%	Tidak Efisien
41	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	102%	100%	100%	101%	Tidak Efisien
42	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	97%	107%	97%	101%	Tidak Efisien
43	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	100%	99%	100%	100%	Kurang Efisien
44	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	115%	106%	84%	101%	Tidak Efisien
45	Nusa Tenggara Timur	Malaka	84%	107%	100%	97%	Kurang Efisien
46	Kalimantan Barat	Sambas	101%	104%	100%	102%	Tidak Efisien
47	Kalimantan Barat	Bengkayang	95%	105%	101%	100%	Tidak Efisien
48	Kalimantan Barat	Landak	101%	102%	100%	101%	Tidak Efisien
49	Kalimantan Barat	Ketapang	102%	103%	100%	102%	Tidak Efisien
50	Kalimantan Barat	Sintang	99%	104%	97%	100%	Kurang Efisien
51	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	98%	101%	98%	99%	Kurang Efisien
52	Kalimantan Barat	Melawi	95%	96%	99%	97%	Kurang Efisien
53	Kalimantan Barat	Kayong Utara	100%	102%	101%	101%	Tidak Efisien
54	Kalimantan Tengah	Seruyan	106%	98%	95%	100%	Kurang Efisien
55	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	99%	109%	104%	104%	Tidak Efisien
56	Kalimantan Utara	Nunukan	147%	97%	103%	116%	Tidak Efisien
57	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	121%	87%	122%	110%	Tidak Efisien
58	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	100%	104%	107%	104%	Tidak Efisien
59	Sulawesi Tengah	Donggala	97%	101%	101%	100%	Kurang Efisien
60	Sulawesi Tengah	Toli-Toli	100%	102%	99%	101%	Tidak Efisien
61	Sulawesi Tengah	Buol	97%	106%	100%	101%	Tidak Efisien
62	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	102%	99%	99%	100%	Tidak Efisien
63	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	100%	100%	101%	100%	Tidak Efisien
64	Sulawesi Tengah	Sigi	103%	100%	99%	101%	Tidak Efisien
65	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	93%	95%	94%	94%	Kurang Efisien
66	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	98%	97%	105%	100%	Tidak Efisien
67	Sulawesi Selatan	Jenepono	97%	99%	104%	100%	Tidak Efisien
68	Sulawesi Tenggara	Konawe	98%	101%	110%	103%	Tidak Efisien
69	Sulawesi Tenggara	Bombana	100%	101%	98%	100%	Kurang Efisien
70	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	88%	103%	102%	97%	Kurang Efisien

Tabel 4.2
Rasio Efisiensi
Pemerintah Daerah Tertinggal di Indonesia

No	Provinsi	Kabupaten	Rasio Efisiensi Keuangan			Rata-Rata	Kriteria
			2015	2016	2017		
71	Gorontalo	Boalemo	97%	107%	96%	100%	Kurang Efisien
72	Gorontalo	Pohuwato	101%	97%	104%	100%	Tidak Efisien
73	Gorontalo	Gorontalo Utara	104%	99%	98%	100%	Tidak Efisien
74	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	98%	104%	100%	101%	Tidak Efisien
75	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	93%	107%	97%	99%	Kurang Efisien
76	Maluku	Maluku Tenggara Barat	99%	102%	101%	100%	Tidak Efisien
77	Maluku	Maluku Tengah	104%	102%	100%	102%	Tidak Efisien
78	Maluku	Buru	100%	100%	99%	100%	Kurang Efisien
79	Maluku	Kepulauan Aru	92%	107%	107%	102%	Tidak Efisien
80	Maluku	Seram Bagian Barat	107%	103%	102%	104%	Tidak Efisien
81	Maluku	Seram Bagian Timur	106%	101%	102%	103%	Tidak Efisien
82	Maluku	Maluku Barat Daya	87%	98%	106%	97%	Kurang Efisien
83	Maluku	Buru Selatan	102%	99%	109%	103%	Tidak Efisien
84	Maluku Utara	Halmahera Barat	100%	97%	115%	104%	Tidak Efisien
85	Maluku Utara	Kepulauan Sula	91%	104%	103%	99%	Kurang Efisien
86	Maluku Utara	Halmahera Selatan	103%	98%	97%	100%	Kurang Efisien
87	Maluku Utara	Halmahera Timur	104%	94%	104%	101%	Tidak Efisien
88	Maluku Utara	Pulau Morotai	96%	104%	97%	99%	Kurang Efisien
89	Maluku Utara	Pulai Taliabu	93%	102%	97%	97%	Kurang Efisien
90	Papua Barat	Teluk Wondama	109%	99%	100%	103%	Tidak Efisien
91	Papua Barat	Teluk Bintuni	114%	113%	104%	110%	Tidak Efisien
92	Papua Barat	Sorong Selatan	98%	103%	101%	101%	Tidak Efisien
93	Papua Barat	Sorong	115%	96%	83%	98%	Kurang Efisien
94	Papua Barat	Raja Ampat	95%	96%	101%	98%	Kurang Efisien
95	Papua Barat	Tambrau	97%	107%	95%	100%	Kurang Efisien
96	Papua Barat	Maybrat	108%	104%	91%	101%	Tidak Efisien
97	Papua	Merauke	102%	93%	106%	100%	Tidak Efisien
98	Papua	Jayawijaya	103%	99%	105%	102%	Tidak Efisien
99	Papua	Nabire	99%	94%	103%	99%	Kurang Efisien
100	Papua	Kepulauan Yapen	90%	105%	96%	97%	Kurang Efisien
101	Papua	Biak Numfor	94%	112%	86%	97%	Kurang Efisien
102	Papua	Paniai	96%	101%	98%	99%	Kurang Efisien
103	Papua	Puncak Jaya	96%	104%	98%	99%	Kurang Efisien
104	Papua	Boven Digoel	96%	90%	98%	94%	Kurang Efisien
105	Papua	Mappi	100%	107%	98%	102%	Tidak Efisien

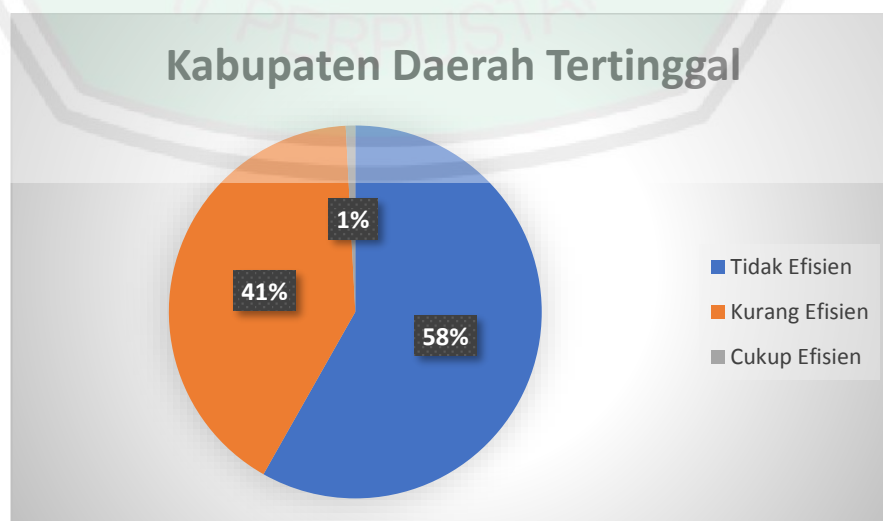
Tabel 4.2
Rasio Efisiensi
Pemerintah Daerah Tertinggal di Indonesia

No	Provinsi	Kabupaten	Rasio Efisiensi Keuangan			Rata-Rata	Kriteria
			2015	2016	2017		
106	Papua	Asmat	93%	97%	101%	97%	Kurang Efisien
107	Papua	Yahukimo	104%	99%	98%	100%	Tidak Efisien
108	Papua	Pegunungan Bintang	103%	99%	102%	101%	Tidak Efisien
109	Papua	Tolikara	86%	81%	87%	84%	Cukup Efisien
110	Papua	Sarmi	94%	95%	95%	95%	Kurang Efisien
111	Papua	Keerom	95%	101%	100%	98%	Kurang Efisien
112	Papua	Waropen	102%	95%	100%	99%	Kurang Efisien
113	Papua	Supiori	101%	94%	99%	98%	Kurang Efisien
114	Papua	Mamberamo Raya	96%	102%	94%	98%	Kurang Efisien
115	Papua	Nduga	101%	97%	100%	99%	Kurang Efisien
116	Papua	Lanny Jaya	103%	100%	98%	100%	Tidak Efisien
117	Papua	Memberamo Tengah	101%	102%	99%	101%	Tidak Efisien
118	Papua	Yalimo	100%	103%	94%	99%	Kurang Efisien
119	Papua	Puncak	122%	110%	100%	110%	Tidak Efisien
120	Papua	Dogiyai	108%	106%	87%	100%	Tidak Efisien
121	Papua	Intan Jaya	97%	95%	95%	95%	Kurang Efisien
122	Papua	Deiyai	104%	103%	99%	102%	Tidak Efisien
Rata-Rata			100%	101%	100%	100%	Kurang Efisien

Sumber : Data diolah, 2019

Gambar 4.2

Diagram Efisiensi Kabupaten Daerah Tertinggal



Sumber : Data diolah, 2019

Dari Tabel 4.2 menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Tertinggal yang ada di Indonesia tahun 2015-2017 masih kurang efisien dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing, karena biaya yang dikeluarkan pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang diterima.

Dilihat dari gambar 4. Di atas 122 kabupaten dengan kategori tertinggal hanya 1% (1 kabupaten) yang mendapatkan kriteria cukup efisien, 41% (50 kabupaten) dengan kriteria kurang efisien, dan 58% (71 kabupaten) dengan kriteria tidak efisien. Kabupaten Tolikara adalah daerah yang memiliki tingkat efisiensi paling kecil yang berarti biaya yang dikeluarkan pemerintah lebih sedikit dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Berbeda dengan Kabupaten Nunukan yang berada di Kalimantan Utara yang memiliki tingkat efisiensi yang paling besar, tingkat efisiensi di Nunukan sebesar 116% dengan kriteria tidak efisien yang berarti Kabupaten Nunukan masih belum efisien dalam mengatur keuangannya karena biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan.

Jika diurutkan per-Provinsi, rata-rata tingkat efisiensi terkecil berada pada Kabupaten Daerah tertinggal yang ada di Sumatera Selatan rata-ratanya sebesar 98% dengan kriteria kurang efektif. Kabupaten Musi Rawas selalu mengalami penurunan dari tahun 2015-2017 yang menandakan pemerintah sudah berhasil untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya. Tidak seperti di Kabupaten Musi Rawas Utara yang belum bisa konsisten, pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan yang lumayan besar yang merupakan pertanda baik, namun

pada tahun 2017 tingkat efisiensi meningkat menjadi 97% namun biaya yang dikeluarkan masih lebih kecil daripada pendapatan yang didapatkan.

Daerah Papua, NTB, Banten, dan Sumatera Utara memiliki persentase yang sama yaitu sebesar 99% dimana dengan kriteria kurang efisien. Papua merupakan daerah yang memiliki banyak kabupaten tertinggal dengan jumlah 26 daerah tertinggal. Namun di Kabupaten Tolikara merupakan kabupaten yang memiliki persentase efisiensi terkecil yaitu dengan nominal 84% dengan kriteria cukup efisien dimana Kabupaten Tolikara sudah cukup baik dalam pengelolaan keuangan disbanding dengan kabupaten yang lain karena pendapatan yang didapatkan masih lebih banyak dibandingkan dengan pengeluaran biayanya. 19 dari 26 kabupaten yang berada di Papua mendapatkan kriteria kurang efisien namun 15 diantaranya masih bisa mengunggulkan pendapatannya disbanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian di NTB terdapat 8 kabupaten tertinggal, 6 kabupaten dengan kriteria efisien dan 2 lainnya dengan kriteria tidak efisien. Namun Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Tengah, Bima, dan Dompu persentase efisiensinya masih di bawah 100% yang berarti ke-4 kabupaten tersebut memiliki pendapatan yang lebih besar jika dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Di Banten, Kabupaten Pandeglang setiap tahun biaya yang dikeluarkan terus meningkat tidak dibarengi dengan pendapatan yang masuk sehingga rata-rata tingkat efisiensinya menunjukkan angka 101% yang berarti tidak efisien, berbeda dengan Kabupaten Lebak walaupun juga mengalami kenaikan tapi rata-rata tingkat efisiensinya sebesar 98% dengan kriteria kurang efisien namun pendapatan yang didapatkan lebih besar dari pengeluarannya. Lalu di Sumatera Utara 2 kabupaten dengan kriteria kurang efisien dan 2 lainnya dengan kriteria tidak efisien, hanya Kabupaten

Nias Selatan dan Nias yang biaya yang dikeluarkan masih kurang dari pendapatan yang diperoleh.

Kabupaten tertinggal yang berada di Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi barat, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Gorontalo sama-sama memiliki persentase efisiensi yang sama sebesar 100% dan masuk dalam kriteria kurang efisien yang berarti kurang lebih biaya yang dikeluarkan besarnya sama dengan pendapatan yang diterima.

Kemudian kabupaten tertinggal yang berada di Bengkulu, Jawa Timur, Maluku, Papua Barat, NTT, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara rata-rata masuk dalam kriteria tidak efisien. Terutama kabupaten tertinggal yang berada di Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Nunukan memiliki persentase efisiensi terbesar diantara kabupaten tertinggal lainnya, karena rata-rata tingkat efisiensinya sebesar 116%, tingkat efisiensi pada tahun 2015 mencapai hingga 147% yang menjadikan Kabupaten Nunukan terburuk, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 97% dimana jauh lebih baik karena masih di bawah 100%, namun sayangnya pada tahun 2017 kembali naik menjadi 103%, walaupun tidak sebesar pada tahun 2015 tapi persentase efisiensinya masih diatas 100% yang berarti pengelolaan keuangan pada Kabupaten Nunukan masih buruk karena biaya yang dikeluarkan masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan pendapatan yang diterima.

4.1.5 Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan.



Tabel 4.3
Rasio Kemandirian
Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia

No	Provinsi	Kabupaten	Rasio Kemandirian			Rata-Rata
			2015	2016	2017	
1	Aceh	Aceh Singkil	5%	5%	5%	5%
2	Sumatera Utara	Nias	10%	10%	11%	10%
3	Sumatera Utara	Nias Selatan	2%	2%	2%	2%
4	Sumatera Utara	Nias Utara	3%	4%	3%	3%
5	Sumatera Utara	Nias Barat	3%	3%	6%	4%
6	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	5%	5%	7%	6%
7	Sumatera Barat	Solok Selatan	6%	7%	9%	7%
8	Sumatera Barat	Pasaman Barat	7%	9%	15%	10%
9	Sumatera Selatan	Musi Rawas	7%	6%	10%	8%
10	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	5%	4%	7%	5%
11	Bengkulu	Seluma	4%	3%	6%	4%
12	Lampung	Lampung Barat	5%	5%	4%	5%
13	Lampung	Pesisir Barat	2%	3%	5%	3%
14	Jawa Timur	Bondowoso	9%	9%	12%	10%
15	Jawa Timur	Situbondo	10%	11%	14%	12%
16	Jawa Timur	Bangkalan	10%	11%	15%	12%
17	Jawa Timur	Sampang	8%	8%	13%	10%
18	Banten	Pandeglang	8%	9%	16%	11%
19	Banten	Lebak	13%	12%	19%	15%
20	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	13%	14%	17%	15%
21	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	10%	9%	15%	11%
22	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	11%	11%	16%	12%
23	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	10%	9%	15%	11%
24	Nusa Tenggara Barat	Dompu	8%	8%	13%	10%
25	Nusa Tenggara Barat	Bima	7%	7%	11%	8%
26	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	7%	5%	14%	9%
27	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	16%	16%	16%	16%
28	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	8%	9%	12%	10%
29	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	7%	6%	9%	8%
30	Nusa Tenggara Timur	Kupang	14%	6%	12%	11%
31	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	7%	6%	13%	9%
32	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	5%	5%	8%	6%
33	Nusa Tenggara Timur	Belu	10%	9%	11%	10%
34	Nusa Tenggara Timur	Alor	5%	5%	8%	6%
35	Nusa Tenggara Timur	Lembata	5%	5%	5%	5%

Tabel 4.3
Rasio Kemandirian

Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia

No	Provinsi	Kabupaten	Rasio Kemandirian			Rata-Rata
			2015	2016	2017	
36	Nusa Tenggara Timur	Ende	6%	6%	9%	7%
37	Nusa Tenggara Timur	Manggarai	8%	7%	12%	9%
38	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	5%	4%	7%	5%
39	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	8%	10%	12%	10%
40	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	5%	4%	11%	6%
41	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	6%	5%	5%	6%
42	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	5%	4%	6%	5%
43	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	6%	5%	9%	7%
44	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	6%	6%	9%	7%
45	Nusa Tenggara Timur	Malaka	4%	4%	7%	5%
46	Kalimantan Barat	Sambas	6%	7%	12%	8%
47	Kalimantan Barat	Bengkayang	4%	4%	4%	4%
48	Kalimantan Barat	Landak	4%	4%	10%	6%
49	Kalimantan Barat	Ketapang	7%	7%	8%	7%
50	Kalimantan Barat	Sintang	7%	6%	6%	6%
51	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	5%	4%	8%	6%
52	Kalimantan Barat	Melawi	3%	3%	6%	4%
53	Kalimantan Barat	Kayong Utara	2%	2%	5%	3%
54	Kalimantan Tengah	Seruyan	5%	5%	10%	7%
55	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	9%	8%	12%	10%
56	Kalimantan Utara	Nunukan	10%	6%	7%	7%
57	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	2%	2%	1%	1%
58	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	3%	3%	5%	4%
59	Sulawesi Tengah	Donggala	6%	6%	10%	7%
60	Sulawesi Tengah	Toli-Toli	7%	7%	9%	8%
61	Sulawesi Tengah	Buol	6%	6%	8%	7%
62	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	7%	6%	11%	8%
63	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	5%	5%	5%	5%
64	Sulawesi Tengah	Sigi	3%	3%	7%	4%
65	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	3%	4%	5%	4%
66	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	5%	4%	6%	5%
67	Sulawesi Selatan	Jeneponto	6%	6%	9%	7%
68	Sulawesi Tenggara	Konawe	5%	5%	8%	6%
69	Sulawesi Tenggara	Bombana	5%	4%	6%	5%
70	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	2%	2%	5%	3%
71	Gorontalo	Boalemo	6%	6%	8%	7%
72	Gorontalo	Pohuwato	6%	7%	8%	7%
73	Gorontalo	Gorontalo Utara	5%	4%	6%	5%
74	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	10%	10%	15%	12%
75	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	2%	3%	6%	4%

Tabel 4.3
Rasio Kemandirian
Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia



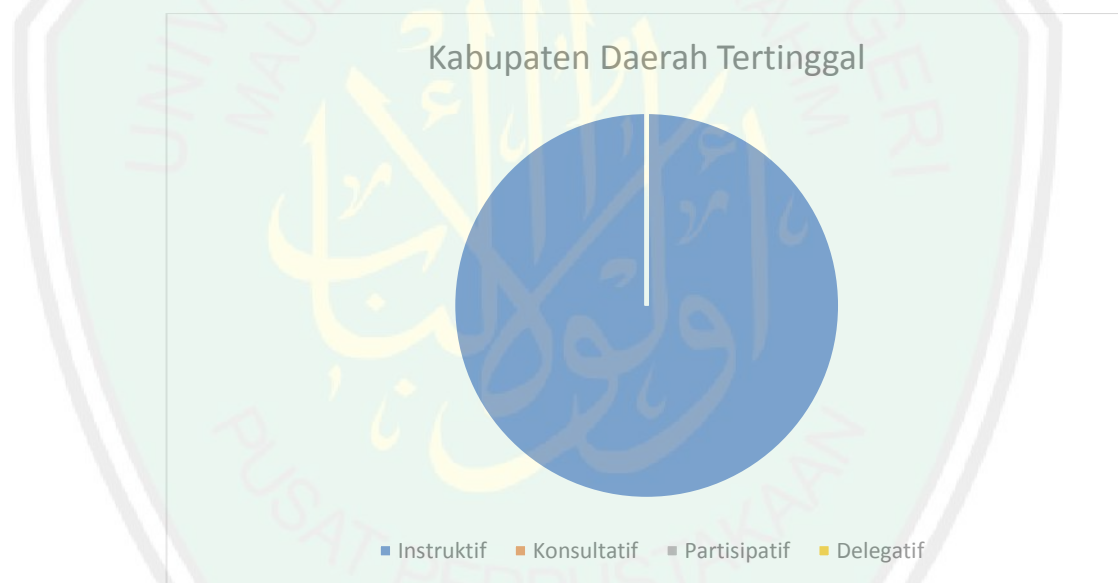
No	Provinsi	Kabupaten	Rasio Kemandirian			Rata-Rata
			2015	2016	2017	
76	Maluku	Maluku Tenggara Barat	4%	4%	3%	4%
77	Maluku	Maluku Tengah	5%	8%	4%	6%
78	Maluku	Buru	3%	3%	5%	4%
79	Maluku	Kepulauan Aru	3%	3%	5%	4%
80	Maluku	Seram Bagian Barat	2%	3%	2%	2%
81	Maluku	Seram Bagian Timur	2%	2%	2%	2%
82	Maluku	Maluku Barat Daya	3%	5%	5%	4%
83	Maluku	Buru Selatan	2%	4%	2%	3%
84	Maluku Utara	Halmahera Barat	3%	3%	3%	3%
85	Maluku Utara	Kepulauan Sula	2%	3%	3%	2%
86	Maluku Utara	Halmahera Selatan	3%	2%	2%	2%
87	Maluku Utara	Halmahera Timur	4%	3%	6%	4%
88	Maluku Utara	Pulau Morotai	1%	1%	3%	2%
89	Maluku Utara	Pulai Taliabu	2%	2%	6%	3%
90	Papua Barat	Teluk Wondama	2%	2%	1%	2%
91	Papua Barat	Teluk Bintuni	3%	3%	2%	3%
92	Papua Barat	Sorong Selatan	2%	4%	2%	3%
93	Papua Barat	Sorong	5%	6%	6%	5%
94	Papua Barat	Raja Ampat	3%	4%	3%	4%
95	Papua Barat	Tambrau	1%	1%	0.20%	1%
96	Papua Barat	Maybrat	2%	1%	0.47%	1%
97	Papua	Merauke	7%	8%	8%	8%
98	Papua	Jayawijaya	6%	5%	5%	5%
99	Papua	Nabire	2%	4%	4%	3%
100	Papua	Kepulauan Yapen	4%	5%	4%	4%
101	Papua	Biak Numfor	6%	2%	1%	3%
102	Papua	Paniai	2%	2%	2%	2%
103	Papua	Puncak Jaya	1%	2%	1%	1%
104	Papua	Boven Digoel	2%	2%	3%	2%
105	Papua	Mappi	1%	2%	2%	2%
106	Papua	Asmat	4%	5%	3%	4%
107	Papua	Yahukimo	2%	2%	1%	2%
108	Papua	Pegunungan Bintang	2%	1%	1%	1%
109	Papua	Tolikara	1%	2%	1%	1%
110	Papua	Sarmi	1%	2%	0.46%	1%
111	Papua	Keerom	1%	6%	1%	3%
112	Papua	Waropen	1%	1%	0.39%	1%
113	Papua	Supiori	1%	2%	1%	1%
114	Papua	Mamberamo Raya	1%	2%	1%	1%
115	Papua	Nduga	0.36%	1%	2%	1%

No	Provinsi	Kabupaten	Rasio Kemandirian			Rata-Rata
			2015	2016	2017	
116	Papua	Lanny Jaya	1%	1%	4%	2%
117	Papua	Memberamo Tengah	1%	1%	1%	1%
118	Papua	Yalimo	2%	2%	2%	2%
119	Papua	Puncak	2%	1%	1%	1%
120	Papua	Dogiyai	1%	1%	8%	3%
121	Papua	Intan Jaya	1%	2%	0.47%	1%
122	Papua	Deiyai	1%	1%	0.25%	1%
		Rata-Rata	5%	5%	7%	5%

Sumber : Data diolah, 2019

Gambar 4.3

Diagram Kemandirian Kabupaten Daerah Tertinggal



Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.3 dan gambar 4.3 seluruh Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia menunjukkan kriteria rendah sekali, berarti bahwa tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten tertinggal dalam membiayai kegiatan pemerintahannya masih bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal setiap tahunnya memiliki pola hubungan instruktif, dikarenakan

peran pemerintah daerah lebih sedikit dibandingkan dengan peran pemerintah pusat.

Rata-rata tingkat rasio kemandirian pada tahun 2015 dan 2016 memiliki persentase yang sama kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 7%, hal ini menandakan setiap tahun pemerintah daerah tertinggal dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung pada pusat. Jadi kemandirian keuangan pemerintah daerah tertinggal secara keseluruhan masih dapat dikatakan rendah sekali, dalam hal ini membuat pemerintah daerah tertinggal terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Pemerintah daerah tertinggal masih belum bisa mengoptimalkan PAD untuk membiayai ke pemerintahannya dan pembangunan daerahnya.

Keadaan ini bisa terjadi dikarenakan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu penyebab PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal masih sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pemerintah pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah juga merupakan salah satu penyebabnya.

Dalam menanggulangi hal tersebut, pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan daerah itu sendiri. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan PAD.

4.1.6 Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan digunakan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif atau negative. Tentu diharapkan pertumbuhan yang terjadi adalah positif dan trend-nya meningkat. Jika terjadi pertumbuhan yang negative, maka hal itu berarti menunjukkan terjadinya penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.



Tabel 4.4
Rasio Pertumbuhan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia

No	Provinsi	Kabupaten	Rasio Pertumbuhan		
			2015	2016	2017
1	Aceh	Aceh Singkil	39%	6%	-2%
2	Sumatera Utara	Nias	45%	18%	6%
3	Sumatera Utara	Nias Selatan	8%	24%	12%
4	Sumatera Utara	Nias Utara	25%	13%	2%
5	Sumatera Utara	Nias Barat	27%	15%	21%
6	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	15%	10%	1%
7	Sumatera Barat	Solok Selatan	20%	5%	2%
8	Sumatera Barat	Pasaman Barat	44%	11%	0.22%
9	Sumatera Selatan	Musi Rawas	22%	23%	-4%
10	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	13%	32%	-3%
11	Bengkulu	Seluma	24%	13%	5%
12	Lampung	Lampung Barat	48%	14%	5%
13	Lampung	Pesisir Barat	76%	29%	10%
14	Jawa Timur	Bondowoso	32%	8%	-1%
15	Jawa Timur	Situbondo	15%	4%	3%
16	Jawa Timur	Bangkalan	26%	2%	19%
17	Jawa Timur	Sampang	50%	-1%	-7%
18	Banten	Pandeglang	41%	8%	12%
19	Banten	Lebak	33%	12%	-3%
20	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	17%	11%	15%
21	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	26%	18%	-1%
22	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	22%	11%	14%
23	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	18%	17%	10%
24	Nusa Tenggara Barat	Dompu	16%	20%	-3%
25	Nusa Tenggara Barat	Bima	20%	19%	4%
26	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	22%	65%	5%
27	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	28%	29%	11%
28	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	20%	23%	1%
29	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	19%	20%	4%
30	Nusa Tenggara Timur	Kupang	17%	15%	-13%
31	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	15%	12%	18%
32	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	11%	17%	10%

Tabel 4.4
Rasio Pertumbuhan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia

No	Provinsi	Kabupaten	Rasio Pertumbuhan		
			2015	2016	2017
33	Nusa Tenggara Timur	Belu	29%	11%	18%
34	Nusa Tenggara Timur	Alor	10%	19%	11%
35	Nusa Tenggara Timur	Lembata	14%	25%	-1%
36	Nusa Tenggara Timur	Ende	20%	25%	-5%
37	Nusa Tenggara Timur	Manggarai	29%	11%	4%
38	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	17%	19%	4%
39	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	20%	15%	15%
40	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	20%	14%	68%
41	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	25%	16%	-36%
42	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	17%	15%	5%
43	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	25%	20%	6%
44	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	22%	12%	-4%
45	Nusa Tenggara Timur	Malaka	66%	11%	25%
46	Kalimantan Barat	Sambas	20%	9%	7%
47	Kalimantan Barat	Bengkayang	36%	4%	3%
48	Kalimantan Barat	Landak	40%	16%	-7%
49	Kalimantan Barat	Ketapang	33%	5%	5%
50	Kalimantan Barat	Sintang	41%	12%	16%
51	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	35%	18%	-1%
52	Kalimantan Barat	Melawi	7%	14%	12%
53	Kalimantan Barat	Kayong Utara	15%	16%	12%
54	Kalimantan Tengah	Seruyan	3%	26%	6%
55	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	38%	9%	-10%
56	Kalimantan Utara	Nunukan	-15%	21%	-8%
57	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	98%	19%	-13%
58	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	37%	16%	8%
59	Sulawesi Tengah	Donggala	31%	17%	-10%
60	Sulawesi Tengah	Toli-Toli	18%	7%	20%
61	Sulawesi Tengah	Buol	39%	8%	4%
62	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	25%	26%	-1%
63	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	36%	17%	-10%
64	Sulawesi Tengah	Sigi	27%	30%	-9%
65	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	131%	18%	13%
66	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	40%	23%	2%
67	Sulawesi Selatan	Jeneponto	27%	21%	-14%
68	Sulawesi Tenggara	Konawe	32%	9%	7%
69	Sulawesi Tenggara	Bombana	24%	17%	0.31%
70	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	278%	12%	29%

Tabel 4.4
Rasio Pertumbuhan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia

No	Provinsi	Kabupaten	Rasio Pertumbuhan		
			2015	2016	2017
71	Gorontalo	Boalemo	32%	11%	7%
72	Gorontalo	Pohuwato	19%	19%	-5%
73	Gorontalo	Gorontalo Utara	19%	25%	7%
74	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	27%	20%	3%
75	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	131%	18%	-2%
76	Maluku	Maluku Tenggara Barat	20%	9%	3%
77	Maluku	Maluku Tengah	16%	20%	2%
78	Maluku	Buru	25%	27%	-6%
79	Maluku	Kepulauan Aru	19%	15%	14%
80	Maluku	Seram Bagian Barat	20%	13%	6%
81	Maluku	Seram Bagian Timur	33%	12%	16%
82	Maluku	Maluku Barat Daya	19%	12%	17%
83	Maluku	Buru Selatan	23%	24%	-18%
84	Maluku Utara	Halmahera Barat	25%	32%	-14%
85	Maluku Utara	Kepulauan Sula	40%	10%	-1%
86	Maluku Utara	Halmahera Selatan	31%	28%	10%
87	Maluku Utara	Halmahera Timur	-0.40%	31%	7%
88	Maluku Utara	Pulau Morotai	47%	-16%	5%
89	Maluku Utara	Pulai Taliabu	172%	27%	6%
90	Papua Barat	Teluk Wondama	13%	14%	-2%
91	Papua Barat	Teluk Bintuni	50%	5%	8%
92	Papua Barat	Sorong Selatan	20%	11%	-3%
93	Papua Barat	Sorong	30%	-0.15%	13%
94	Papua Barat	Raja Ampat	8%	5%	-3%
95	Papua Barat	Tambrauw	38%	12%	-5%
96	Papua Barat	Maybrat	24%	25%	8%
97	Papua	Merauke	19%	-2%	-4%
98	Papua	Jayawijaya	52%	10%	2%
99	Papua	Nabire	30%	7%	-3%
100	Papua	Kepulauan Yapen	39%	5%	1%
101	Papua	Biak Numfor	44%	3%	6%
102	Papua	Paniai	28%	21%	8%
103	Papua	Puncak Jaya	26%	13%	-12%
104	Papua	Boven Digoel	4%	14%	-1%
105	Papua	Mappi	17%	8%	-3%
106	Papua	Asmat	23%	12%	-1%
107	Papua	Yahukimo	35%	24%	9%
108	Papua	Pegunungan Bintang	18%	17%	1%
109	Papua	Tolikara	48%	17%	-3%
110	Papua	Sarmi	22%	10%	-6%

Tabel 4.4

Rasio Pertumbuhan

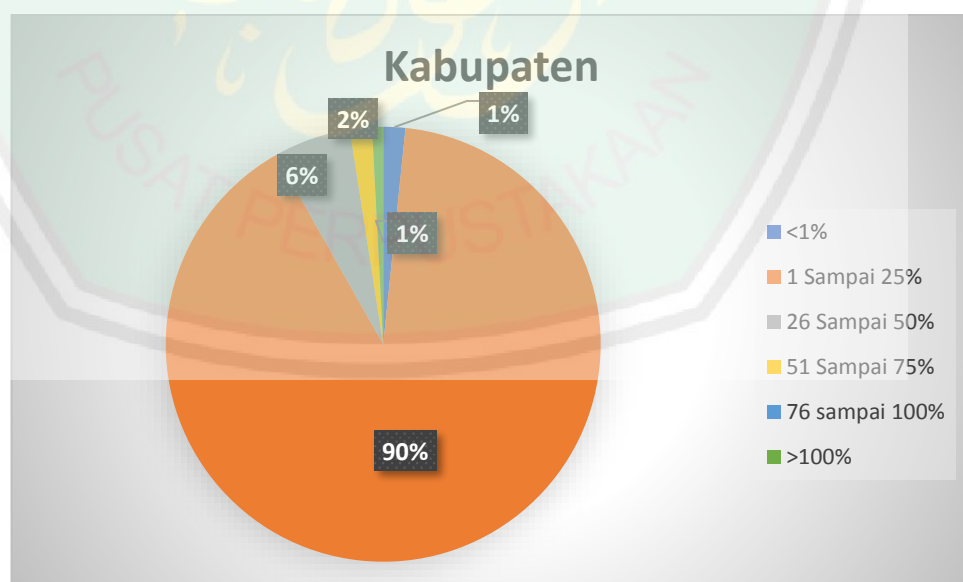
Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia

No	Provinsi	Kabupaten	Rasio Pertumbuhan		
			2015	2016	2017
111	Papua	Keerom	18%	14%	-9%
112	Papua	Waropen	26%	26%	-7%
113	Papua	Supiori	-0.45%	7%	-0.44%
114	Papua	Mamberamo Raya	7%	9%	-9%
115	Papua	Nduga	30%	21%	3%
116	Papua	Lanny Jaya	46%	12%	-4%
117	Papua	Memberamo Tengah	11%	21%	-10%
118	Papua	Yalimo	28%	15%	1%
119	Papua	Puncak	22%	3%	-37%
120	Papua	Dogiyai	23%	10%	72%
121	Papua	Intan Jaya	11%	11%	1%
122	Papua	Deiyai	20%	16%	-4%
		Rata-Rata	31%	15%	3%

Sumber : Data diolah, 2019

Gambar 4.

Diagram Pertumbuhan Pemerintah Daerah Tertinggal



Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan table 4.4 dapat dilihat jika rata-rata seluruh rasio pertumbuhan pendapatan paling besar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 31%, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan setengahnya menjadi 15%, kemudian pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan 5 kali lipat dibanding tahun lalu. Trend pendapatan terus menurun setiap tahun yang berarti rata-rata setiap tahun kabupaten daerah tertinggal selalu mengalami penurunan penerimaan PAD.

Dan jika dilihat secara keseluruhan seperti pada diagram di atas, diketahui bahwa 1% dari 122 kabupaten tertinggal pertumbuhannya masih buruk karena menurun dari tahun 2015-2017, kemudian 90% persentase pendapatannya cukup baik, dan 6% daerah tertinggal sudah cukup baik untuk pertumbuhan pendapatannya karena persentase pertumbuhannya sudah mencapai 51%-75%, kemudian hanya ada 1% kabupaten saja yang pertumbuhannya bisa melebihi 100%.

Kabupaten Daerah Tertinggal yang memiliki tingkat pertumbuhan yang paling tinggi adalah Kabupaten Konawe Kepulauan, dikarenakan pada tahun 2015 pertumbuhan pendapatannya mencapai 278% dimana menjadi daerah yang pertumbuhan pendapatannya sangat pesat, namun pada tahun 2016 tingkat pertumbuhan pendapatannya sebesar 12% tidak seperti tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan lagi menjadi 29%, walaupun trend yang terjadi tidak begitu bagus tapi setiap tahun Kabupaten Konawe Kepulauan tidak pernah mengalami pertumbuhan negatif.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Rasio Keuangan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal

No	Provinsi	Rasio Efektivitas	Rasio Efisiensi	Rasio Kemandirian	Rasio Pertumbuhan	RBM
1	Aceh	106%	102%	5%	14%	30%
2	Sumatera Utara	101%	99%	5%	18%	28%
3	Sumatera Barat	101%	102%	6%	14%	28%
4	Sumatera Selatan	99%	98%	7%	15%	36%
5	Bengkulu	100%	101%	4%	14%	20%
6	Lampung	101%	100%	4%	30%	37%
7	Jawa Timur	105%	101%	11%	13%	24%
8	Banten	105%	99%	13%	17%	19%
9	Nusa Tenggara Barat	105%	99%	11%	17%	22%
10	Nusa Tenggara Timur	101%	101%	7%	15%	24%
11	Kalimantan Barat	105%	100%	6%	15%	27%
12	Kalimantan Tengah	103%	100%	7%	11%	34%
13	Kalimantan Selatan	110%	104%	10%	12%	25%
14	Kalimantan Utara	105%	116%	7%	-1%	27%
15	Kalimantan Timur	76%	110%	1%	35%	33%
16	Sulawesi Tengah	105%	100%	6%	21%	26%
17	Sulawesi Selatan	104%	100%	7%	11%	19%
18	Sulawesi Tenggara	99%	100%	5%	45%	33%
19	Gorontalo	103%	100%	6%	15%	24%
20	Sulawesi Barat	108%	100%	8%	33%	31%
21	Maluku	101%	101%	3%	14%	27%
22	Maluku Utara	101%	100%	3%	24%	32%
23	Papua Barat	107%	101%	3%	13%	32%

4.1.7 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan beberapa pengujian untuk memenuhi syarat guna untuk memperoleh hasil penaksiran yang terbaik. Adapun uji yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

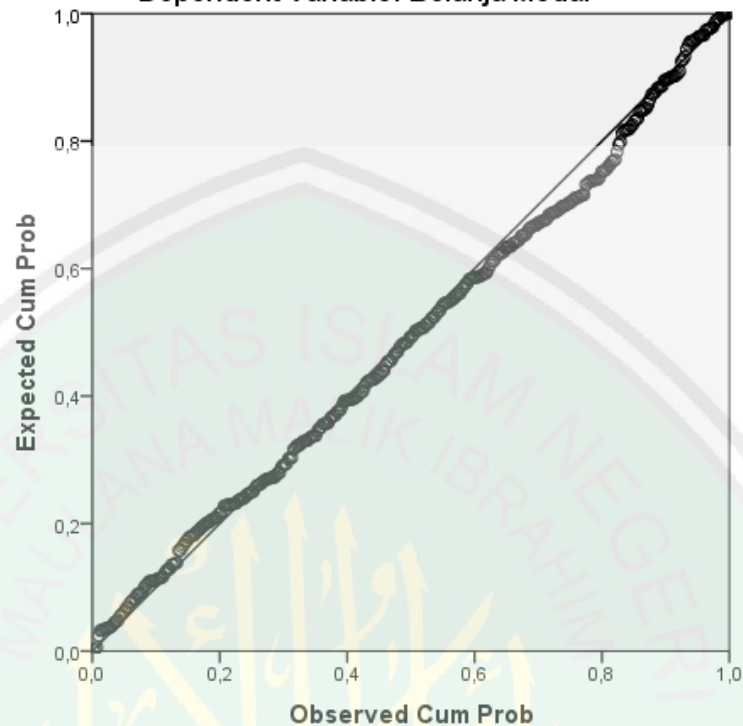
4.1.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mendekati distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal, uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan grafik P-Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal, distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal, jika distribusi normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya, selain itu pengujian juga dapat dilakukan dengan uji kolmogorov-smirnov, pada uji kolmogorov-smirnov distribusi data dinilai normal apabila $\text{sig} > 0,05$. Berikut adalah hasil uji normalitas data yang telah dilakukan.

Gambar 4.5
Hasil Uji Normalitas P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Belanja Modal



Sumber : Data diolah, 2019

Pada uji normalitas dapat dilihat grafik P-Plot bahwa penyebaran titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini dapat diartikan bahwa data terdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan tidak terjadi gejala atau masalah heteroskedastitas jika :

1. Titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0
2. Penyebaran titik-titik data tidak berpola

Berdasarkan gambar 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa pada regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastitas atau uji asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

4.1.7.2 Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui adanya multikolinearitas pada variabel bebas adalah dengan melihat nilai *tolerance* <0.10 atau sama dengan nilai VIF >10, jika nilai toleran >0.10 atau VIF <10, maka tidak terdapat multikolinearitas. Hasil pengolahan data terhadap variabel bebas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Rasio Efektivitas	,895	1,117
	Rasio Efisiensi	,927	1,079
	Rasio Kemandirian	,951	1,051
	Rasio Pertumbuhan	,888	1,126

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan data tabel di atas, keempat variabel menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas, karena nilai VIF menunjukkan angka 1,117 untuk Rasio Efektivitas, 1,079 Rasio Efisiensi, 1,051 untuk Rasio Kemandirian, 1,126 untuk Rasio Pertumbuhan dimana angka-angka tersebut menunjukkan angkanya jauh di bawah angka 10 dan nilai toleran menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

4.1.7.3 Uji Asumsi Autokorelasi

Didalam pengujian autokorelasi ialah bertujuan guna untuk menguji apakah persamaan regresi tidak terjadi korelasi. Dengan demikian didalam membuktikan tidak adanya suatu autokorelasi maka dapat dilakukan sebuah pengujian dengan

menggunakan uji Run Test berada jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi. Berikut ini ialah hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan pengujian uji Run Test ialah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Auto Korelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00120
Cases < Test Value	183
Cases >= Test Value	183
Total Cases	366
Number of Runs	166
Z	-1,884
Asymp. Sig. (2-tailed)	,060

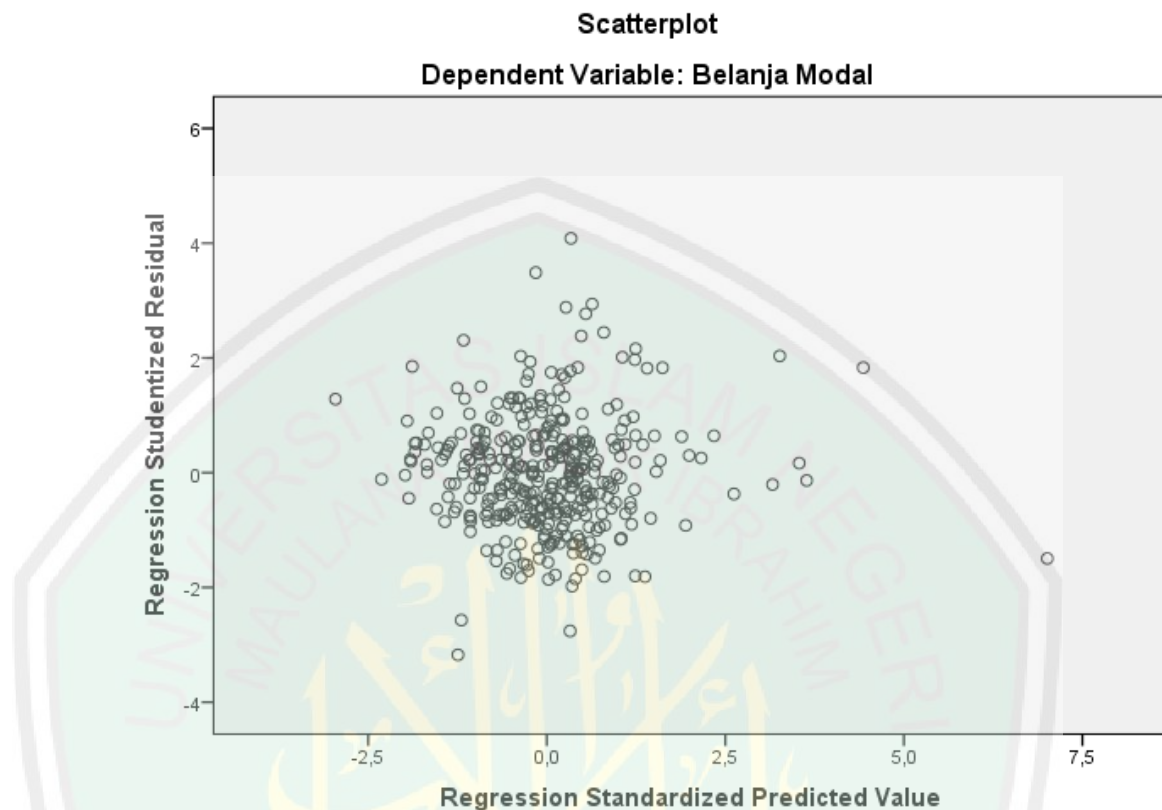
Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil tabel 4.6 diatas maka dapat diketahui bahwa hasil Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,060 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan data yang dihasilkan tidak mengandung adanya gejala autokorelasi.

4.1.7.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, Salah satu guna mendeteksi akan terjadinya hal tersebut maka dapat dilihat dari grafik *scatterplot* antara nilai prediksi suatu variabel. Hasil dari pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatterplot* didalam penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah, 2019

Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa titik data tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak memiliki pola yang jelas atau *trend* garis tertentu Maka hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada model regresi tersebut tidak terjadi adanya heteroskedastisitas, ini berarti bahwa tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dengan residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain.

4.1.8 Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) untuk mengetahui pengaruh variabel kepemilikan manajerial, kebijakan hutang dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Analisis dilakukan

dengan menggunakan SPSS 25.00 *for windows*. Rangkuman hasil analisis disajikan pada gambar berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	-,239	,077
	Rasio Efektivitas	,141	,043
	Rasio Efisiensi	,384	,058
	Rasio Kemandirian	-,768	,096
	Rasio Pertumbuhan	,136	,015

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui persamaan regresinya adalah :

$$Y = -0,239 + 0,141 X_1 + 0,384 X_2 + -0,768 X_3 + 0,136 X_4 + e$$

Berdasarkan Persamaan regresi di atas konstanta dan koefisien masing-masing tergesinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hasil dari koefisien konstanta adalah -0,239 artinya bahwa apabila variabel Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, dan Rasio Pertumbuhan perusahaan bernilai 0 maka Belanja modal akan bernilai -0,239
2. Koefisien X1 (Rasio Efektivitas) sebesar 0,141
3. Koefisien X2 (Rasio Efisiensi) sebesar 0,384
4. Koefisien X3 (Rasio Kemandirian) sebesar -0,768
5. Koefisien X4 (Rasio Pertumbuhan) sebesar 0,136

4.1.9 Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis menggunakan regresi berganda dengan melihat output SPSS dengan inisial *coefficient* untuk hipotesis satu sampai tiga dan ANOVA untuk hipotesis empat.

4.1.9.1 Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara individual atau parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat, dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} , jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-3,102	,002
	Rasio Efektivitas	3,266	,001
	Rasio Efisiensi	6,604	,000
	Rasio Kemadirian	-8,040	,000
	Rasio Pertumbuhan	8,826	,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal
Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, diperoleh hasil berikut

1. Hipotesis Pertama

Hipotesis yang diuji sebagai berikut :

H_0 : Rasio Efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

H_a : Rasio Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Kriteria Pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Jika signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak
- b. Jika signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.8 nilai t hitung 3,266 dengan signifikansi $0,001 < 0,05$ dengan demikian maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa variabel Rasio Efektivitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

2. Hipotesis Kedua

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

H_0 : Rasio Efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

H_a : Rasio Efisiensi berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal

kriteria pengujian yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak
- b. Jika signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.10 nilai t hitung 6,604 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan demikian maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa variabel Rasio Efisiensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

3. Hipotesis Ketiga

H_0 : Rasio Kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Ha : Rasio Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Kriteria pengujian yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a. Jika signifikansi $t < 0,05$ Maka H_0 ditolak
- b. Jika signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.8 nilai t hitung -8,040 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan demikian maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa variabel Rasio Kemandirian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

4. Hipotesis Keempat

H_0 : Rasio Pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Ha : Rasio Pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Kriteria pengujian yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a. Jika signifikansi $t < 0,05$ Maka H_0 ditolak
- b. Jika signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.8 nilai t hitung 8,826 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan demikian maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa variabel Rasio Pertumbuhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

4.1.9.2 Uji F (Simultan)

Untuk menguji hipotesis pengaruh persamaan regresi linier berganda secara bersama-sama digunakan uji F, Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan secara simultan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen

H_a : Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

Dari hasil analisis uji F (ANOVA) dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Simultan

ANOVA^a

	Model	F	Sig.
1	Regression	48,294	,000 ^b
	Residual		
	Total		

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis uji F, diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($48,294 > 2,45$) dengan tingkat signifikansi 0.000, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya secara bersama-sama (simultan) variabel Rasio Efektivitas (X_1), Rasio Efisiensi (X_2) dan Rasio Kemandirian (X_3) dan Rasio Pertumbuhan (X_4) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y).

3. Hasil Uji Kefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinansi

Model Summary

Model	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,341	,06646

a. Predictors: (Constant), Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,349 atau 34,9 % maka hal ini menunjukkan bahwa

variabel independen yaitu Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, dan Rasio Pertumbuhan memiliki pengaruh sebesar 34,9%, sedangkan 65,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar 4 variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Belanja Modal

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis yang disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dibuktikan dengan diketahui nilai signifikansinya $< 0,05$ yaitu sebesar 0,001 yang dimana H_1 menjadi diterima. Kemudian nilai koefisiensi pada Rasio Efektivitas terhadap Belanja Modal adalah sebesar 0,141, angka tersebut menandakan jika Belanja Modal (Y) naik sebesar 1% maka Rasio Efektivitas meningkat sebesar 14,1%. Diketahui bahwa nilai korelasi pada Rasio Efektivitas bernilai positif maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, yang berarti semakin tinggi Rasio Efektivitas pada sebuah daerah maka akan semakin meningkat juga kualitas Belanja Modalnya.

Halim (2007) menyatakan bahwa semakin besar Rasio Efektivitas yang didapatkan maka menggambarkan semakin besar pula pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini jumlah realisasi terhadap pendapatan daerah lebih besar daripada target/alokasi yang dibuat. Pernyataan tersebut mengindikasikan bila suatu keuangan daerah dikatakan efektif maka timbul asumsi daerah tersebut merealisasikan jumlah anggaran belanja modal cukup tinggi.

Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Ardhini (2011) yang menyatakan bahwa variabel Efektivitas Keuangan daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Vella (2014), dimana hasil yang ditunjukkan bahwa rasio efektivitas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap belanja modal, yang berarti pada penelitian Vella tuntutan masyarakat cenderung diabaikan sehingga pengalokasian belanja modal tidak terealisasi dengan efektif dan menghambat pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik.

4.2.2 Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Belanja Modal

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa Rasio Efisiensi berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja modal. Hal ini sudah dibuktikan dengan nilai signifikan pada Rasio Efisiensi-nya sebesar 0,00 yaitu $<0,05$ yang berarti H_2 diterima. Kemudian perolehan nilai koefisien korelasi pada Rasio Efisiensi terhadap Belanja Modal sebesar 0,384, angka tersebut menandakan jika Belanja Modal naik sebesar 1% maka Rasio Efisiensi-nya akan meningkat 38,4%. Diketahui bahwa nilai korelasi pada Rasio Efisiensi bernilai positif maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Rasio Efisiensi dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, yang berarti semakin tinggi Rasio Efisiensi pada sebuah daerah maka akan semakin meningkat juga kualitas Belanja Modalnya. Bisa dibayangkan semakin besar tingkat efisiensi daerah maka semakin besar Belanja Modal dimana sebagai pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik dan fasilitas publik pun menjadi meningkat. Penggunaan keuangan daerah yang tidak efisien dengan angka rasio yang tinggi dapat disebabkan karena jumlah realisasi pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan itu sendiri, sehingga terjadi pemborosan untuk

belanja daerah tetapi digunakan secara maksimal untuk belanja modal, seperti yang pernah oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati (2019) yang dilansir dalam Kompas.com (18 September 2019) bahwa sepanjang tahun 2019 terjadi inefisiensi pada belanja daerah dimana 75% APBD habis hanya untuk belanja gaji dan operasional tidak digunakan untuk belanja modal sehingga pembangunan di daerah menjadi berkurang.

Mardiasmo (2013) mengatakan bahwa rasio efisiensi sebagai alat untuk menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendaatan dengan realisasi pendapatan yang diterima . dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan.

Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Indratno (2017) yang menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi memiliki pengaruh signifikan terhadap dan positif Belanja Modal, dimana jika semakin tinggi nilai dari rasio efisiensi maka semakin tidak efisien terhadap suata keuangan daerah. Suatu daerah dikatakan efisien jika pengeluaran daerah lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatannya. Namun hasil penelitian ini bebanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Vella (2014) yang membuahkan hasil bahwa rasio efisiensi tidak perbengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan memberikan pengaruh yang negatif terhadap belanja modal.

4.2.3 Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Belanja Modal

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja modal. Hal ini sudah dibuktikan dengan nilai signifikan pada Rasio Kemandirian-nya sebesar 0,00 yaitu

<0,05 yang berarti H_3 diterima. Kemudian perolehan nilai koefisien korelasi pada Rasio Kemandirian terhadap Belanja Modal sebesar -0,768, angka tersebut menandakan jika Belanja Modal naik sebesar 1% maka Rasio Efisiensinya akan menurun sebesar 76,8%. Diketahui bahwa nilai korelasi pada Rasio Kemandirian bernilai negatif maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Rasio Efisiensi dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, yang berarti semakin tinggi Rasio Kemandirian pada sebuah daerah maka akan semakin menurun juga tingkat Belanja Modalnya.

Rasio Kemandirian sendiri merupakan penggambaran terhadap ketergantungan daerah pada sumber dana pemerintah pusat dan eksternal. Dimana saat pemerintah daerah menghasilkan tingkat kemandirian semakin besar maka tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat akan semakin rendah begitupun sebaliknya. Dimana dibutuhkan partisipasi oleh masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Halim, 2012).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Novianto (2016) yang menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, yang berarti apabila ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat rendah, maka kemandirian suatu daerah akan semakin tinggi. Akan tetapi jika tingkat kemandirian turun maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin tinggi. Dan dapat diindikasikan bahwa apabila PAD tinggi maka alokasi belanja modal dapat terealisasi dengan lancar.

Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Vella (2014), dalam penelitiannya menyatakan bahwa Rasio Kemandirian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

4.2.4 Pengaruh Rasio Pertumbuhan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa Rasio Pertumbuhan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja modal. Hal ini sudah dibuktikan dengan nilai signifikan pada Rasio Pertumbuhan-nya sebesar 0,00 yaitu $<0,05$ yang berarti H_4 diterima. Kemudian perolehan nilai koefisien korelasi pada Rasio Pertumbuhan terhadap Belanja Modal sebesar 0,136, angka tersebut menandakan jika Belanja Modal naik sebesar 1% maka Rasio Pertumbuhan-nya akan meningkat 13,6%. Diketahui bahwa nilai korelasi pada Rasio Pertumbuhan bernilai positif maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Rasio Pertumbuhan dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, yang berarti semakin tinggi Rasio Positif pada sebuah daerah maka akan semakin meningkat juga kualitas Belanja Modalnya.

Manfaat dari Rasio pertumbuhan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan kinerjanya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Dalam rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan keberhasilannya dari tahun ke tahun (Mahmudi 2010:138).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tamawiyw, dkk, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal. Dimana yang berarti semakin besar

PAD suatu daerah akan semakin meningkat pula anggaran belanja modal untuk investasi ke infrastruktur dan pelayanan publik.

4.2.5 Pengaruh Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi F yang $<0,05$ yaitu 0,000. Hal ini menandakan bahwa variabel Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, dan Rasio Pertumbuhan dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Ardhini (2011) yang membuktikan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Indratno (2016), dari hasil penelitiannya membuktikan bahwa Rasio Kemandirian berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Pada Rasio Pertumbuhan terhadap pendapatan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Tertinggal Di Indonesia tahun 2015-2017 yang tertera pada Peraturan Presiden No. 131 tahun 2015 yang berjumlah 122 Kabupaten Pemerintah Tertinggal dapat disimpulkan bahwa :

1. Analisis yang dilakukan pada Rasio Efektivitas bahwa variabel X_1 berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada setiap daerah tertinggal yang ada. Pengaruh signifikan tersebut ditunjukkan dengan besarnya nilai probabilitas sebesar 0,01 lebih kecil dari 0,05 hasil ini menjelaskan bahwa besar tingkat Rasio Efektivitas dalam pemerintahan daerah mempengaruhi secara signifikan terhadap Belanja Modal-nya.
2. Analisis yang dilakukan pada Rasio Efisiensi bahwa Variabel X_2 berpengaruh terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah tertinggal di Indonesia yang disebut dalam Peraturan Presiden No. 131 tahun 2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas 0,00 dimana masih kurang dari 0,05 hasil ini menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal terhadap suatu daerah.
3. Analisis pada Rasio Kemandirian bahwa variabel X_3 berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan probabilitas 0,00 masih lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 dimana membuktikan Rasio Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik

dengan kemampuan sendiri di kabupaten daerah tertinggal di Indonesia tahun 2015-2017.

4. Analisis yang dilakukan terhadap Rasio Pertumbuhan bahwa X_4 berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten daerah tertinggal di Indonesia yang disebutkan dalam Peraturan Presiden No.131 Tahun 2015, hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menjadi semakin banyak pendapatan yang didapatkan pemerintah daerah maka pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan belanja modal.
5. Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, dan Rasio Pertumbuhan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal yang ada di dalam Peraturan Presiden No.131 tahun 2015. Hasil ini dibuktikan dengan probabilitas sebesar 0,00.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang membahas tentang analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, dan Rasio Pertumbuhan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Tertinggal yang diatur dalam Peraturan Presiden No.131 tahun 2015, pada tahun 2015-2017 maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian dengan waktu yang lebih lama agar memperoleh hasil yang baik dan maksimal.
2. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel independen lain untuk mengetahui pengaruh belanja modal.
3. Periode pada penelitian dengan jangka yang lebih panjang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

- Ardhini, and Sri Handayani. 2011. "Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)." *E-Journal Undip*.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- . 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitri, Vella Kurniasih, dkk. 2014. "Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau."
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi VII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- . 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2018. "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2017." *Direktorat Jendral Perimbangan keuangan Kementrian Keuangan*. Januari 4. Accessed Oktober 1, 2019. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>.
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2015. "Peraturan Presiden No.131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019." Jakarta.
- . 2018. "Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015-2017." *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan*. Januari 4. Accessed Oktober 1, 2019. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>.
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2015. "Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." Jakarta.
- Indonesia, Republik. 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah." Jakarta.
- Indratno, Novianto. 2015. "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap ALokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal AKuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*.

- Jaellani, Aan. 2018. *Keuangan Publik Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cirebon: CV.AKSARASATU.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2011. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Martini, Kadek, and A.A.N.B Dwirandra. 2015. "Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 426-443.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazsir, Nasrullah. 2003. "Good Governance." *MediaTor*.
- Nughroho, Bagus Prihantoro. 2018. *4 Tahun Jokowi-JK dan Realisasi Nawacita*. Diakses Juli 2, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4265140/4-tahun-jokowi-jk-dan-realisisi-nawacita>.
- PDT, Ditjen. 2018. Accessed Juli 2, 2019. https://ditjenpdt.kemendesa.go.id/index.php/download/getdata/Juklak_Identifikasi_Daerah_Tertinggal.pdf.
- Santosa, Budi Purbayu, and Ashari. 2015. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tamawiwiy, Julius, and dkk. 2016. "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara)." *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*.
- Ulya, Fika Nurul Ulya. 2019. *Sri Mulyani: Lebih dari 75 Persen APBD Habis untuk Belanja Gaji dan Operasional*. September 3. Accessed Desember 7, 2019. <https://money.kompas.com/read/2019/09/18/183400726/sri-mulyani--lebih-dari-75-persen-apbd-habis-untuk-belanja-gaji-dan?page=all>.

LAMPIRAN 1

RASIO EFEKTIVITAS

No	Provinsi	Kabupaten	Realisasi Pendapatan			Anggaran Pendapatan			Rasio Efektifitas		
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Aceh	Aceh Singkil	850,413,878,936	900,925,562,780	878,765,795,658	694,333,122,732	977,495,574,664	861,799,747,532	122%	92%	102%
2	Sumatera Utara	Nias	691,021,858,642	818,455,989,242	870,868,735,873	560,862,392,525	843,699,193,240	820,788,151,600	123%	97%	106%
3	Sumatera Utara	Nias Selatan	814,895,233,565	1,008,887,209,661	1,126,563,468,536	783,248,763,730	1,093,581,486,484	1,155,658,813,692	104%	92%	97%
4	Sumatera Utara	Nias Utara	599,606,675,007	679,245,602,734	691,412,835,871	537,580,395,019	761,769,894,800	718,802,210,000	112%	89%	96%
5	Sumatera Utara	Nias Barat	465,951,797,915	534,737,998,610	645,246,701,977	440,730,510,017	599,969,151,357	618,757,577,000	106%	89%	104%
6	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	828,970,064,135	910,036,777,555	917,793,849,299	776,023,592,498	914,993,084,198	921,694,764,051	107%	99%	100%
7	Sumatera Barat	Solok Selatan	739,447,807,718	776,513,084,983	795,830,635,612	678,646,188,098	824,179,087,767	779,105,943,376	109%	94%	102%
8	Sumatera Barat	Pasaman Barat	964,985,754,753	1,069,252,362,655	1,071,634,148,008	939,134,036,107	1,116,048,551,276	1,052,893,232,129	103%	96%	102%
9	Sumatera Selatan	Musi Rawas	1,315,816,569,028	1,617,409,674,822	1,549,566,489,529	1,351,788,591,908	1,692,102,067,681	1,451,139,661,625	97%	96%	107%
10	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	616,908,301,957	813,614,247,749	785,394,510,490	785,956,006,091	765,955,016,597	778,743,609,837	88%	106%	101%
11	Bengkulu	Seluma	761,302,110,926	857,107,574,903	898,894,826,263	695,179,866,165	940,817,340,157	893,700,042,336	110%	91%	101%
12	Lampung	Lampung Barat	895,544,662,614	1,020,799,728,473	1,069,132,043,140	831,445,066,564	1,051,048,140,304	1,032,760,555,587	108%	97%	104%
13	Lampung	Pesisir Barat	570,272,841,585	738,441,026,059	813,113,164,459	564,147,307,725	777,810,366,460	805,152,479,304	101%	95%	101%
14	Jawa Timur	Bondowoso	1,800,277,754,980	1,945,061,515,768	1,924,903,618,064	1,577,180,541,787	1,892,572,354,513	1,997,934,331,830	114%	103%	96%
15	Jawa Timur	Situbondo	1,520,359,975,571	1,580,583,084,970	1,620,456,354,002	1,465,891,915,148	1,602,454,474,888	1,585,831,927,938	104%	99%	102%
16	Jawa Timur	Bangkalan	1,787,701,828,638	1,831,923,426,366	2,188,064,292,577	1,614,127,487,529	2,042,254,338,523	2,029,124,851,047	111%	90%	108%
17	Jawa Timur	Sampang	1,736,766,622,299	1,716,788,104,536	1,605,112,287,121	1,369,017,178,666	1,711,100,591,627	1,530,656,556,152	127%	100%	105%
18	Banten	Pandeglang	2,053,864,858,795	2,209,655,129,381	2,465,844,714,731	1,902,563,647,122	2,352,809,015,733	2,338,321,204,403	108%	94%	105%
19	Banten	Lebak	2,237,617,202,823	2,496,433,196,983	2,421,101,201,524	2,058,332,728,093	2,430,943,538,785	2,170,208,283,564	109%	103%	112%
20	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	1,325,716,985,826	1,473,782,176,796	1,699,564,338,547	1,280,761,936,262	1,575,142,075,411	1,603,198,969,453	104%	94%	106%
21	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	1,631,526,898,990	1,930,329,082,306	1,917,035,737,683	1,534,611,663,967	1,850,273,150,913	1,833,758,150,546	106%	104%	105%
22	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	2,007,874,626,136	2,223,806,974,773	2,546,025,461,403	2,013,251,110,029	2,378,105,008,830	2,374,972,190,918	100%	94%	107%
23	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	1,305,142,444,242	1,526,355,151,257	1,675,057,372,641	1,253,293,706,997	1,523,348,649,842	1,590,214,773,021	104%	100%	105%
24	Nusa Tenggara Barat	Dompus	893,104,643,558	1,067,788,714,384	1,034,675,441,821	858,433,814,544	1,096,188,044,433	977,982,495,673	104%	97%	106%
25	Nusa Tenggara Barat	Bima	1,361,625,002,414	1,620,415,397,471	1,686,871,253,543	1,323,141,625,981	1,623,870,195,569	1,639,840,143,343	103%	100%	103%
26	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	717,820,585,541	1,184,889,344,718	1,238,784,568,470	748,850,411,380	825,527,786,000	1,073,576,498,456	96%	144%	115%
27	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	652,342,627,548	841,683,230,410	933,470,378,207	611,256,527,368	803,825,755,501	841,683,230,410	107%	105%	111%
28	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	558,419,635,103	684,718,366,542	691,828,976,922	528,068,999,639	671,894,070,924	659,669,678,235	106%	102%	105%
29	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	891,412,853,226	1,072,364,499,689	1,112,641,678,253	845,121,083,238	1,119,365,077,870	1,145,843,062,758	105%	96%	97%
30	Nusa Tenggara Timur	Kupang	1,020,930,686,935	1,170,495,473,428	1,012,865,185,735	964,338,114,435	1,264,875,936,339	1,222,105,009,920	106%	93%	83%
31	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	1,075,717,057,486	1,201,549,701,401	1,418,915,734,541	1,006,796,491,855	1,299,428,824,494	1,332,832,992,621	107%	92%	106%
32	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	783,648,995,960	918,557,400,999	1,009,891,096,664	729,988,262,248	969,368,918,043	980,889,251,249	107%	95%	103%
33	Nusa Tenggara Timur	Belu	738,626,408,498	816,442,053,570	959,717,412,277	720,134,205,348	873,586,718,598	905,473,482,012	103%	93%	106%
34	Nusa Tenggara Timur	Alor	801,557,533,786	952,731,960,673	1,061,267,152,574	783,118,946,295	1,034,670,646,227	1,011,677,456,545	102%	92%	105%
35	Nusa Tenggara Timur	Lembata	593,829,248,271	739,343,686,647	731,606,447,233	585,249,520,370	803,331,454,440	724,419,795,222	101%	92%	101%
36	Nusa Tenggara Timur	Ende	922,465,715,436	1,156,247,543,981	1,104,000,563,286	861,623,033,376	1,251,378,591,000	1,112,349,404,856	107%	92%	99%
37	Nusa Tenggara Timur	Manggarai	964,309,098,400	1,068,340,708,429	1,111,538,011,521	827,974,240,529	1,114,361,461,393	1,118,433,462,837	116%	96%	99%
38	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	595,074,466,261	708,870,066,414	739,924,285,730	562,202,287,719	728,179,106,574	720,275,502,554	106%	97%	103%
39	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	764,394,719,032	882,145,842,702	1,014,699,926,732	713,709,566,500	860,375,534,578	1,040,438,581,791	107%	103%	98%
40	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	476,442,291,034	541,880,181,101	912,154,028,640	438,813,645,562	563,062,610,835	842,393,401,327	109%	96%	108%
41	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	721,629,396,753	837,653,147,107	539,692,767,874	645,744,704,477	870,512,205,644	538,515,644,068	112%	96%	100%
42	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	629,109,735,892	722,085,467,323	759,738,196,695	569,855,642,000	756,992,910,000	708,735,590,697	110%	95%	107%
43	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	717,290,747,474	862,639,611,622	917,693,081,095	660,252,406,936	861,126,225,294	909,757,060,419	109%	100%	101%
44	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	496,500,601,842	557,409,054,657	536,631,907,057	480,767,493,203	587,524,830,466	632,991,942,372	103%	95%	85%
45	Nusa Tenggara Timur	Malaka	595,360,001,844	658,502,838,380	823,512,988,697	575,892,691,125	760,257,387,755	758,557,210,533	103%	87%	109%
46	Kalimantan Barat	Sambas	1,401,587,116,679	1,530,823,553,222	1,634,003,310,584	1,284,452,405,757	1,583,663,654,609	1,558,558,548,399	109%	97%	105%
47	Kalimantan Barat	Bengkayang	1,007,260,806,268	1,051,895,262,951	1,078,309,146,536	827,461,560,040	1,034,286,018,056	1,046,954,509,336	122%	102%	103%
48	Kalimantan Barat	Landak	1,195,875,550,369	1,390,184,067,711	1,287,252,892,337	968,510,588,764	1,289,255,217,205	1,246,059,101,956	124%	108%	103%
49	Kalimantan Barat	Ketapang	1,814,062,083,457	1,897,853,562,079	1,995,921,830,320	1,680,635,135,059	1,925,188,035,797	2,011,113,435,123	108%	99%	99%

50	Kalimantan Barat	Sintang	1,498,619,777,710	1,674,585,588,493	1,950,621,461,745	1,265,830,959,065	1,708,582,551,431	1,782,326,000,000	118%	98%	109%
51	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	1,452,312,446,376	1,707,744,597,979	1,684,886,337,565	1,274,982,240,125	1,650,818,307,169	1,619,177,580,000	114%	103%	104%
52	Kalimantan Barat	Melawi	927,933,293,881	1,056,879,459,342	1,179,424,697,833	952,142,097,798	1,103,042,985,212	1,195,230,065,533	97%	96%	99%
53	Kalimantan Barat	Kayong Utara	603,308,230,337	700,472,770,108	785,939,457,932	592,092,844,249	739,201,560,932	770,584,446,201	102%	95%	102%
54	Kalimantan Tengah	Seruyan	825,525,393,207	1,042,119,074,996	1,100,045,651,364	801,983,747,079	1,086,905,093,636	1,009,574,707,949	103%	96%	109%
55	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	1,108,140,034,869	1,205,304,880,764	1,082,545,967,503	949,843,969,238	1,255,637,476,969	916,511,771,318	117%	96%	118%
56	Kalimantan Utara	Nunukan	1,070,054,692,915	1,294,495,293,887	1,191,484,412,627	889,912,725,750	1,277,505,134,909	1,291,768,587,267	120%	101%	92%
57	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	951,200,452,769	1,128,641,631,082	986,212,193,019	1,428,954,891,000	1,454,295,024,780	1,187,750,450,688	67%	78%	83%
58	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	606,230,528,648	704,938,364,829	764,650,292,158	594,982,945,600	747,757,349,260	727,982,362,000	102%	94%	105%
59	Sulawesi Tengah	Donggala	1,084,867,390,074	1,266,899,313,486	1,136,703,943,699	932,351,643,196	1,238,803,665,193	1,122,468,503,140	116%	102%	101%
60	Sulawesi Tengah	Toli-Toli	865,458,406,270	924,983,000,832	1,107,426,358,311	796,657,583,678	981,363,676,655	1,055,244,981,866	109%	94%	105%
61	Sulawesi Tengah	Buol	834,939,991,971	902,028,567,650	938,746,232,817	677,163,510,861	979,548,488,844	910,477,452,982	123%	92%	103%
62	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	1,168,381,299,784	1,469,285,280,816	1,449,457,798,008	1,046,698,363,558	1,402,094,204,534	1,365,137,682,601	112%	105%	106%
63	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	909,862,959,691	1,062,566,334,258	961,582,935,289	759,406,613,352	1,050,415,681,953	945,517,347,526	120%	101%	102%
64	Sulawesi Tengah	Sigi	933,843,013,699	1,212,221,064,331	1,097,233,335,812	824,945,407,603	1,142,407,409,440	1,063,592,134,766	113%	106%	103%
65	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	464,487,460,750	549,817,139,480	619,309,793,634	438,519,923,000	579,715,126,290	582,285,334,772	106%	95%	106%
66	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	703,807,802,272	869,147,172,888	889,947,144,146	681,053,111,342	860,952,034,509	895,434,296,869	103%	101%	99%
67	Sulawesi Selatan	Jeneponto	1,044,672,889,369	1,261,885,034,967	1,088,513,971,052	917,138,054,366	1,262,032,636,356	1,120,694,974,784	114%	100%	97%
68	Sulawesi Tenggara	Konawe	1,076,320,162,517	1,174,856,947,154	1,256,254,769,298	1,012,891,181,138	1,273,195,541,832	1,462,337,767,140	106%	92%	86%
69	Sulawesi Tenggara	Bombana	727,175,099,315	850,047,395,243	852,646,804,773	687,401,130,594	869,091,504,967	790,351,238,916	106%	98%	108%
70	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	453,975,551,401	510,243,752,284	658,749,595,060	438,688,586,955	555,516,342,039	632,466,721,611	103%	92%	104%
71	Gorontalo	Boalemo	710,800,689,088	785,937,545,311	844,634,717,802	605,652,926,941	849,666,302,725	789,842,218,875	117%	92%	107%
72	Gorontalo	Pohuwato	726,832,241,699	862,253,451,273	822,135,259,820	682,648,716,527	859,192,063,777	814,526,348,200	106%	100%	101%
73	Gorontalo	Gorontalo Utara	546,394,919,913	682,605,027,140	727,347,077,444	513,330,306,562	736,728,702,976	726,026,843,000	106%	93%	100%
74	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	1,081,510,420,173	1,296,792,509,812	1,331,125,381,015	1,021,671,092,082	1,315,581,708,124	1,239,183,591,571	106%	99%	107%
75	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	534,771,870,159	632,381,748,713	616,641,469,808	451,586,544,243	613,175,868,739	535,937,252,271	118%	103%	115%
76	Maluku	Maluku Tenggara Barat	804,995,958,815	878,636,786,247	907,927,111,407	730,872,996,501	996,236,486,277	921,678,589,827	110%	88%	99%
77	Maluku	Maluku Tengah	1,334,284,719,874	1,598,506,441,056	1,623,326,798,903	1,268,001,745,340	1,570,058,724,250	1,581,193,729,000	105%	102%	103%
78	Maluku	Buru	665,143,171,888	846,537,025,157	794,529,154,762	613,041,115,918	894,416,990,971	778,050,578,747	108%	95%	102%
79	Maluku	Kepulauan Aru	719,574,359,556	830,046,000,560	948,283,736,625	655,007,601,837	879,524,011,931	988,275,530,000	110%	94%	96%
80	Maluku	Seram Bagian Barat	784,059,811,779	886,169,442,009	941,306,675,349	742,980,648,992	954,307,338,549	932,775,809,685	106%	93%	101%
81	Maluku	Seram Bagian Timur	792,559,830,443	885,931,332,275	1,031,283,290,040	655,928,951,816	930,792,234,521	981,223,497,466	121%	95%	105%
82	Maluku	Maluku Barat Daya	757,460,940,348	849,315,305,461	995,609,326,719	757,225,079,000	906,294,309,198	1,049,700,093,712	100%	94%	95%
83	Maluku	Buru Selatan	596,807,809,142	737,338,844,047	605,625,487,281	549,598,124,700	756,003,764,000	661,033,153,000	109%	98%	92%
84	Maluku Utara	Halmahera Barat	704,587,957,352	927,913,123,587	802,531,665,206	649,446,499,873	906,926,189,000	862,945,403,000	108%	102%	93%
85	Maluku Utara	Kepulauan Sula	710,636,827,515	779,665,951,803	771,152,404,275	618,203,749,693	869,978,522,991	756,907,340,000	115%	90%	102%
86	Maluku Utara	Halmahera Selatan	915,988,905,657	1,170,143,986,472	1,282,415,448,378	790,326,721,079	1,252,276,123,000	1,258,260,237,464	116%	93%	102%
87	Maluku Utara	Halmahera Timur	615,254,735,087	807,541,937,092	865,169,488,089	611,014,838,099	821,510,954,517	890,834,459,797	101%	98%	97%
88	Maluku Utara	Pulau Morotai	725,685,958,887	812,661,101,995	640,506,962,379	777,062,398,802	644,636,875,490	665,200,230,250	93%	95%	96%
89	Maluku Utara	Pulai Taliabu	442,411,903,039	559,704,718,736	594,835,450,625	412,722,399,922	615,369,582,000	528,095,488,000	107%	91%	113%
90	Papua Barat	Teluk Wondama	684,439,392,858	777,305,598,899	761,810,519,371	664,960,897,424	796,560,133,479	757,635,588,820	103%	98%	101%
91	Papua Barat	Teluk Bintuni	1,755,790,186,094	1,846,327,647,967	1,989,802,111,850	1,315,910,847,711	1,651,502,165,982	1,594,735,720,795	133%	112%	125%
92	Papua Barat	Sorong Selatan	804,318,806,437	892,175,022,073	868,080,681,928	726,070,679,720	941,301,481,960	849,294,827,146	111%	95%	102%
93	Papua Barat	Sorong	1,431,608,358,225	1,429,486,253,385	1,616,710,353,686	1,219,635,198,954	1,568,260,964,800	1,330,069,777,000	117%	91%	122%
94	Papua Barat	Raja Ampat	1,145,654,333,610	1,203,550,369,341	1,163,452,153,394	992,163,237,000	1,330,282,683,640	1,300,963,467,000	115%	90%	89%
95	Papua Barat	Tambrau	934,452,254,367	1,043,517,114,923	994,649,599,740	782,663,908,771	1,059,902,529,843	896,926,377,000	119%	98%	111%
96	Papua Barat	Maybrat	745,358,695,228	934,477,666,689	1,005,510,324,624	684,744,202,000	956,282,360,000	958,445,579,272	109%	98%	105%
97	Papua	Merauke	1,999,919,120,107	1,967,057,544,124	1,894,986,652,311	1,897,577,116,360	2,207,070,374,681	2,043,305,163,409	105%	89%	93%
98	Papua	Jayawijaya	1,335,006,059,942	1,467,240,987,034	1,496,028,526,952	1,159,480,822,000	1,428,833,550,443	1,512,464,164,262	115%	103%	99%
99	Papua	Nabire	1,188,833,024,802	1,269,110,037,027	1,231,469,575,077	1,046,920,087,373	1,281,727,377,628	1,158,039,722,000	114%	99%	106%
100	Papua	Kepulauan Yapen	1,034,831,629,513	1,084,069,954,816	1,091,604,398,514	880,333,559,554	1,172,101,449,693	1,069,357,177,965	118%	92%	102%
101	Papua	Biak Numfor	1,101,440,280,711	1,130,264,813,416	1,198,940,142,862	1,000,382,718,122	1,444,706,962,300	1,370,342,850,205	110%	78%	87%
102	Papua	Paniai	958,842,153,734	1,158,328,501,543	1,247,819,810,080	881,946,756,095	1,159,110,231,260	1,154,197,896,644	109%	100%	108%
103	Papua	Puncak Jaya	1,265,331,724,690	1,423,942,875,241	1,259,626,254,346	1,205,075,873,343	1,506,571,904,766	1,365,252,818,470	105%	95%	92%
104	Papua	Boven Digoel	1,110,324,913,451	1,269,334,150,797	1,258,305,009,204	1,118,859,940,000	1,252,746,929,587	1,247,985,737,741	99%	101%	101%

LAMPIRAN 2

RASIO EFISIENSI

No	Provinsi	Kabupaten	Belanja			Pendapatan			Rasio Efisiensi Keuangan		
			Realisasi			Realisasi					
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Aceh	Aceh Singkil	842,638,293,356	967,082,630,925	877,753,807,056	850,413,878,936	900,925,562,780	878,765,795,658	99%	107%	100%
2	Sumatera Utara	Nias	666,992,376,342	796,586,640,124	881,983,873,162	691,021,858,642	818,455,989,242	870,868,735,873	97%	97%	101%
3	Sumatera Utara	Nias Selatan	855,252,081,779	810,002,815,633	1,066,164,746,908	814,895,233,565	1,008,887,209,661	1,126,563,468,536	105%	80%	95%
4	Sumatera Utara	Nias Utara	615,651,186,431	701,361,503,469	722,898,158,998	599,606,675,007	679,245,602,734	691,412,835,871	103%	103%	105%
5	Sumatera Utara	Nias Barat	486,878,120,018	563,084,915,466	634,418,292,759	465,951,797,915	534,737,998,610	645,246,701,977	104%	105%	98%
6	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	840,151,497,974	990,803,893,245	1,011,688,194,889	828,970,064,135	910,036,777,555	917,793,849,299	101%	109%	110%
7	Sumatera Barat	Solok Selatan	703,395,983,375	814,299,953,923	815,718,098,390	739,447,807,718	776,513,084,983	795,830,635,612	95%	105%	102%
8	Sumatera Barat	Pasaman Barat	909,853,751,901	1,060,377,597,620	1,116,860,825,972	964,985,754,753	1,069,252,362,655	1,071,634,148,008	94%	99%	104%
9	Sumatera Selatan	Musi Rawas	1,409,669,541,374	1,526,168,541,789	1,443,832,402,491	1,315,816,569,028	1,617,409,674,822	1,549,566,489,529	107%	94%	93%
10	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	670,724,435,161	720,301,758,791	762,371,904,143	616,908,301,957	813,614,247,749	785,394,510,490	109%	89%	97%
11	Bengkulu	Seluma	754,429,160,650	900,417,696,803	876,754,476,118	761,302,110,926	857,107,574,903	898,894,826,263	99%	105%	98%
12	Lampung	Lampung Barat	893,360,816,780	999,084,481,888	1,122,380,535,135	895,544,662,614	1,020,799,728,473	1,069,132,043,140	100%	98%	105%
13	Lampung	Pesisir Barat	550,986,272,803	732,750,194,933	811,738,309,195	570,272,841,585	738,441,026,059	813,113,164,459	97%	99%	100%
14	Jawa Timur	Bondowoso	1,776,098,167,403	1,992,640,093,665	1,935,627,796,905	1,800,277,754,980	1,945,061,615,768	1,924,903,618,064	99%	102%	101%
15	Jawa Timur	Situbondo	1,480,028,872,079	1,659,809,374,323	1,611,319,203,889	1,520,359,975,571	1,580,583,084,970	1,620,456,354,002	97%	105%	99%
16	Jawa Timur	Bangkalan	1,838,357,542,933	1,944,897,677,149	2,009,248,055,038	1,787,701,828,638	1,831,923,426,366	2,188,064,292,577	103%	106%	92%
17	Jawa Timur	Sampang	1,704,171,539,547	1,778,548,485,251	1,663,946,531,152	1,736,766,622,299	1,716,788,104,536	1,605,112,287,121	98%	104%	104%
18	Banten	Pandeglang	2,037,028,432,385	2,215,360,536,783	2,537,861,072,039	2,053,864,858,795	2,209,655,129,381	2,465,844,714,731	99%	100%	103%
19	Banten	Lebak	2,092,695,058,672	2,434,575,832,324	2,481,358,755,906	2,237,617,202,823	2,496,433,196,983	2,421,101,201,524	94%	98%	102%
20	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	1,351,213,319,266	1,484,537,233,746	1,668,418,316,827	1,325,716,985,826	1,473,782,176,796	1,699,564,338,547	102%	101%	98%
21	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	1,549,692,154,035	1,832,981,039,172	1,930,401,187,346	1,631,526,898,990	1,930,329,082,306	1,917,035,737,683	95%	95%	101%
22	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	2,118,495,969,979	2,198,829,143,491	2,434,255,556,547	2,007,874,626,136	2,223,806,974,773	2,546,025,461,403	106%	99%	96%
23	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	1,329,968,305,104	1,485,764,542,538	1,730,576,904,224	1,305,142,444,242	1,526,355,151,257	1,675,057,372,641	102%	97%	103%
24	Nusa Tenggara Barat	Dompu	866,967,571,072	1,028,864,787,587	1,071,193,115,940	893,104,643,558	1,067,788,714,384	1,034,675,441,821	97%	96%	104%
25	Nusa Tenggara Barat	Bima	1,332,703,166,398	1,604,853,577,166	1,662,901,947,395	1,361,625,002,414	1,620,415,397,471	1,686,871,253,543	98%	99%	99%
26	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	697,655,124,536	977,362,494,176	1,365,507,516,308	717,820,585,541	1,184,889,344,718	1,238,784,568,470	97%	82%	110%
27	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	662,039,757,343	878,514,142,478	904,710,295,806	652,342,627,548	841,683,230,410	933,470,378,207	101%	104%	97%
28	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	552,830,396,513	713,327,034,810	715,858,189,842	558,419,635,103	684,718,366,542	691,828,976,922	99%	104%	103%
29	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	897,350,760,740	1,057,369,125,121	1,138,147,670,761	891,412,853,226	1,072,364,499,689	1,112,641,678,253	101%	99%	102%
30	Nusa Tenggara Timur	Kupang	992,065,739,354	1,379,301,640,936	1,220,116,670,345	1,020,930,686,935	1,170,495,473,428	1,012,865,185,735	97%	118%	120%
31	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	1,065,979,171,277	1,300,559,536,339	1,392,555,153,413	1,075,717,057,486	1,201,549,701,401	1,418,915,734,541	99%	108%	98%
32	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	793,401,082,634	947,715,920,343	944,567,699,174	783,648,995,960	918,557,400,999	1,009,891,096,664	101%	103%	94%
33	Nusa Tenggara Timur	Belu	757,893,231,506	834,489,268,773	939,748,398,806	738,626,408,498	816,442,053,570	959,717,412,277	103%	102%	98%
34	Nusa Tenggara Timur	Alor	780,956,416,784	996,729,816,873	1,070,497,501,538	801,557,533,786	952,731,960,673	1,061,267,152,574	97%	105%	101%
35	Nusa Tenggara Timur	Lembata	600,745,819,595	785,427,150,147	738,444,560,948	593,829,248,271	739,343,686,647	731,606,447,233	101%	106%	101%
36	Nusa Tenggara Timur	Ende	920,349,547,820	1,144,021,726,043	1,192,686,457,265	922,465,715,436	1,156,247,543,981	1,104,000,563,286	100%	99%	108%
37	Nusa Tenggara Timur	Manggarai	964,934,871,703	1,114,586,408,405	1,057,288,789,495	964,309,098,400	1,068,340,708,429	1,111,538,011,521	100%	104%	95%
38	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	600,845,953,602	713,329,441,477	717,309,409,324	595,074,466,261	708,870,066,414	739,924,285,730	101%	101%	97%
39	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	752,180,221,797	902,795,674,652	1,051,883,092,665	764,394,719,032	882,145,842,702	1,014,699,926,732	98%	102%	104%
40	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	483,683,750,527	569,477,418,807	940,218,256,464	476,442,291,034	541,880,181,101	912,154,028,640	102%	105%	103%
41	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	736,692,822,643	835,803,928,842	541,185,072,291	721,629,396,753	837,653,147,107	539,692,767,874	102%	100%	100%
42	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	612,658,139,494	775,936,291,839	736,553,625,110	629,109,735,892	722,085,467,323	759,738,196,695	97%	107%	97%
43	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	715,710,123,834	856,581,882,122	921,996,668,717	717,290,747,474	862,639,611,622	917,693,081,095	100%	99%	100%
44	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	571,319,182,799	589,684,591,077	448,619,128,291	496,500,601,842	557,409,054,657	536,631,907,057	115%	106%	84%
45	Nusa Tenggara Timur	Malaka	502,393,102,208	705,984,084,768	826,431,213,709	595,360,001,844	658,502,838,380	823,512,988,697	84%	107%	100%
46	Kalimantan Barat	Sambas	1,421,885,401,357	1,589,219,116,680	1,638,897,259,025	1,401,587,116,679	1,530,823,553,222	1,634,003,339,884	101%	104%	100%

47	Kalimantan Barat	Bengkayang	959,476,484,007	1,103,426,346,665	1,089,671,110,777	1,007,260,806,268	1,051,895,262,951	1,078,309,146,536	95%	105%	101%
48	Kalimantan Barat	Landak	1,209,213,551,201	1,417,981,308,384	1,288,441,667,966	1,195,875,550,369	1,390,184,006,711	1,287,252,892,337	101%	102%	100%
49	Kalimantan Barat	Ketapang	1,849,286,998,873	1,951,143,200,045	1,993,617,873,645	1,814,062,083,457	1,897,853,562,079	1,995,921,830,320	102%	103%	100%
50	Kalimantan Barat	Sintang	1,481,302,835,124	1,743,529,977,056	1,884,197,672,259	1,498,619,777,710	1,674,585,588,493	1,950,621,461,745	99%	104%	97%
51	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	1,421,570,042,815	1,716,356,551,973	1,651,954,428,417	1,452,312,446,376	1,707,744,597,979	1,684,886,337,565	98%	101%	98%
52	Kalimantan Barat	Melawi	877,214,502,340	1,016,611,450,960	1,173,295,936,173	927,933,293,881	1,056,879,459,342	1,179,424,697,833	95%	96%	99%
53	Kalimantan Barat	Kayong Utara	600,436,070,094	713,279,751,412	792,645,448,038	603,308,230,337	700,472,770,108	785,939,457,932	100%	102%	101%
54	Kalimantan Tengah	Seruyan	878,970,056,362	1,022,117,647,748	1,047,643,987,088	825,525,393,207	1,042,119,074,996	1,100,045,651,364	106%	98%	95%
55	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	1,096,539,884,203	1,308,037,433,406	1,125,469,401,994	1,108,140,034,869	1,205,304,880,764	1,082,545,967,503	99%	109%	104%
56	Kalimantan Utara	Nunukan	1,570,310,675,114	1,255,180,324,513	1,232,585,579,338	1,070,054,692,915	1,294,495,293,887	1,191,484,412,627	147%	97%	103%
57	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	1,152,521,703,818	976,867,273,947	1,206,169,389,764	951,200,452,769	1,128,641,631,082	986,212,193,019	121%	87%	122%
58	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	606,794,119,127	733,498,922,955	821,976,102,236	606,230,528,648	704,938,364,829	764,650,292,158	100%	104%	107%
59	Sulawesi Tengah	Donggala	1,052,255,558,571	1,280,361,008,487	1,152,661,267,833	1,084,867,390,074	1,266,899,313,486	1,136,703,943,699	97%	101%	101%
60	Sulawesi Tengah	Toli-Toli	865,617,496,449	946,614,742,534	1,100,849,886,269	865,458,406,270	924,983,000,832	1,107,426,358,311	100%	102%	99%
61	Sulawesi Tengah	Buol	812,062,985,589	953,368,636,441	935,356,140,152	834,939,991,971	902,028,567,650	938,746,232,817	97%	106%	100%
62	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	1,187,517,575,300	1,461,272,504,564	1,439,423,292,730	1,168,381,299,784	1,469,285,280,816	1,449,457,798,008	102%	99%	99%
63	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	909,636,793,178	1,059,845,754,278	975,362,670,106	909,862,959,691	1,062,566,334,258	961,582,935,289	100%	100%	101%
64	Sulawesi Tengah	Sigi	958,591,664,044	1,213,399,594,328	1,084,234,206,277	933,843,013,699	1,212,221,064,331	1,097,233,335,812	103%	100%	99%
65	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	430,742,230,111	523,149,371,470	583,627,646,002	464,487,460,750	549,817,139,480	619,309,793,634	93%	95%	94%
66	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	690,649,889,434	846,561,507,696	937,077,581,668	703,807,802,272	869,147,172,888	889,947,144,146	98%	97%	105%
67	Sulawesi Selatan	Jeneponto	1,016,032,203,915	1,245,329,180,304	1,136,700,077,474	1,044,672,889,369	1,261,885,034,967	1,088,513,971,052	97%	99%	104%
68	Sulawesi Tenggara	Konawe	1,051,693,541,233	1,189,502,020,486	1,377,460,241,801	1,076,320,162,517	1,174,856,947,154	1,256,254,769,298	98%	101%	110%
69	Sulawesi Tenggara	Bombana	727,924,500,074	860,382,991,633	834,587,056,809	727,175,099,315	850,047,395,243	852,646,804,773	100%	101%	98%
70	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	397,766,077,925	524,672,596,578	669,561,764,858	453,975,551,401	510,243,752,284	658,749,595,060	88%	103%	102%
71	Gorontalo	Boalemo	688,156,716,089	838,054,468,892	810,656,600,276	710,800,689,088	785,937,545,311	844,634,717,802	97%	107%	96%
72	Gorontalo	Pohuwato	731,495,559,146	834,239,804,434	851,949,712,432	726,832,241,699	862,253,451,273	822,135,259,820	101%	97%	104%
73	Gorontalo	Gorontalo Utara	567,723,939,013	676,214,551,793	711,893,453,557	546,394,919,913	682,605,027,140	727,347,077,444	104%	99%	98%
74	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	1,062,886,807,074	1,342,260,337,745	1,328,359,032,532	1,081,510,420,173	1,296,792,509,812	1,331,125,381,015	98%	104%	100%
75	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	499,478,410,976	678,593,002,406	600,869,472,482	534,771,870,159	632,381,748,713	616,641,469,808	93%	107%	97%
76	Maluku	Maluku Tenggara Barat	793,475,841,413	894,167,686,096	917,898,537,447	804,995,958,815	878,636,786,247	907,927,111,407	99%	102%	101%
77	Maluku	Maluku Tengah	1,381,150,797,844	1,631,674,780,744	1,629,020,559,213	1,334,284,719,874	1,598,506,441,056	1,623,326,798,903	104%	102%	100%
78	Maluku	Buru	667,178,761,550	845,802,102,471	784,365,064,016	665,143,171,888	846,537,025,157	794,529,154,762	100%	100%	99%
79	Maluku	Kepulauan Aru	658,900,206,319	885,499,359,986	1,016,898,887,356	719,574,359,556	830,046,700,560	948,283,736,625	92%	107%	107%
80	Maluku	Seram Bagian Barat	836,956,841,059	912,091,263,272	956,959,343,085	784,059,811,779	886,169,442,009	941,306,675,349	107%	103%	102%
81	Maluku	Seram Bagian Timur	840,446,524,665	892,238,711,864	1,050,105,224,861	792,559,830,443	885,931,332,275	1,031,283,290,040	106%	101%	102%
82	Maluku	Maluku Barat Daya	655,273,525,350	834,109,425,515	1,051,640,318,303	757,460,940,348	849,315,305,461	995,609,326,719	87%	98%	106%
83	Maluku	Buru Selatan	606,886,957,556	731,605,249,973	659,974,284,626	596,807,809,142	737,338,844,047	605,625,487,281	102%	99%	109%
84	Maluku Utara	Halmahera Barat	701,599,718,802	904,691,302,360	925,780,861,479	704,587,957,352	927,913,123,587	802,531,665,206	100%	97%	115%
85	Maluku Utara	Kepulauan Sula	649,158,970,852	810,882,918,201	793,550,373,557	710,636,827,515	779,665,951,803	771,152,404,275	91%	104%	103%
86	Maluku Utara	Halmahera Selatan	946,585,154,516	1,149,092,600,807	1,246,890,703,554	915,988,905,657	1,170,143,986,472	1,282,415,448,378	103%	98%	97%
87	Maluku Utara	Halmahera Timur	640,951,028,305	762,158,310,683	898,610,880,488	615,254,735,087	807,541,937,092	865,169,488,089	104%	94%	104%
88	Maluku Utara	Pulau Morotai	693,579,657,171	635,826,775,732	619,779,782,071	725,685,958,887	612,469,101,995	640,506,962,379	96%	104%	97%
89	Maluku Utara	Pulai Taliabu	410,499,413,804	569,739,490,187	576,704,930,869	442,411,903,039	559,704,718,736	594,835,450,625	93%	102%	97%
90	Papua Barat	Teluk Wondama	746,535,108,523	772,717,434,746	759,511,975,643	684,439,392,858	777,305,598,899	761,810,519,371	109%	99%	100%
91	Papua Barat	Teluk Bintuni	1,993,846,234,934	2,095,321,406,358	2,065,214,652,925	1,755,790,186,094	1,846,327,647,967	1,989,802,111,850	114%	113%	104%
92	Papua Barat	Sorong Selatan	788,442,153,519	917,470,296,763	877,227,244,351	804,318,806,437	892,175,022,073	868,080,681,928	98%	103%	101%
93	Papua Barat	Sorong	1,641,387,849,484	1,376,265,286,621	1,344,221,381,881	1,431,608,358,225	1,429,486,253,385	1,616,710,353,686	115%	96%	83%
94	Papua Barat	Raja Ampat	1,089,326,941,516	1,160,448,875,617	1,175,869,638,388	1,145,654,333,610	1,203,550,369,341	1,163,452,153,394	95%	96%	101%
95	Papua Barat	Tambrauw	909,595,535,756	1,112,432,614,439	946,283,268,535	934,452,254,367	1,043,517,114,923	994,649,599,740	97%	107%	95%
96	Papua Barat	Maybrat	807,315,350,414	975,788,046,248	919,084,754,822	745,358,695,228	934,477,636,689	1,005,510,324,624	108%	104%	91%
97	Papua	Merauke	2,039,480,776,078	1,823,039,429,682	2,003,830,251,280	1,999,919,120,107	1,967,057,544,124	1,894,986,652,311	102%	93%	106%
98	Papua	Jayawijaya	1,371,967,959,217	1,447,470,814,097	1,571,708,700,493	1,335,006,059,942	1,467,240,987,034	1,496,028,526,952	103%	99%	105%

99	Papua	Nabire	1,175,832,773,777	1,191,399,054,279	1,267,066,048,547	1,188,833,024,802	1,269,110,037,027	1,231,469,575,077	99%	94%	103%
100	Papua	Kepulauan Yapen	932,281,689,054	1,141,953,801,072	1,051,952,862,723	1,034,831,629,513	1,084,069,954,816	1,091,604,398,514	90%	105%	96%
101	Papua	Biak Numfor	1,036,233,609,781	1,269,134,422,675	1,028,274,664,938	1,101,440,280,711	1,130,264,813,416	1,198,940,142,862	94%	112%	86%
102	Papua	Paniai	921,305,412,972	1,175,579,926,203	1,226,854,902,477	958,842,153,734	1,158,328,501,543	1,247,819,810,080	96%	101%	98%
103	Papua	Puncak Jaya	1,214,560,032,146	1,483,719,759,893	1,231,309,263,977	1,265,331,724,690	1,423,942,875,241	1,259,626,254,346	96%	104%	98%
104	Papua	Boven Digoel	1,061,432,976,370	1,136,518,384,220	1,231,853,113,606	1,110,324,913,451	1,269,334,150,797	1,258,305,009,204	96%	90%	98%
105	Papua	Mappi	1,161,495,280,903	1,335,776,315,629	1,192,831,340,651	1,163,956,046,604	1,251,453,442,263	1,213,496,915,240	100%	107%	98%
106	Papua	Asmat	1,246,180,421,947	1,450,974,151,707	1,506,010,743,437	1,335,650,620,029	1,501,875,953,060	1,486,613,797,364	93%	97%	101%
107	Papua	Yahukimo	1,210,591,031,536	1,435,042,098,061	1,540,776,941,897	1,166,478,443,361	1,449,863,676,738	1,575,763,136,163	104%	99%	98%
108	Papua	Pegunungan Bintang	1,314,806,693,662	1,485,851,430,968	1,554,177,392,905	1,277,661,372,780	1,497,396,485,996	1,519,479,175,296	103%	99%	102%
109	Papua	Tolikara	1,173,720,667,574	1,290,741,422,377	1,344,073,754,657	1,372,317,000,128	1,600,762,735,264	1,552,044,323,965	86%	81%	87%
110	Papua	Sarmi	1,004,196,043,120	1,122,730,161,069	1,051,502,778,455	1,072,432,195,942	1,180,833,836,566	1,105,429,026,734	94%	95%	95%
111	Papua	Keerom	842,830,123,392	1,016,341,445,836	917,762,833,575	888,495,341,406	1,009,504,117,783	919,989,414,590	95%	101%	100%
112	Papua	Waropen	848,311,414,098	988,809,523,680	978,232,907,351	831,329,386,367	1,044,895,108,817	976,101,621,482	102%	95%	100%
113	Papua	Supiori	692,335,647,055	684,961,529,884	722,904,463,552	683,256,629,483	732,076,422,916	728,841,410,781	101%	94%	99%
114	Papua	Mamberamo Raya	1,029,587,447,098	1,186,634,155,825	1,003,953,586,962	1,069,892,729,160	1,163,841,135,642	1,063,523,513,643	96%	102%	94%
115	Papua	Nduga	958,969,092,218	1,116,495,173,300	1,189,241,828,349	953,949,879,752	1,152,774,845,210	1,189,164,068,271	101%	97%	100%
116	Papua	Lanny Jaya	1,293,071,757,511	1,418,122,162,708	1,332,363,560,503	1,259,943,559,800	1,412,390,769,650	1,358,324,565,814	103%	100%	98%
117	Papua	Memberamo Tengah	969,972,832,686	1,182,813,683,322	1,033,108,697,437	956,980,267,396	1,159,619,929,584	1,045,651,746,053	101%	102%	99%
118	Papua	Yalimo	1,042,641,928,643	1,239,047,767,136	1,129,586,032,046	1,046,477,567,198	1,199,531,876,906	1,207,326,549,401	100%	103%	94%
119	Papua	Puncak	1,594,392,986,755	1,480,997,896,488	844,038,472,854	1,310,928,242,023	1,350,174,699,479	846,207,387,514	122%	110%	100%
120	Papua	Dogiyai	867,361,841,429	932,841,625,602	1,322,725,447,419	803,216,846,124	882,579,629,417	1,519,354,765,963	108%	106%	87%
121	Papua	Intan Jaya	979,249,564,956	1,067,567,888,917	1,071,044,063,117	1,011,602,303,046	1,121,935,720,638	1,133,054,898,672	97%	95%	95%
122	Papua	Deiyai	738,807,917,145	854,256,621,738	780,941,002,266	712,211,958,594	827,730,663,883	791,863,388,309	104%	103%	99%



LAMPIRAN 3

RASIO KEMANDIRIAN

No	Provinsi	Kabupaten	PAD			Total Pendapatan			Rasio Kemandirian		
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Aceh	Aceh Singkil	39,375,695,217	42,057,160,523	43,441,129,848	850,413,878,936	900,925,562,780	878,765,795,658	5%	5%	5%
2	Sumatera Utara	Nias	70,892,590,608	82,840,434,009	95,726,167,744	691,021,858,642	818,455,989,242	870,868,735,873	10%	10%	11%
3	Sumatera Utara	Nias Selatan	15,037,043,954	16,263,067,492	18,450,266,700	814,895,233,565	1,008,887,209,661	1,126,563,468,536	2%	2%	2%
4	Sumatera Utara	Nias Utara	16,923,883,730	23,852,634,632	20,107,246,943	599,606,675,007	679,245,602,734	691,412,835,871	3%	4%	3%
5	Sumatera Utara	Nias Barat	14,492,750,130	15,616,742,531	36,239,996,548	465,951,797,915	534,737,998,610	645,246,701,977	3%	3%	6%
6	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	42,784,854,485	41,948,183,105	67,862,676,598	828,970,064,135	910,036,777,555	917,793,849,299	5%	5%	7%
7	Sumatera Barat	Solok Selatan	41,207,396,926	51,138,125,857	75,505,887,737	739,447,807,718	776,513,084,983	795,830,635,612	6%	7%	9%
8	Sumatera Barat	Pasaman Barat	69,128,838,735	91,174,717,114	158,920,863,869	964,985,754,753	1,069,252,362,655	1,071,634,148,008	7%	9%	15%
9	Sumatera Selatan	Musi Rawas	97,998,166,925	96,743,870,855	151,594,082,635	1,315,816,569,028	1,617,409,674,822	1,549,566,489,529	7%	6%	10%
10	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	29,172,475,400	32,174,860,897	57,580,992,080	616,908,301,957	813,614,247,749	785,394,510,490	5%	4%	7%
11	Bengkulu	Seluma	27,459,318,276	28,643,738,976	54,153,900,889	761,302,110,926	857,107,574,903	898,894,826,263	4%	3%	6%
12	Lampung	Lampung Barat	46,434,649,521	49,078,910,604	46,789,226,369	895,544,662,614	1,020,799,728,473	1,069,132,043,140	5%	5%	4%
13	Lampung	Pesisir Barat	11,597,895,329	20,710,860,363	42,895,150,221	570,272,841,585	738,441,026,059	813,113,164,459	2%	3%	5%
14	Jawa Timur	Bondowoso	158,974,210,144	177,025,949,242	229,151,109,431	1,800,277,754,980	1,945,061,615,768	1,924,903,618,064	9%	9%	12%
15	Jawa Timur	Situbondo	148,507,958,983	173,836,184,925	228,523,663,374	1,520,359,975,571	1,580,583,084,970	1,620,456,354,002	10%	11%	14%
16	Jawa Timur	Bangkalan	175,624,054,291	200,083,202,454	325,525,663,296	1,787,701,828,638	1,831,923,426,366	2,188,064,292,577	10%	11%	15%
17	Jawa Timur	Sampang	142,512,555,663	135,785,953,318	209,545,224,678	1,736,766,622,299	1,716,788,104,536	1,605,112,287,121	8%	8%	13%
18	Banten	Pandeglang	163,921,272,579	198,750,877,114	387,100,584,855	2,053,864,858,795	2,209,655,129,381	2,465,844,714,731	8%	9%	16%
19	Banten	Lebak	301,542,032,432	304,485,931,938	467,474,538,181	2,237,617,202,823	2,496,433,196,983	2,421,101,201,524	13%	12%	19%
20	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	171,405,340,254	200,570,625,806	290,993,583,144	1,325,716,985,826	1,473,782,176,796	1,699,564,338,547	13%	14%	17%
21	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	156,931,857,546	165,997,896,761	286,691,384,415	1,631,526,898,990	1,930,329,082,306	1,917,035,737,683	10%	9%	15%
22	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	218,906,903,995	236,147,475,251	398,088,460,541	2,007,874,626,136	2,223,806,974,773	2,546,025,461,403	11%	11%	16%
23	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	133,972,578,375	135,092,854,267	249,526,156,524	1,305,142,444,242	1,526,355,151,257	1,675,057,372,641	10%	9%	15%
24	Nusa Tenggara Barat	Dompu	71,080,036,687	84,012,461,167	134,347,580,709	893,104,643,558	1,067,788,714,384	1,034,675,441,821	8%	8%	13%
25	Nusa Tenggara Barat	Bima	97,589,697,964	110,079,232,349	188,203,814,216	1,361,625,002,414	1,620,415,397,471	1,686,871,253,543	7%	7%	11%
26	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	49,802,801,952	57,982,409,736	171,632,855,262	717,820,585,541	1,184,889,344,718	1,238,784,568,470	7%	5%	14%
27	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	102,754,277,833	135,474,520,543	150,949,553,107	652,342,627,548	841,683,230,410	933,470,378,207	16%	16%	16%
28	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	47,398,743,299	60,967,608,812	85,144,270,411	558,419,635,103	684,718,366,542	691,828,976,922	8%	9%	12%
29	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	66,290,916,752	68,222,357,518	98,205,464,855	891,412,853,226	1,072,364,499,689	1,112,641,678,253	7%	6%	9%
30	Nusa Tenggara Timur	Kupang	145,154,792,156	73,214,731,552	119,098,060,635	1,020,930,686,935	1,170,495,473,428	1,012,865,185,735	14%	6%	12%
31	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	76,086,059,849	71,848,806,283	189,534,208,709	1,075,717,057,486	1,201,549,701,401	1,418,915,734,541	7%	6%	13%
32	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	36,136,381,128	47,974,079,044	77,782,160,335	783,648,995,960	918,557,400,999	1,009,891,096,664	5%	5%	8%
33	Nusa Tenggara Timur	Belu	72,408,429,832	74,823,080,565	101,246,072,215	738,626,408,498	816,442,053,570	959,717,412,277	10%	9%	11%
34	Nusa Tenggara Timur	Alor	39,889,986,786	45,718,605,435	81,918,953,312	801,557,533,786	952,731,960,673	1,061,267,152,574	5%	5%	8%
35	Nusa Tenggara Timur	Lembata	28,836,775,343	35,723,669,619	37,992,916,559	593,829,248,271	739,343,686,647	731,606,447,233	5%	5%	5%
36	Nusa Tenggara Timur	Ende	59,449,629,993	68,865,679,023	95,236,245,984	922,465,715,436	1,156,247,543,981	1,104,000,563,286	6%	6%	9%
37	Nusa Tenggara Timur	Manggarai	75,149,043,636	78,284,065,871	128,829,520,073	964,309,098,400	1,068,340,708,429	1,111,538,011,521	8%	7%	12%
38	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	27,089,991,977	28,842,548,099	49,093,660,595	595,074,466,261	708,870,066,414	739,924,285,730	5%	4%	7%
39	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	64,742,881,467	91,068,685,754	123,431,811,303	764,394,719,032	882,145,842,702	1,014,699,926,732	8%	10%	12%
40	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	22,023,682,161	22,142,086,431	95,920,806,099	476,442,291,034	541,880,181,101	912,154,028,640	5%	4%	11%
41	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	44,191,272,752	43,510,608,957	29,518,310,255	721,629,396,753	837,653,147,107	539,692,767,874	6%	5%	5%
42	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	28,618,512,239	29,671,653,791	46,163,603,354	629,109,735,892	722,085,467,323	759,738,196,695	5%	4%	6%
43	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	41,465,748,922	44,112,085,695	85,878,937,145	717,290,747,474	862,639,611,622	917,693,081,095	6%	5%	9%
44	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	30,262,370,498	31,439,614,081	47,782,615,776	496,500,601,842	557,409,054,657	536,631,907,057	6%	6%	9%
45	Nusa Tenggara Timur	Malaka	25,020,134,187	29,265,208,424	54,789,189,990	595,360,001,844	658,502,838,380	823,512,988,697	4%	4%	7%
46	Kalimantan Barat	Sambas	85,577,887,780	102,059,036,354	200,322,596,712	1,401,587,116,679	1,530,823,553,222	1,634,003,339,884	6%	7%	12%
47	Kalimantan Barat	Bengkayang	39,464,149,235	42,677,133,440	45,592,828,901	1,007,260,806,268	1,051,895,262,951	1,078,309,146,536	4%	4%	4%
48	Kalimantan Barat	Landak	46,772,921,850	57,178,239,742	124,368,521,306	1,195,875,550,369	1,390,184,006,711	1,287,252,892,337	4%	4%	10%

49	Kalimantan Barat	Ketapang	121,939,003,551	134,957,765,564	168,043,331,725	1,814,062,083,457	1,897,853,562,079	1,995,921,830,320	7%	7%	8%
50	Kalimantan Barat	Sintang	103,993,546,783	108,405,524,039	113,170,505,775	1,498,619,777,710	1,674,585,588,493	1,950,621,461,745	7%	6%	6%
51	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	69,732,520,196	67,135,520,050	131,221,195,200	1,452,312,446,376	1,707,744,597,979	1,684,886,337,565	5%	4%	8%
52	Kalimantan Barat	Melawi	29,938,549,078	34,129,257,682	67,202,756,139	927,933,293,881	1,056,879,459,342	1,179,424,697,833	3%	3%	6%
53	Kalimantan Barat	Kayong Utara	13,182,872,167	10,812,481,174	36,486,217,742	603,308,230,337	700,472,770,108	785,939,457,932	2%	2%	5%
54	Kalimantan Tengah	Seruyan	37,931,102,372	56,880,204,217	110,713,320,379	825,525,393,207	1,042,119,074,996	1,100,045,651,364	5%	5%	10%
55	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	100,606,487,788	95,440,232,947	131,597,974,168	1,108,140,034,869	1,205,304,880,764	1,082,545,967,503	9%	8%	12%
56	Kalimantan Utara	Nunukan	104,983,991,524	71,767,977,320	79,356,288,064	1,070,054,692,915	1,294,495,293,887	1,191,484,412,627	10%	6%	7%
57	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	15,098,419,000	18,709,661,135	12,114,433,690	951,200,452,769	1,128,641,631,082	986,212,193,019	2%	2%	1%
58	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	20,792,119,456	18,882,843,132	40,841,502,554	606,230,528,648	704,938,364,829	764,650,292,158	3%	3%	5%
59	Sulawesi Tengah	Donggala	59,927,050,651	70,883,672,512	113,840,490,863	1,084,867,390,074	1,266,899,313,486	1,136,703,943,699	6%	6%	10%
60	Sulawesi Tengah	Toli-Toli	63,600,800,728	63,623,624,337	100,514,205,655	865,458,406,270	924,983,000,832	1,107,426,358,311	7%	7%	9%
61	Sulawesi Tengah	Buol	45,986,409,009	53,259,653,066	76,219,454,507	834,939,991,971	902,028,567,650	938,746,232,817	6%	6%	8%
62	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	77,841,895,799	91,176,502,632	153,873,011,873	1,168,381,299,784	1,469,285,280,816	1,449,457,798,008	7%	6%	11%
63	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	49,779,576,337	48,453,761,094	51,162,965,053	909,862,959,691	1,062,566,334,258	961,582,935,289	5%	5%	5%
64	Sulawesi Tengah	Sigi	25,506,504,288	32,701,048,951	76,602,665,682	933,843,013,699	1,212,221,064,331	1,097,233,335,812	3%	3%	7%
65	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	12,290,011,514	19,818,492,878	30,317,151,107	464,487,460,750	549,817,139,480	619,309,793,634	3%	4%	5%
66	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	37,975,046,776	37,206,044,507	54,607,359,268	703,807,802,272	869,147,172,888	889,947,144,146	5%	4%	6%
67	Sulawesi Selatan	Jeneponto	61,267,873,859	77,638,677,214	97,930,246,320	1,044,672,889,369	1,261,885,034,967	1,088,513,971,052	6%	6%	9%
68	Sulawesi Tenggara	Konawe	56,039,769,874	57,702,177,562	97,586,836,007	1,076,320,162,517	1,174,856,947,154	1,256,254,769,298	5%	5%	8%
69	Sulawesi Tenggara	Bombana	34,521,229,713	31,274,205,870	54,510,469,823	727,175,099,315	850,047,395,243	852,646,804,773	5%	4%	6%
70	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	6,930,071,322	9,717,841,083	34,381,357,159	453,975,551,401	510,243,752,284	658,749,595,060	2%	2%	5%
71	Gorontalo	Boalemo	43,432,090,348	48,794,270,893	71,687,164,839	710,800,689,088	785,937,545,311	844,634,717,802	6%	6%	8%
72	Gorontalo	Pohuwato	46,935,267,855	62,981,898,282	69,387,597,125	726,832,241,699	862,253,451,273	822,135,259,820	6%	7%	8%
73	Gorontalo	Gorontalo Utara	25,267,837,564	24,586,696,146	44,817,338,961	546,394,919,913	682,605,027,140	727,347,077,444	5%	4%	6%
74	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	106,992,893,819	126,047,973,814	203,218,489,798	1,081,510,420,173	1,296,792,509,812	1,331,125,381,015	10%	10%	15%
75	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	12,287,034,394	17,169,464,181	36,714,595,466	534,771,870,159	632,381,748,713	616,641,469,808	2%	3%	6%
76	Maluku	Maluku Tenggara Barat	32,083,212,706	32,640,578,961	27,382,859,759	804,995,958,815	878,636,786,247	907,927,111,407	4%	4%	3%
77	Maluku	Maluku Tengah	65,551,091,829	120,254,443,504	66,958,583,664	1,334,284,719,874	1,598,506,441,056	1,623,326,798,903	5%	8%	4%
78	Maluku	Buru	20,901,125,742	21,257,161,494	39,973,487,646	665,143,171,888	846,537,025,157	794,529,154,762	3%	3%	5%
79	Maluku	Kepulauan Aru	21,742,724,643	28,037,720,937	43,525,983,087	719,574,359,556	830,046,700,560	948,283,736,625	3%	3%	5%
80	Maluku	Seram Bagian Barat	19,549,590,870	25,988,089,631	18,864,607,657	784,059,811,779	886,169,442,009	941,306,675,349	2%	3%	2%
81	Maluku	Seram Bagian Timur	18,017,881,708	21,548,344,163	20,691,996,202	792,559,830,443	885,931,332,275	1,031,283,290,040	2%	2%	2%
82	Maluku	Maluku Barat Daya	22,462,530,778	40,264,112,918	49,763,939,793	757,460,940,348	849,315,305,461	995,609,326,719	3%	5%	5%
83	Maluku	Buru Selatan	12,878,290,354	26,985,938,551	12,999,589,247	596,807,809,142	737,338,844,047	605,625,487,281	2%	4%	2%
84	Maluku Utara	Halmahera Barat	18,570,394,087	25,353,045,666	22,412,168,082	704,587,957,352	927,913,123,587	802,531,665,206	3%	3%	3%
85	Maluku Utara	Kepulauan Sula	12,275,937,722	20,979,430,591	21,795,189,166	710,636,827,515	779,665,951,803	771,152,404,275	2%	3%	3%
86	Maluku Utara	Halmahera Selatan	25,412,634,405	25,137,301,794	28,876,501,745	915,988,905,657	1,170,143,986,472	1,282,415,448,378	3%	2%	2%
87	Maluku Utara	Halmahera Timur	22,133,826,819	25,176,739,490	53,541,053,119	615,254,735,087	807,541,937,092	865,169,488,089	4%	3%	6%
88	Maluku Utara	Pulau Morotai	9,899,844,580	7,538,512,481	20,944,950,376	725,685,958,887	612,469,101,995	640,506,962,379	1%	1%	3%
89	Maluku Utara	Pulai Taliabu	10,222,705,133	10,413,059,914	36,392,444,335	442,411,903,039	559,704,718,736	594,835,450,625	2%	2%	6%
90	Papua Barat	Teluk Wondama	16,533,112,344	16,021,922,743	7,074,875,366	684,439,392,858	777,305,598,899	761,810,519,371	2%	2%	1%
91	Papua Barat	Teluk Bintuni	54,046,473,495	53,214,917,711	41,892,703,177	1,755,790,186,094	1,846,327,647,967	1,989,802,111,850	3%	3%	2%
92	Papua Barat	Sorong Selatan	19,695,388,316	34,368,671,007	19,199,466,882	804,318,806,437	892,175,022,073	868,080,681,928	2%	4%	2%
93	Papua Barat	Sorong	73,129,326,687	78,909,742,415	93,000,461,692	1,431,608,358,225	1,429,486,253,385	1,616,710,353,686	5%	6%	6%
94	Papua Barat	Raja Ampat	39,508,352,250	49,976,464,585	37,313,723,383	1,145,654,333,610	1,203,550,369,341	1,163,452,153,394	3%	4%	3%
95	Papua Barat	Tambrau	6,922,260,273	10,348,666,767	2,032,480,539	934,452,254,367	1,043,517,114,923	994,649,599,740	1%	1%	0%
96	Papua Barat	Maybrat	18,529,308,182	7,934,646,956	4,716,057,234	745,358,695,228	934,477,636,689	1,005,510,324,624	2%	1%	0%
97	Papua	Merauke	145,894,884,858	166,441,748,859	160,522,699,713	1,999,919,120,107	1,967,057,544,124	1,894,986,652,311	7%	8%	8%
98	Papua	Jayawijaya	74,572,888,807	69,994,661,991	75,889,520,464	1,335,006,059,942	1,467,240,987,034	1,496,028,526,952	6%	5%	5%
99	Papua	Nabire	19,580,796,340	51,434,040,465	47,298,707,017	1,188,833,024,802	1,269,110,037,027	1,231,469,575,077	2%	4%	4%
100	Papua	Kepulauan Yapen	44,398,034,099	57,427,069,526	42,340,844,950	1,034,831,629,513	1,084,069,954,816	1,091,604,398,514	4%	5%	4%
101	Papua	Biak Numfor	67,647,949,050	22,928,633,070	13,509,836,432	1,101,440,280,711	1,130,264,813,416	1,198,940,142,862	6%	2%	1%
102	Papua	Paniai	20,358,042,846	19,447,945,098	28,434,534,118	958,842,153,734	1,158,328,501,543	1,247,819,810,080	2%	2%	2%

103	Papua	Puncak Jaya	14,802,617,320	24,744,152,963	10,790,311,949	1,265,331,724,690	1,423,942,875,241	1,259,626,254,346	1%	2%	1%
104	Papua	Boven Digoel	23,216,047,800	27,580,049,109	34,128,578,820	1,110,324,913,451	1,269,334,150,797	1,258,305,009,204	2%	2%	3%
105	Papua	Mappi	16,492,934,669	21,495,206,401	28,693,433,685	1,163,956,046,604	1,251,453,442,263	1,213,496,915,240	1%	2%	2%
106	Papua	Asmat	51,564,628,444	71,346,686,858	38,346,723,376	1,335,650,620,029	1,501,875,953,060	1,486,613,797,364	4%	5%	3%
107	Papua	Yahukimo	22,865,226,990	24,317,485,246	22,510,120,394	1,166,478,443,361	1,449,863,676,738	1,575,763,136,163	2%	2%	1%
108	Papua	Pegunungan Bintang	19,182,092,243	20,139,473,413	12,859,510,577	1,277,661,372,780	1,497,396,485,996	1,519,479,175,296	2%	1%	1%
109	Papua	Tolikara	18,027,971,780	27,827,703,044	9,576,673,179	1,372,317,000,128	1,600,762,735,264	1,552,044,323,965	1%	2%	1%
110	Papua	Sarmi	6,426,535,129	28,410,836,674	5,092,657,365	1,072,432,195,942	1,180,833,836,566	1,105,429,026,734	1%	2%	0%
111	Papua	Keerom	12,476,128,572	63,814,379,210	12,683,764,757	888,495,341,406	1,009,504,117,783	919,989,414,590	1%	6%	1%
112	Papua	Waropen	6,965,887,111	6,851,483,623	3,776,502,512	831,329,386,367	1,044,895,108,817	976,101,621,482	1%	1%	0%
113	Papua	Supiori	8,044,297,969	14,509,129,003	9,730,575,830	683,256,629,483	732,076,422,916	728,841,410,781	1%	2%	1%
114	Papua	Mamberamo Raya	12,042,269,299	18,487,764,507	13,434,158,060	1,069,892,729,160	1,163,841,135,642	1,063,523,513,643	1%	2%	1%
115	Papua	Nduga	3,452,146,194	12,005,560,140	22,970,961,515	953,949,879,752	1,152,774,845,210	1,189,164,068,271	0%	1%	2%
116	Papua	Lanny Jaya	17,477,686,133	11,053,461,900	58,460,287,592	1,259,943,559,800	1,412,390,769,650	1,358,324,565,814	1%	1%	4%
117	Papua	Memberamo Tengah	14,203,916,412	14,380,797,668	10,185,211,897	956,980,267,396	1,159,619,929,584	1,045,651,746,053	1%	1%	1%
118	Papua	Yalimo	16,080,813,456	18,320,960,672	24,366,576,414	1,046,477,567,198	1,199,531,876,906	1,207,326,549,401	2%	2%	2%
119	Papua	Puncak	31,769,771,514	10,588,067,725	9,060,168,549	1,310,928,242,023	1,350,174,699,479	846,207,387,514	2%	1%	1%
120	Papua	Dogiyai	8,285,133,764	10,405,761,225	118,296,744,687	803,216,846,124	882,579,629,417	1,519,354,765,963	1%	1%	8%
121	Papua	Intan Jaya	6,979,689,718	18,243,656,973	5,346,128,600	1,011,602,303,046	1,121,935,720,638	1,133,054,898,672	1%	2%	0%
122	Papua	Deiyai	7,465,425,594	7,604,515,308	1,969,108,723	712,211,958,594	827,730,663,883	791,863,388,309	1%	1%	0%



LAMPIRAN 4

RASIO PERTUMBUHAN

No	Provinsi	Kabupaten	Pendapatan				Rasio Pertumbuhan		
			2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Aceh	Aceh Singkil	612,390,405,330	850,413,878,936	900,925,562,780	878,765,795,658	39%	6%	-2%
2	Sumatera Utara	Nias	476,561,676,000	691,021,858,642	818,455,989,242	870,868,735,873	45%	18%	6%
3	Sumatera Utara	Nias Selatan	757,449,182,097	814,895,233,565	1,008,887,209,661	1,126,563,468,536	8%	24%	12%
4	Sumatera Utara	Nias Utara	481,009,636,538	599,606,675,007	679,245,602,734	691,412,835,871	25%	13%	2%
5	Sumatera Utara	Nias Barat	367,115,729,000	465,951,797,915	534,737,998,610	645,246,701,977	27%	15%	21%
6	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	719,966,029,971	828,970,064,135	910,036,777,555	917,793,849,299	15%	10%	1%
7	Sumatera Barat	Solok Selatan	617,240,074,553	739,447,807,718	776,513,084,983	795,830,635,612	20%	5%	2%
8	Sumatera Barat	Pasaman Barat	671,680,372,100	964,985,754,753	1,069,252,362,655	1,071,634,148,008	44%	11%	0%
9	Sumatera Selatan	Musi Rawas	1,082,763,554,101	1,315,816,569,028	1,617,409,674,822	1,549,566,489,529	22%	23%	-4%
10	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	543,726,789,657	616,908,301,957	813,614,247,749	785,394,510,490	13%	32%	-3%
11	Bengkulu	Seluma	616,193,465,576	761,302,110,926	857,107,574,903	898,894,826,263	24%	13%	5%
12	Lampung	Lampung Barat	606,057,182,386	895,544,662,614	1,020,799,728,473	1,069,132,043,140	48%	14%	5%
13	Lampung	Pesisir Barat	323,870,107,806	570,272,841,585	738,441,026,059	813,113,164,459	76%	29%	10%
14	Jawa Timur	Bondowoso	1,360,409,931,488	1,800,277,754,980	1,945,061,615,768	1,924,903,618,064	32%	8%	-1%
15	Jawa Timur	Situbondo	1,320,543,066,161	1,520,359,975,571	1,580,583,084,970	1,620,456,354,002	15%	4%	3%
16	Jawa Timur	Bangkalan	1,417,354,255,732	1,787,701,828,638	1,831,923,426,366	2,188,064,292,577	26%	2%	19%
17	Jawa Timur	Sampang	1,157,613,814,413	1,736,766,622,299	1,716,788,104,536	1,605,112,287,121	50%	-1%	-7%
18	Banten	Pandeglang	1,458,109,164,880	2,053,864,858,795	2,209,655,129,381	2,465,844,714,731	41%	8%	12%
19	Banten	Lebak	1,678,189,568,497	2,237,617,202,823	2,496,433,196,983	2,421,101,201,524	33%	12%	-3%
20	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	1,133,603,041,361	1,325,716,985,826	1,473,782,176,796	1,699,564,338,547	17%	11%	15%
21	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	1,295,676,119,927	1,631,526,898,990	1,930,329,082,306	1,917,035,737,683	26%	18%	-1%
22	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	1,640,911,386,346	2,007,874,626,136	2,223,806,974,773	2,546,025,461,403	22%	11%	14%
23	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	1,108,912,044,373	1,305,142,444,242	1,526,355,151,257	1,675,057,372,641	18%	17%	10%
24	Nusa Tenggara Barat	Dompu	767,961,919,494	893,104,643,558	1,067,788,714,384	1,034,675,441,821	16%	20%	-3%
25	Nusa Tenggara Barat	Bima	1,137,349,920,135	1,361,625,002,414	1,620,415,397,471	1,686,871,253,543	20%	19%	4%
26	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	590,000,000,000	717,820,585,541	1,184,889,344,718	1,238,784,568,470	22%	65%	5%
27	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	508,720,948,365	652,342,627,548	841,683,230,410	933,470,378,207	28%	29%	11%
28	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	466,812,644,090	558,419,635,103	684,718,366,542	691,828,976,922	20%	23%	1%
29	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	746,795,977,351	891,412,853,226	1,072,364,499,689	1,112,641,678,253	19%	20%	4%
30	Nusa Tenggara Timur	Kupang	876,132,767,836	1,020,930,686,935	1,170,495,473,428	1,012,865,185,735	17%	15%	-13%
31	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	938,390,362,899	1,075,717,057,486	1,201,549,701,401	1,418,915,734,541	15%	12%	18%
32	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	709,002,356,401	783,648,995,960	918,557,400,999	1,009,891,096,664	11%	17%	10%
33	Nusa Tenggara Timur	Belu	574,507,147,500	738,626,408,498	816,442,053,570	959,717,412,277	29%	11%	18%
34	Nusa Tenggara Timur	Alor	726,529,797,842	801,557,533,786	952,731,960,673	1,061,267,152,574	10%	19%	11%
35	Nusa Tenggara Timur	Lembata	521,765,298,124	593,829,248,271	739,343,686,647	731,606,447,233	14%	25%	-1%
36	Nusa Tenggara Timur	Ende	771,833,490,796	922,465,715,436	1,156,247,543,981	1,104,000,563,286	20%	25%	-5%

37	Nusa Tenggara Timur	Manggarai	745,795,778,837	964,309,098,400	1,068,340,708,429	1,111,538,011,521	29%	11%	4%
38	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	507,111,104,385	595,074,466,261	708,870,066,414	739,924,285,730	17%	19%	4%
39	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	637,517,522,437	764,394,719,032	882,145,842,702	1,014,699,926,732	20%	15%	15%
40	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	396,750,303,628	476,442,291,034	541,880,181,101	912,154,028,640	20%	14%	68%
41	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	575,270,600,940	721,629,396,753	837,653,147,107	539,692,767,874	25%	16%	-36%
42	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	537,646,630,000	629,109,735,892	722,085,467,323	759,738,196,695	17%	15%	5%
43	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	572,576,930,845	717,290,747,474	862,639,611,622	917,693,081,095	25%	20%	6%
44	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	407,347,730,000	496,500,601,842	557,409,054,657	536,631,907,057	22%	12%	-4%
45	Nusa Tenggara Timur	Malaka	358,283,719,437	595,360,001,844	658,502,838,380	823,512,988,697	66%	11%	25%
46	Kalimantan Barat	Sambas	1,171,654,527,002	1,401,587,116,679	1,530,823,553,222	1,634,003,339,884	20%	9%	7%
47	Kalimantan Barat	Bengkayang	738,433,935,110	1,007,260,806,268	1,051,895,262,951	1,078,309,146,536	36%	4%	3%
48	Kalimantan Barat	Landak	856,404,020,209	1,195,875,550,369	1,390,184,006,711	1,287,252,892,337	40%	16%	-7%
49	Kalimantan Barat	Ketapang	1,360,658,975,832	1,814,062,083,457	1,897,853,562,079	1,995,921,830,320	33%	5%	5%
50	Kalimantan Barat	Sintang	1,059,329,113,621	1,498,619,777,710	1,674,585,588,493	1,950,621,461,745	41%	12%	16%
51	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	1,073,223,102,700	1,452,312,446,376	1,707,744,597,979	1,684,886,337,565	35%	18%	-1%
52	Kalimantan Barat	Melawi	867,524,786,291	927,933,293,881	1,056,879,459,342	1,179,424,697,833	7%	14%	12%
53	Kalimantan Barat	Kayong Utara	523,479,060,501	603,308,230,337	700,472,770,108	785,939,457,932	15%	16%	12%
54	Kalimantan Tengah	Seruyan	804,815,389,918	825,525,393,207	1,042,119,074,996	1,100,045,651,364	3%	26%	6%
55	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	801,146,777,000	1,108,140,034,869	1,205,304,880,764	1,082,545,967,503	38%	9%	-10%
56	Kalimantan Utara	Nunukan	1,258,682,030,500	1,070,054,692,915	1,294,495,293,887	1,191,484,412,627	-15%	21%	-8%
57	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	479,248,705,847	951,200,452,769	1,128,641,631,082	986,212,193,019	98%	19%	-13%
58	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	443,829,776,000	606,230,528,648	704,938,364,829	764,650,292,158	37%	16%	8%
59	Sulawesi Tengah	Donggala	825,781,602,000	1,084,867,390,074	1,266,899,313,486	1,136,703,943,699	31%	17%	-10%
60	Sulawesi Tengah	Toli-Toli	733,412,121,042	865,458,406,270	924,983,000,832	1,107,426,358,311	18%	7%	20%
61	Sulawesi Tengah	Buol	602,721,790,549	834,939,991,971	902,028,567,650	938,746,232,817	39%	8%	4%
62	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	931,397,104,592	1,168,381,299,784	1,469,285,280,816	1,449,457,798,008	25%	26%	-1%
63	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	667,508,054,575	909,862,959,691	1,062,566,334,258	961,582,935,289	36%	17%	-10%
64	Sulawesi Tengah	Sigi	732,487,638,882	933,843,013,699	1,212,221,064,331	1,097,233,335,812	27%	30%	-9%
65	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	201,403,209,904	464,487,460,750	549,817,139,480	619,309,793,634	131%	18%	13%
66	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	503,654,581,661	703,807,802,272	869,147,172,888	889,947,144,146	40%	23%	2%
67	Sulawesi Selatan	Jeneponto	821,183,931,093	1,044,672,889,369	1,261,885,034,967	1,088,513,971,052	27%	21%	-14%
68	Sulawesi Tenggara	Konawe	816,985,689,185	1,076,320,162,517	1,174,856,947,154	1,256,254,769,298	32%	9%	7%
69	Sulawesi Tenggara	Bombana	587,791,540,879	727,175,099,315	850,047,395,243	852,646,804,773	24%	17%	0%
70	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	120,168,468,677	453,975,551,401	510,243,752,284	658,749,595,060	278%	12%	29%
71	Gorontalo	Boalemo	540,378,295,988	710,800,689,088	785,937,545,311	844,634,717,802	32%	11%	7%
72	Gorontalo	Pohuwato	610,549,585,572	726,832,241,699	862,253,451,273	822,135,259,820	19%	19%	-5%
73	Gorontalo	Gorontalo Utara	460,425,281,974	546,394,919,913	682,605,027,140	727,347,077,444	19%	25%	7%
74	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	851,341,575,270	1,081,510,420,173	1,296,792,509,812	1,331,125,381,015	27%	20%	3%
75	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	231,621,964,853	534,771,870,159	632,381,748,713	616,641,469,808	131%	18%	-2%
76	Maluku	Maluku Tenggara Barat	668,297,502,793	804,995,958,815	878,636,786,247	907,927,111,407	20%	9%	3%
77	Maluku	Maluku Tengah	1,152,868,762,000	1,334,284,719,874	1,598,506,441,056	1,623,326,798,903	16%	20%	2%
78	Maluku	Buru	531,326,434,254	665,143,171,888	846,537,025,157	794,529,154,762	25%	27%	-6%

79	Maluku	Kepulauan Aru	606,740,381,579	719,574,359,556	830,046,700,560	948,283,736,625	19%	15%	14%
80	Maluku	Seram Bagian Barat	651,806,059,106	784,059,811,779	886,169,442,009	941,306,675,349	20%	13%	6%
81	Maluku	Seram Bagian Timur	597,884,322,832	792,559,830,443	885,931,332,275	1,031,283,290,040	33%	12%	16%
82	Maluku	Maluku Barat Daya	636,614,423,170	757,460,940,348	849,315,305,461	995,609,326,719	19%	12%	17%
83	Maluku	Buru Selatan	487,165,200,000	596,807,809,142	737,338,844,047	605,625,487,281	23%	24%	-18%
84	Maluku Utara	Halmahera Barat	563,573,855,336	704,587,957,352	927,913,123,587	802,531,665,206	25%	32%	-14%
85	Maluku Utara	Kepulauan Sula	505,928,507,936	710,636,827,515	779,665,951,803	771,152,404,275	40%	10%	-1%
86	Maluku Utara	Halmahera Selatan	700,970,827,678	915,988,905,657	1,170,143,986,472	1,282,415,448,378	31%	28%	10%
87	Maluku Utara	Halmahera Timur	617,735,641,375	615,254,735,087	807,541,937,092	865,169,488,089	0%	31%	7%
88	Maluku Utara	Pulau Morotai	492,860,153,555	725,685,958,887	612,469,101,995	640,506,962,379	47%	-16%	5%
89	Maluku Utara	Pulai Taliabu	162,424,441,132	442,411,903,039	559,704,718,736	594,835,450,625	172%	27%	6%
90	Papua Barat	Teluk Wondama	603,916,788,435	684,439,392,858	777,305,598,899	761,810,519,371	13%	14%	-2%
91	Papua Barat	Teluk Bintuni	1,173,076,106,034	1,755,790,186,094	1,846,327,647,967	1,989,802,111,850	50%	5%	8%
92	Papua Barat	Sorong Selatan	672,379,981,430	804,318,806,437	892,175,022,073	868,080,681,928	20%	11%	-3%
93	Papua Barat	Sorong	1,104,675,399,586	1,431,608,358,225	1,429,486,253,385	1,616,710,353,686	30%	0%	13%
94	Papua Barat	Raja Ampat	1,057,117,054,564	1,145,654,333,610	1,203,550,369,341	1,163,452,153,394	8%	5%	-3%
95	Papua Barat	Tambrauw	675,462,048,311	934,452,254,367	1,043,517,114,923	994,649,599,740	38%	12%	-5%
96	Papua Barat	Maybrat	600,028,845,330	745,358,695,228	934,477,636,689	1,005,510,324,624	24%	25%	8%
97	Papua	Merauke	1,674,388,233,960	1,999,919,120,107	1,967,057,544,124	1,894,986,652,311	19%	-2%	-4%
98	Papua	Jayawijaya	880,214,998,750	1,335,006,059,942	1,467,240,987,034	1,496,028,526,952	52%	10%	2%
99	Papua	Nabire	916,349,792,843	1,188,833,024,802	1,269,110,037,027	1,231,469,575,077	30%	7%	-3%
100	Papua	Kepulauan Yapen	745,791,055,118	1,034,831,629,513	1,084,069,954,816	1,091,604,398,514	39%	5%	1%
101	Papua	Biak Numfor	763,125,511,454	1,101,440,280,711	1,130,264,813,416	1,198,940,142,862	44%	3%	6%
102	Papua	Paniai	748,960,896,174	958,842,153,734	1,158,328,501,543	1,247,819,810,080	28%	21%	8%
103	Papua	Puncak Jaya	1,004,674,194,894	1,265,331,724,690	1,423,942,875,241	1,259,626,254,346	26%	13%	-12%
104	Papua	Boven Digoel	1,065,773,754,143	1,110,324,913,451	1,269,334,150,797	1,258,305,009,204	4%	14%	-1%
105	Papua	Mappi	996,948,428,303	1,163,956,046,604	1,251,453,442,263	1,213,496,915,240	17%	8%	-3%
106	Papua	Asmat	1,090,201,417,661	1,335,650,620,029	1,501,875,953,060	1,486,613,797,364	23%	12%	-1%
107	Papua	Yahukimo	863,658,089,319	1,166,478,443,361	1,449,863,676,738	1,575,763,136,163	35%	24%	9%
108	Papua	Pegunungan Bintang	1,085,419,509,741	1,277,661,372,780	1,497,396,485,996	1,519,479,175,296	18%	17%	1%
109	Papua	Tolikara	928,973,294,675	1,372,317,000,128	1,600,762,735,264	1,552,044,323,965	48%	17%	-3%
110	Papua	Sarmi	880,169,240,531	1,072,432,195,942	1,180,833,836,566	1,105,429,026,734	22%	10%	-6%
111	Papua	Keerom	750,532,289,361	888,495,341,406	1,009,504,117,783	919,989,414,590	18%	14%	-9%
112	Papua	Waropen	661,782,194,608	831,329,386,367	1,044,895,108,817	976,101,621,482	26%	26%	-7%
113	Papua	Supiori	686,318,973,887	683,256,629,483	732,076,422,916	728,841,410,781	0%	7%	0%
114	Papua	Mamberamo Raya	998,515,949,531	1,069,892,729,160	1,163,841,135,642	1,063,523,513,643	7%	9%	-9%
115	Papua	Nduga	731,596,176,765	953,949,879,752	1,152,774,845,210	1,189,164,068,271	30%	21%	3%
116	Papua	Lanny Jaya	864,620,506,063	1,259,943,559,800	1,412,390,769,650	1,358,324,565,814	46%	12%	-4%
117	Papua	Memberamo Tengah	865,336,973,752	956,980,267,396	1,159,619,929,584	1,045,651,746,053	11%	21%	-10%
118	Papua	Yalimo	820,711,219,735	1,046,477,567,198	1,199,531,876,906	1,207,326,549,401	28%	15%	1%
119	Papua	Puncak	1,075,287,982,496	1,310,928,242,023	1,350,174,699,479	846,207,387,514	22%	3%	-37%
120	Papua	Dogiyai	655,162,591,278	803,216,846,124	882,579,629,417	1,519,354,765,963	23%	10%	72%

LAMPIRAN 5

RASIO BELANJA MODAL

No	Provinsi	Kabupaten	Belanja Modal			Belanja Daerah			Rasio Belanja Modal		
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Aceh	Aceh Singkil	314,275,961,928	306,370,410,800	194,341,402,778	842,638,293,356	967,082,630,925	877,753,807,056	37%	32%	22%
2	Sumatera Utara	Nias	194,330,739,832	227,559,502,344	239,523,860,631	666,992,376,342	796,586,640,124	881,983,873,162	29%	29%	27%
3	Sumatera Utara	Nias Selatan	184,978,091,040	122,786,141,237	187,946,733,162	855,252,081,779	810,002,815,633	1,066,164,746,908	22%	15%	18%
4	Sumatera Utara	Nias Utara	219,043,273,818	233,739,122,399	251,675,869,175	615,651,186,431	701,361,503,469	722,898,158,998	36%	33%	35%
5	Sumatera Utara	Nias Barat	186,499,821,897	156,180,257,609	199,747,992,746	486,878,120,018	563,084,915,466	634,418,292,759	38%	28%	31%
6	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	251,482,269,521	277,846,773,616	313,680,549,806	840,151,497,974	990,803,893,245	1,011,688,194,889	30%	28%	31%
7	Sumatera Barat	Solok Selatan	215,458,902,302	234,219,029,497	223,535,583,229	703,395,983,375	814,299,953,923	815,718,098,390	31%	29%	27%
8	Sumatera Barat	Pasaman Barat	193,334,659,071	267,700,818,987	263,065,434,073	909,853,751,901	1,060,377,597,620	1,116,860,825,972	21%	25%	24%
9	Sumatera Selatan	Musi Rawas	448,822,421,382	432,324,100,108	317,467,274,462	1,409,669,541,374	1,526,168,541,789	1,443,832,402,491	32%	28%	22%
10	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	317,372,259,744	355,012,452,385	279,488,044,078	670,724,435,161	720,301,758,791	762,371,904,143	47%	49%	37%
11	Bengkulu	Seluma	165,116,422,621	206,470,008,526	128,734,499,848	754,429,160,650	900,417,696,803	876,754,476,118	22%	23%	15%
12	Lampung	Lampung Barat	302,606,112,518	310,063,349,774	348,669,021,805	893,360,816,780	999,084,481,888	1,122,380,535,135	34%	31%	31%
13	Lampung	Pesisir Barat	221,869,723,728	330,560,839,623	314,242,247,261	550,986,272,803	732,750,194,933	811,738,309,195	40%	45%	39%
14	Jawa Timur	Bondowoso	404,576,533,409	425,425,089,820	383,574,373,763	1,776,098,167,403	1,992,640,093,665	1,935,627,796,905	23%	21%	20%
15	Jawa Timur	Situbondo	480,529,384,071	416,863,544,279	345,382,416,018	1,480,028,872,079	1,659,809,374,323	1,611,319,203,889	32%	25%	21%
16	Jawa Timur	Bangkalan	340,683,173,357	412,823,435,617	296,055,032,741	1,838,357,542,933	1,944,897,677,149	2,009,248,055,038	19%	21%	15%
17	Jawa Timur	Sampang	630,156,763,506	563,999,688,976	374,875,770,149	1,704,171,539,547	1,778,548,485,251	1,663,946,531,152	37%	32%	23%
18	Banten	Pandeglang	318,350,393,310	369,304,933,837	541,393,604,340	2,037,028,432,385	2,215,360,536,783	2,537,861,072,039	16%	17%	21%
19	Banten	Lebak	464,213,655,293	541,448,512,783	374,004,042,572	2,092,695,058,672	2,434,575,832,324	2,481,358,755,906	22%	22%	15%
20	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	274,331,742,737	281,695,135,344	391,441,279,288	1,351,213,319,266	1,484,537,233,746	1,668,418,316,827	20%	19%	23%
21	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	207,780,240,812	338,274,425,176	368,525,406,802	1,549,692,154,035	1,832,981,039,172	1,930,401,187,346	13%	18%	19%
22	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	361,282,732,841	469,901,093,898	405,901,093,898	2,118,495,969,979	2,198,829,143,491	2,434,255,556,547	17%	19%	19%
23	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	260,600,376,394	286,524,913,396	405,536,014,371	1,329,968,305,104	1,485,764,542,538	1,730,576,904,224	20%	19%	23%
24	Nusa Tenggara Barat	Dompu	166,086,551,369	209,505,008,067	244,716,757,895	866,967,571,072	1,028,864,787,587	1,071,193,115,940	19%	20%	23%
25	Nusa Tenggara Barat	Bima	175,011,396,229	316,337,118,705	291,584,599,818	1,332,703,166,398	1,604,853,577,166	1,662,901,947,395	13%	20%	18%
26	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	226,077,786,051	333,815,891,502	451,763,415,780	697,655,124,536	977,362,494,176	1,365,507,516,308	32%	34%	33%
27	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	153,425,202,551	215,209,826,275	271,701,021,217	662,039,757,343	904,710,295,806	904,710,295,806	23%	24%	30%
28	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	158,971,683,460	253,159,760,865	183,938,071,838	552,830,396,513	713,327,034,810	715,858,189,842	29%	35%	26%
29	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	233,615,810,630	274,400,915,200	291,932,382,079	897,350,760,740	1,057,369,125,121	1,138,147,670,761	26%	26%	26%
30	Nusa Tenggara Timur	Kupang	152,441,310,330	409,656,705,681	213,682,915,102	992,065,739,354	1,379,301,640,936	1,220,116,670,345	15%	30%	18%
31	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	159,844,079,926	205,413,657,423	235,387,567,575	1,065,979,171,277	1,300,559,536,339	1,392,555,153,413	15%	16%	17%
32	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	156,625,527,928	181,729,950,456	153,751,325,651	793,401,082,634	947,515,920,343	944,567,699,174	20%	19%	16%
33	Nusa Tenggara Timur	Belu	155,489,233,185	192,110,935,584	248,405,932,623	757,893,231,506	834,489,268,773	939,748,398,806	21%	23%	26%
34	Nusa Tenggara Timur	Alor	182,061,522,540	214,339,741,312	249,816,273,281	780,956,416,784	996,729,816,873	1,070,497,501,538	23%	22%	23%
35	Nusa Tenggara Timur	Lembata	113,815,860,970	142,948,960,879	113,059,810,243	600,745,819,595	785,427,150,147	738,444,560,948	19%	18%	15%
36	Nusa Tenggara Timur	Ende	154,060,375,540	234,608,150,068	230,182,375,895	920,349,547,820	1,144,021,726,043	1,192,686,457,265	17%	21%	19%
37	Nusa Tenggara Timur	Manggarai	300,130,363,623	290,465,286,278	228,268,283,670	964,934,871,703	1,114,586,408,405	1,057,288,789,495	31%	26%	22%
38	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	169,434,378,430	211,204,325,818	176,870,519,159	600,845,953,602	713,329,441,477	717,309,409,324	28%	30%	25%
39	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	196,133,991,919	249,657,382,292	271,151,094,733	752,180,221,797	902,795,674,652	1,051,883,092,665	26%	28%	26%
40	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	165,202,636,724	163,728,564,934	230,701,093,331	483,683,750,527	569,477,418,807	940,218,256,464	34%	29%	25%
41	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	203,166,140,923	169,189,960,496	142,896,885,737	736,692,822,643	835,803,928,842	541,185,072,291	28%	20%	26%
42	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	184,112,592,115	241,355,067,526	190,180,029,283	612,658,139,494	775,936,991,839	736,553,625,110	30%	31%	26%
43	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	184,827,005,073	201,017,329,654	191,426,688,686	715,710,123,834	856,581,882,122	921,996,668,717	26%	23%	21%
44	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	269,849,473,740	229,365,456,029	94,261,785,071	571,319,182,799	589,684,591,077	448,619,128,291	47%	39%	21%
45	Nusa Tenggara Timur	Malaka	103,443,958,381	184,675,095,949	222,048,971,977	502,393,102,208	705,984,084,768	826,431,213,709	21%	26%	27%
46	Kalimantan Barat	Sambas	298,349,318,975	327,918,328,127	319,523,642,410	1,421,885,401,357	1,589,219,116,680	1,638,897,259,025	21%	21%	19%
47	Kalimantan Barat	Bengkayang	270,882,406,223	339,242,966,408	320,483,343,003	959,476,484,007	1,103,426,346,665	1,089,671,110,777	28%	31%	29%

48	Kalimantan Barat	Landak	436,362,163,076	513,350,509,022	309,338,003,541	1,209,213,551,201	1,417,981,308,384	1,288,441,667,966	36%	36%	24%
49	Kalimantan Barat	Ketapang	374,795,552,543	372,844,906,041	456,502,973,935	1,849,286,998,873	1,951,143,200,045	1,993,617,873,645	20%	19%	23%
50	Kalimantan Barat	Sintang	368,744,096,187	442,713,234,271	435,363,945,197	1,481,302,835,124	1,743,529,977,056	1,884,197,672,259	25%	25%	23%
51	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	369,611,501,830	516,742,090,512	363,660,077,485	1,421,570,042,815	1,716,356,551,973	1,651,954,428,417	26%	30%	22%
52	Kalimantan Barat	Melawi	224,792,247,117	332,886,438,857	373,043,289,027	877,214,502,340	1,016,611,450,960	1,173,295,936,173	26%	33%	32%
53	Kalimantan Barat	Kayong Utara	186,406,604,254	232,122,323,064	258,701,789,533	600,436,070,094	713,279,751,412	792,645,448,038	31%	33%	33%
54	Kalimantan Tengah	Seruyan	324,779,438,086	357,730,477,739	321,261,094,167	878,970,056,362	1,022,117,647,748	1,047,643,987,088	37%	35%	31%
55	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	322,745,629,608	377,836,179,929	190,177,392,922	1,096,539,884,203	1,308,037,433,406	1,125,469,401,994	29%	29%	17%
56	Kalimantan Utara	Nunukan	588,241,282,297	284,615,182,331	269,250,915,238	1,570,310,675,114	1,255,180,324,513	1,232,585,579,338	37%	23%	22%
57	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	520,087,822,600	291,306,389,976	294,981,767,046	1,152,521,703,818	976,867,273,947	1,206,169,389,764	45%	30%	24%
58	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	171,459,278,458	192,588,087,259	239,828,160,787	606,794,119,127	733,498,922,955	821,976,102,236	28%	26%	29%
59	Sulawesi Tengah	Donggala	260,225,884,909	359,020,547,803	166,658,700,441	1,052,255,558,571	1,280,361,008,487	1,152,661,267,833	25%	28%	14%
60	Sulawesi Tengah	Toli-Toli	143,785,207,705	153,772,235,992	265,970,611,412	865,617,496,449	946,614,742,534	1,100,849,886,269	17%	16%	24%
61	Sulawesi Tengah	Buol	255,886,522,306	250,031,194,456	236,927,585,106	812,062,985,589	953,368,636,441	935,356,140,152	32%	26%	25%
62	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	258,654,126,894	361,853,013,487	233,481,168,437	1,187,517,575,300	1,461,272,504,564	1,439,423,292,730	22%	25%	16%
63	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	285,789,031,931	315,530,280,106	212,929,693,088	909,636,793,178	1,059,845,754,278	975,362,670,106	31%	30%	22%
64	Sulawesi Tengah	Sigi	202,289,729,245	330,427,421,660	204,828,040,680	958,591,664,044	1,213,399,594,328	1,084,234,206,277	21%	27%	19%
65	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	176,457,556,809	189,244,722,389	197,037,084,940	430,742,230,111	523,149,371,470	583,627,646,002	41%	36%	34%
66	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	210,626,665,465	273,326,562,849	243,472,720,748	690,649,889,434	846,561,507,696	937,077,581,668	30%	32%	26%
67	Sulawesi Selatan	Jeneponto	273,345,115,339	377,593,324,151	204,476,346,325	1,016,032,203,915	1,245,329,180,304	1,136,700,077,474	27%	30%	0%
68	Sulawesi Tenggara	Konawe	205,074,620,431	271,257,860,403	293,409,486,915	1,051,693,541,233	1,189,502,020,486	1,377,460,241,801	19%	23%	21%
69	Sulawesi Tenggara	Bombana	235,887,414,737	293,777,081,178	211,994,302,801	727,924,500,074	860,382,991,633	834,587,056,809	32%	34%	25%
70	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	210,326,858,351	292,095,979,843	223,364,943,603	397,766,077,925	524,672,596,578	669,561,764,858	53%	56%	33%
71	Gorontalo	Boalemo	205,373,763,923	187,569,053,856	220,997,197,358	688,156,716,089	838,054,468,892	810,656,600,276	30%	22%	27%
72	Gorontalo	Pohuwato	177,287,115,029	190,126,603,640	152,860,739,116	731,495,559,146	834,239,804,434	851,949,712,432	24%	23%	18%
73	Gorontalo	Gorontalo Utara	134,080,339,115	156,550,734,732	156,922,790,519	567,723,939,013	676,214,551,793	711,893,453,557	24%	23%	22%
74	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	216,543,680,363	309,352,165,691	271,631,463,605	1,062,886,807,074	1,342,260,337,745	1,328,359,032,532	20%	23%	20%
75	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	218,444,607,029	308,409,756,569	199,937,395,050	499,478,410,976	678,593,002,406	600,869,472,482	44%	45%	33%
76	Maluku	Maluku Tenggara Barat	224,820,473,376	209,600,853,526	176,474,054,454	793,475,841,413	894,167,686,096	917,898,537,447	28%	23%	19%
77	Maluku	Maluku Tengah	332,245,278,023	332,200,231,350	364,918,834,453	1,381,150,797,844	1,631,674,780,744	1,629,020,559,213	24%	20%	22%
78	Maluku	Buru	198,230,862,474	252,688,446,161	141,619,175,542	667,178,761,550	845,802,102,471	784,365,064,016	30%	30%	18%
79	Maluku	Kepulauan Aru	129,268,110,243	238,445,815,657	254,589,863,635	658,900,206,319	885,499,359,986	1,016,898,887,356	20%	27%	25%
80	Maluku	Seram Bagian Barat	239,634,542,353	200,568,637,762	230,412,989,830	836,956,841,059	912,091,263,272	956,959,343,085	29%	22%	24%
81	Maluku	Seram Bagian Timur	255,354,867,378	220,812,459,588	295,570,419,840	840,446,524,665	892,238,711,864	1,050,105,224,861	30%	25%	28%
82	Maluku	Maluku Barat Daya	194,422,415,897	271,196,696,211	333,764,881,072	655,273,525,350	834,109,425,515	1,051,640,318,303	30%	33%	32%
83	Maluku	Buru Selatan	240,425,101,024	286,940,404,753	221,793,137,759	606,886,957,556	731,605,249,973	659,974,284,626	40%	39%	34%
84	Maluku Utara	Halmahera Barat	132,667,707,576	250,066,049,822	194,300,954,539	701,599,718,802	904,691,302,360	925,780,861,479	19%	28%	21%
85	Maluku Utara	Kepulauan Sula	228,719,910,138	303,107,743,690	184,913,553,459	649,158,970,852	810,882,918,201	793,550,373,557	35%	37%	23%
86	Maluku Utara	Halmahera Selatan	272,547,008,590	335,550,834,595	317,603,825,852	946,585,154,516	1,149,092,600,807	1,246,890,703,554	29%	29%	25%
87	Maluku Utara	Halmahera Timur	189,129,694,269	260,051,283,138	334,071,163,628	640,951,028,305	762,158,310,683	898,610,880,488	30%	34%	37%
88	Maluku Utara	Pulau Morotai	205,858,427,092	131,755,117,298	174,169,606,327	693,579,657,171	635,826,775,732	619,779,782,011	30%	21%	28%
89	Maluku Utara	Pulai Taliabu	245,638,777,579	282,035,577,922	223,109,141,557	410,499,413,804	569,739,490,187	576,704,930,869	60%	50%	39%
90	Papua Barat	Teluk Wondama	206,112,125,479	187,565,550,125	148,396,795,025	746,535,108,523	772,717,434,746	759,511,975,643	28%	24%	20%
91	Papua Barat	Teluk Bintuni	1,113,215,075,751	958,558,027,875	810,178,249,208	1,993,846,234,934	2,095,321,406,358	2,065,214,652,925	56%	46%	39%
92	Papua Barat	Sorong Selatan	256,343,365,015	276,176,604,253	196,956,739,291	788,442,153,519	917,470,296,763	877,227,244,351	33%	30%	22%
93	Papua Barat	Sorong	633,600,657,642	324,730,751,346	331,990,849,575	1,641,387,849,484	1,376,265,286,621	1,344,221,381,881	39%	24%	25%
94	Papua Barat	Raja Ampat	388,421,550,597	344,653,830,826	284,448,580,535	1,089,326,941,516	1,160,448,875,617	1,175,869,638,388	36%	30%	24%
95	Papua Barat	Tambrauw	426,370,923,137	383,345,779,931	270,833,635,250	909,595,535,756	1,112,432,614,439	946,283,268,535	47%	34%	29%
96	Papua Barat	Maybrat	311,083,805,392	284,949,038,527	196,243,578,430	807,315,350,414	975,788,046,248	919,084,754,822	39%	29%	21%
97	Papua	Merauke	657,533,172,325	312,370,426,567	438,510,245,784	2,039,480,776,078	1,823,039,429,682	2,003,830,251,280	32%	27%	22%
98	Papua	Jayawijaya	473,844,284,797	372,686,046,026	355,433,676,211	1,371,967,959,217	1,447,470,814,097	1,571,708,700,493	35%	26%	23%
99	Papua	Nabire	315,192,799,895	225,185,763,715	187,770,708,731	1,175,832,773,777	1,191,399,054,279	1,267,066,048,547	27%	19%	15%
100	Papua	Kepulauan Yapen	273,844,322,305	306,437,485,875	141,038,268,448	932,281,689,054	1,141,953,801,072	1,051,952,862,723	29%	27%	13%

101	Papua	Biak Numfor	173,158,703,751	263,743,057,603	45,531,533,345	1,036,233,609,781	1,269,134,422,675	1,028,274,664,938	17%	21%	4%
102	Papua	Paniai	218,628,569,542	285,582,434,737	291,822,942,615	921,305,412,972	1,175,579,926,203	1,226,854,902,477	24%	24%	24%
103	Papua	Puncak Jaya	378,399,351,573	399,307,725,784	156,450,877,859	1,214,560,032,146	1,483,719,759,893	1,231,309,263,977	31%	27%	13%
104	Papua	Boven Digoel	353,176,786,983	310,453,284,121	287,478,010,935	1,061,432,976,370	1,136,518,384,220	1,231,853,113,606	33%	27%	23%
105	Papua	Mappi	306,716,310,865	272,742,427,209	177,680,694,597	1,161,495,280,903	1,335,776,315,629	1,192,831,340,651	26%	20%	15%
106	Papua	Asmat	282,487,897,109	367,852,691,736	415,345,804,001	1,246,180,421,947	1,450,974,151,707	1,506,010,743,437	23%	25%	28%
107	Papua	Yahukimo	262,277,267,308	289,995,160,440	159,093,691,299	1,210,591,031,536	1,435,042,098,061	1,540,776,941,897	22%	20%	10%
108	Papua	Pegunungan Bintang	394,628,998,315	405,852,736,783	334,235,138,085	1,314,806,693,662	1,485,851,430,968	1,554,177,392,905	30%	27%	22%
109	Papua	Tolikara	384,198,419,928	300,448,301,373	188,387,960,789	1,173,720,667,574	1,290,741,422,377	1,344,073,754,657	33%	23%	14%
110	Papua	Sarmi	413,981,170,605	379,004,357,401	251,779,100,479	1,004,196,043,120	1,122,730,161,069	1,051,502,778,455	41%	34%	24%
111	Papua	Keerom	228,490,099,221	218,964,177,207	132,906,779,601	842,830,123,392	1,016,341,445,836	917,762,833,575	27%	22%	14%
112	Papua	Waropen	263,051,265,110	248,360,857,724	250,914,438,988	848,311,414,098	988,809,523,680	978,232,907,351	31%	25%	26%
113	Papua	Supiori	215,639,172,741	165,105,499,034	176,426,269,106	692,335,647,055	684,961,529,884	722,904,463,552	31%	24%	24%
114	Papua	Mamberamo Raya	353,638,077,100	466,920,408,407	270,206,016,112	1,029,587,447,098	1,186,634,155,825	1,003,953,586,962	34%	39%	27%
115	Papua	Nduga	441,181,402,771	362,157,064,747	323,231,383,874	958,969,092,218	1,116,495,173,300	1,189,241,828,349	46%	32%	27%
116	Papua	Lanny Jaya	506,034,721,850	398,975,084,625	274,035,469,195	1,293,071,757,511	1,418,122,162,708	1,332,363,560,503	39%	28%	21%
117	Papua	Memberamo Tengah	465,553,279,908	556,589,207,029	350,196,788,268	969,972,832,686	1,182,813,683,322	1,033,108,697,437	48%	47%	34%
118	Papua	Yalimo	401,607,737,816	408,769,881,730	263,523,688,600	1,042,641,928,643	1,239,047,767,136	1,129,586,032,046	39%	33%	23%
119	Papua	Puncak	677,895,106,172	448,486,535,433	168,912,970,636	1,594,392,986,755	1,480,997,896,488	844,038,472,854	43%	30%	20%
120	Papua	Dogiyai	318,488,584,529	311,566,588,258	271,850,100,051	867,361,841,429	932,841,625,602	1,322,725,447,419	37%	33%	21%
121	Papua	Intan Jaya	394,986,704,000	312,379,167,614	368,767,637,787	979,249,564,956	1,067,567,888,917	1,071,044,063,117	40%	29%	34%
122	Papua	Deiyai	258,957,007,950	271,969,824,465	159,576,326,899	738,807,917,145	854,256,621,738	780,941,002,266	35%	32%	20%

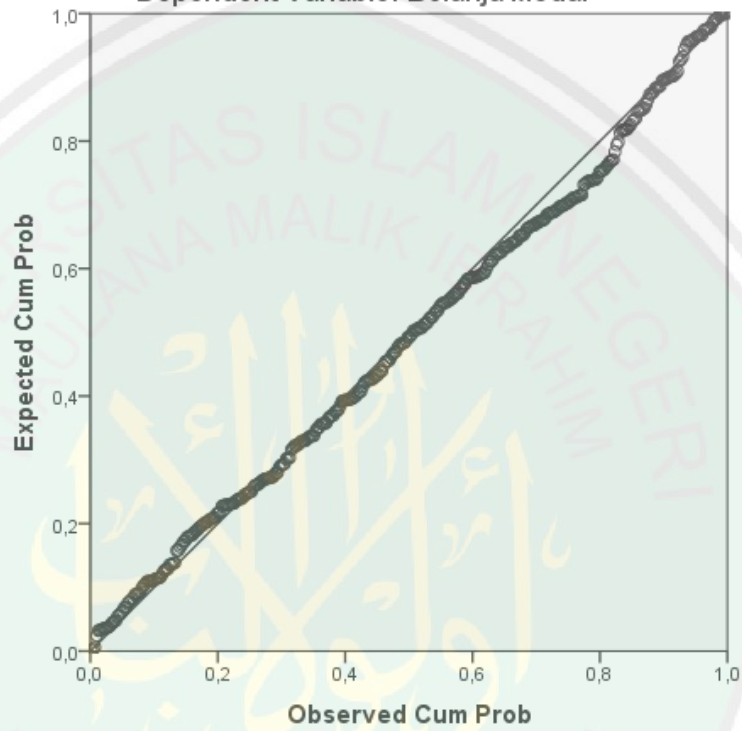
Lampiran 6

HASIL UJI SPSS

Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

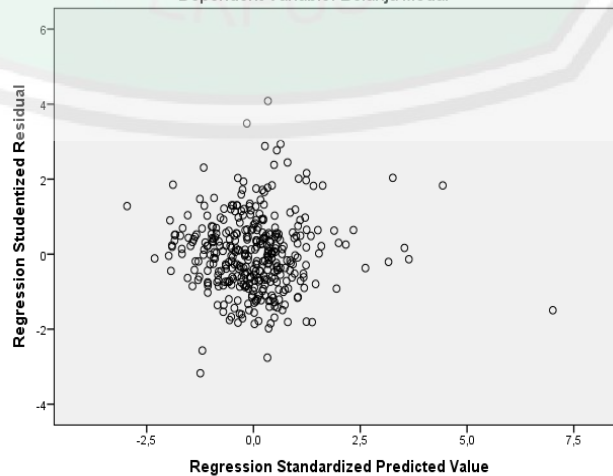
Dependent Variable: Belanja Modal



Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Belanja Modal



Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00120
Cases < Test Value	183
Cases >= Test Value	183
Total Cases	366
Number of Runs	166
Z	-1,884
Asymp. Sig. (2-tailed)	,060

a. Median

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,590 ^a	,349	,341	,06646

a. Predictors: (Constant), Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemadirian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas

Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,239	,077		-3,102	,002		
	Rasio Efektivitas	,141	,043	,147	3,266	,001	,895	1,117
	Rasio Efisiensi	,384	,058	,291	6,604	,000	,927	1,079
	Rasio Kemadirian	-,768	,096	-,350	-8,040	,000	,951	1,051
	Rasio Pertumbuhan	,136	,015	,398	8,826	,000	,888	1,126

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Hasil Uji Statistik T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,239	,077		-3,102	,002
	Rasio Efektivitas	,141	,043	,147	3,266	,001
	Rasio Efisiensi	,384	,058	,291	6,604	,000
	Rasio Kemadiran	-,768	,096	-,350	-8,040	,000
	Rasio Pertumbuhan	,136	,015	,398	8,826	,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,853	4	,213	48,294	,000 ^b
	Residual	1,595	361	,004		
	Total	2,448	365			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemadiran, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas













BUKTI KONSULTASI

Nama : Feri Prastyo Setiawan

NIM/Jurusan : 15520009/Akuntansi

Pembimbing : Sri Andriani, S.E., M.Si.

Judul Skripsi : Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	14 Maret 2019	Pengajuan Outline	1. 
2.	24 Maret 2019	Konsultasi Judul Skripsi	2. 
3.	07 April 2019	Bimbingan Bab I	3. 
4.	18 April 2019	Bimbingan Proposal	4. 
5.	25 April 2019	Revisi Proposal	5. 
6.	10 Mei 2019	Revisi & Acc Proposal	6. 
7.	11 Juli 2019	Seminar Proposal	7. 
8.	15 Juli 2019	Revisi Proposal	8. 
9.	17 Juli 2019	Acc Proposal	9. 
10.	26 September 2019	Konsultasi Data Skripsi	10. 
11.	02 Desember 2019	Skripsi Bab I-V	11. 
12.	05 Desember 2019	Acc Keseluruhan	12. 

Malang, 26 Desember 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak.,CA
NIP. 19720322 200801 2 005

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Feri Prastyo Setiawan
 Tempat, tanggal lahir : Negara, 06 September 1997
 Alamat Asal : Jl. Danau Kalimutu No.114, Lelateng, Jembrana, Bali
 Alamat Kos : Jl. Bendungan Sigura-gura Gg.06 No.05, Malang
 Telepon/HP : 081217597486
 E-mail : feriprastyosetiawan@gmail.com
 Facebook : Feri Prastyo Setiawan

Pendidikan Formal

2001-2003 : TK. Aisyiyah Bustanul Athfal Jembrana
 2003-2009 : SD Negeri 3 Lelateng
 2009-2012 : SMP Negeri 2 Negara
 2012-2015 : MAN Negara
 2015-2019 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki
 Malang
 2017 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) UIN Maliki Malang tahun 2015
- Anggota Organisasi Daerah IMADE 2016
- Anggota PMII UIN Maliki Malang 2015

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Pelatihan MYOB UIN Maliki Malang 2017
- Panitia Workshop Analisis dan Pengembangan Produk Halal 2019
- Surveyor Pengembangan Pariwisata Halal Kota Batu 2019

- Peserta Pelatihan Perencanaan dan Pengembangan Ekspor Produk Industri 2019
- Peserta Pelatihan 10.000 UMKM Pendidikan Administrasi dan Manajemen Keuangan, Entrepreneurship, Akses Pebankan, dan E-Commerce 2019





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
 Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZURAIDAH, SE.,MSA
 NIP : 19761210 200912 2 001
 Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

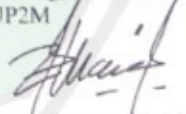
Nama : Feri Prastyo Setiawan
 NIM : 15520009
 Handphone : 081217597486
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Email : feriprastyoSetiawan@gmail.com
 Judul Skripsi : Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Tertinggal di Indonesia

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
18%	17%	7%	19%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 04 Desember 2019
 UP2M


 ZURAIDAH, SE.,MSA
 19761210 200912 2 001

Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Tertinggal di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	4%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	3%
3	media.neliti.com Internet Source	2%
4	repository.widyatama.ac.id Internet Source	1%
5	docplayer.info Internet Source	1%
6	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Student Paper	1%
8	pittaku.blogspot.com Internet Source	1%

9	eprint.stieww.ac.id Internet Source	1%
10	pt.scribd.com Internet Source	1%
11	www.indodaily.net Internet Source	1%
12	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
13	Submitted to Udayana University Student Paper	1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%